

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1 Aspek Geografi**

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 109<sup>0</sup>47'28" - 110<sup>0</sup> 8' 20" Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> 32' – 7<sup>0</sup>54" Lintang Selatan. Luas daerah adalah 1.034,82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari  $\pm$  2/5 daerah dataran dan 3/5 daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah :

Sebelah utara	:	Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah timur	:	Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY
Sebelah selatan	:	Samudera Indonesia
Sebelah barat	:	Kabupaten Kebumen

Secara administratif, Kabupaten Purworejo meliputi 16 Kecamatan yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Kecamatan terjauh dari pusat kota Purworejo adalah Kecamatan Bruno dengan jarak 35 km, sedangkan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Banyuurip dengan jarak dari pusat kota 4 km. Seluruh kecamatan dapat dijangkau dengan angkutan umum. Adapun jumlah Desa/Kelurahan dan luas Kecamatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan  
Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Grabag	32	64,92
2.	Ngombol	57	55,27
3.	Purwodadi	40	53,96
4.	Bagelen	17	63,76
5.	Kaligesing	21	74,73
6.	Purworejo	25	52,72
7.	Banyuurip	27	45,08
8.	Bayan	26	43,21
9.	Kutoarjo	27	37,59
10.	Butuh	41	46,08
11.	Pituruh	49	77,42
12.	Kemiri	40	92,05
13.	Bruno	18	108,43
14.	Gebang	25	71,86
15.	Loano	21	53,65
16.	Bener	28	94,08
	Jumlah	494	1.034,82

(Sumber :Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015)

### 2.1.1 Karakteristik Wilayah

Keadaan Rupa Bumi (topografi) daerah Kabupaten Purworejo secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- 2) Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1050 meter di atas permukaan air laut.

Kemiringan lereng atau kelerengan dapat dibedakan adalah :

- 1) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo,
- 2) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen,

- 3) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo,
- 4) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Suhu udara rata-rata 20°C – 32°C, sedangkan kelembaban rata-rata antara 70 – 90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yakni 9.291 mm dan 7.849 mm bulan Januari.

## **2.2 Aspek Geologi**

Deskripsi mengenai kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Kabupaten Purworejo didominasi oleh litologi batuan berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api, dengan tanah yang terdiri dari batuan mencapai 60,1% dari seluruh wilayah. Proporsi tersebut menyisakan area seluas 39,9% yang terdiri dari material jenis aluvium. Adapun agihan secara umum mengenai litologi batuan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- 1) Endapan vulkanik tua maupun endapan vulkanik campuran dengan endapan sedimen sebagian besar terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi;
- 2) Endapan alluvium dataran dan sungai, merupakan daerah dengan material endapan muda tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan Kabupaten Purworejo.

Adapun kondisi Geologi Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Kondisi Geologi Kabupaten Purworejo

No.	Geologi	Luas		Persebaran Lokasi
		Ha	%	
1.	Alluvium	44299,33	39,9	Semua kecamatan, kecuali Bruno
2.	Andesit	7754,611	7,5	Bagelen, Kaligesing, Loano, Bener
3.	Breccia Formation	14,08761	0,0	Pituruh
4.	Coastal Deposit	5366,424	5,2	Purwodadi, Ngombol, Grabag
5.	Dacite	357,3655	0,3	Bagelen, Kaligesing
6.	Formasi Kebobutak	17717,05	17,1	Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Bener, Gebang, Loano
7.	Formasi Halang	17033,17	16,5	Bruno, Pituruh, Kemiri, Gebang, Kutoarjo, Bayan, Purworejo, Loano, Bener
8.	Formasi Jonggrangan	695,660	0,7	Kaligesing
9.	Formasi Peniron	9203,624	8,9	Bruno, Pituruh, Kemiri, Gebang, Kutoarjo, Bayan
10.	Formasi Sentolo	1040,663	1,0	Bener, Gebang
	Jumlah	103.483	100,0	

Sumber : Analisis Peta Geologi Tata Lingkungan Kabupaten Purworejo tahun 2004

2.2.1 Tata Guna Lahan

Tata guna lahan di Kabupaten Purworejo berdasarkan data dari Pusat Pengelolaan Ecoregion Jawa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (PPEJ KLHK) dibedakan menjadi 18 jenis, sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.3  
Tata Guna Lahan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (m <sup>2</sup> )	%
1	Bangunan Industri dan Perdagangan	456,966.24	0.039%
2	Bangunan Permukiman Desa (Berasosiasi dgn Vegetasi Pekarangan)	195,841,905.46	16.581%
3	Bangunan Permukiman Kota	13,111,582.57	1.110%
4	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	172,477,945.94	14.603%
5	Hutan Rakyat	102,342,334.64	8.665%
6	Hutan Rakyat (Silvikultur)	115,838,319.52	9.807%
7	Hutan Tanaman	115,838,319.52	9.807%
8	Kebun Campuran	59,543,022.47	5.041%
9	Ladang/Tegalan dengan Palawija	16,528,829.60	1.399%
10	Ladang/Tegalan Holtikultura	5,434,268.95	0.460%
11	Lahan Terbuka Lainnya	842,145.10	0.071%
12	Perkebunan Kelapa	4,064,718.46	0.344%
13	Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman Lain/Bera	60,347,304.54	5.109%
14	Sawah dengan Padi Terus Menerus	291,947,993.16	24.717%
15	Semak	4,515,359.04	0.382%
16	Semak Belukar	3,288,760.46	0.278%
17	Sungai	12,123,998.79	1.026%
18	Tambak Ikan/Undang	6,603,201.82	0.559%

Sumber data: Pusat Pengelolaan Ecoregion Jawa Kementerian LH dan Kehutanan,PPEJ KLHK (2015)

### 2.2.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 di wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana kekeringan.

#### a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak. Pada kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang terletak di kawasan ini perlu segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Kemiri.

#### b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan

permanen di tempat tersebut. Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.

c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-musim tertentu. Lokasi kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang di kecamatan tersebut meliputi kawasan kurang lebih sejauh 1 km dari batas pantai, atau kurang lebih seluas 2130 hektar. Banjir akibat gelombang pasang terjadi setiap tahunnya dan pada umumnya menggenangi kawasan pertambakan, kawasan pertanian dan permukiman penduduk, menimbulkan kerugian yang cukup besar.

d. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman penduduk ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air bersih/minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh air bersih.

Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno,

Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Kawasan kering tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Sementara kawasan dengan tingkat kekeringan sedang berada di Kecamatan Bruno.

e. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami adalah tempat-tempat yang berpotensi terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran tanah. Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama perjalanan dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke laut. Lokasi kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian Selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi.

f. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara

tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, runtuhnya tanah, aktivitas gunung berapi, dan ledakan nuklir. Energi gerakan gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi, getaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan korban jiwa. Magnitudo gempa bumi menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan pada pusat gempa, ukuran dan luas daerah kerusakan akibat gempa secara kasar berhubungan dengan besarnya energi yang dilepaskan. Skala magnitudo gempa bumi biasanya dinyatakan dalam satuan skala *richter* (1 - 10 SR).

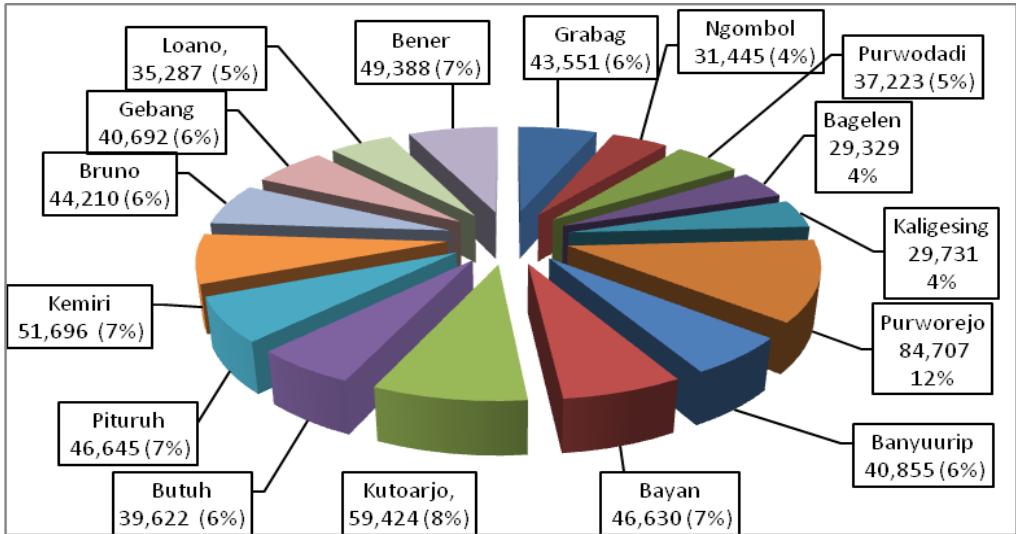
Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Purworejo pada dasarnya meliputi seluruh wilayah kabupaten karena gempa bumi sulit untuk diprediksi pusat gempanya, jangkauan dan kekuatannya. Akan tetapi, berdasarkan kondisi geologi, maka sesar berada di Kecamatan Bruno dan Kecamatan Kemiri, sehingga diduga bila terjadi gempa yang berpusat di Kabupaten Purworejo, maka kerawanan daerah tersebut adalah yang paling tinggi.

## **2.3 Aspek Demografi**

### **2.3.1 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 694.404 jiwa. Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2015 adalah 710.435 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8% dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun Persentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2015 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



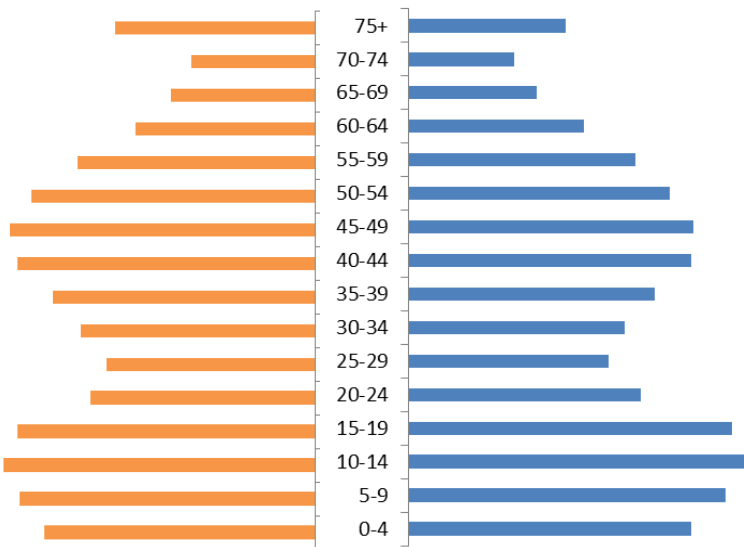


(sumber : Kabupaten Dalam Angka, BPS, 2016)

Gambar 2.1 : Persentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2015

### 2.3.2 Usia

Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun sebesar 65,1%. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2015 adalah 53,7.Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 53,7 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas). Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2015 sebagaimana tersaji pada gambar dan tabel berikut :



Gambar 2.2 : Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2015

Tabel 2.4  
Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Kelompok Umur	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
0 sampai dengan 14	177.269	173.164	172.112	170.195	168.331
15 sampai dengan 64	445.226	457.856	457.369	460.005	462.215
65 keatas	73.905	77.563	76.002	77.838	79.889
Rasio Beban Ketergantungan (%)	56,41	54,74	54,25	53,92	53,7

Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)

Untuk kabupaten Purworejo tergolong piramida penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih besar daripada angka kematian.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan di bagi menurut usia, tua dan muda:

- 1) Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.
- 2) Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu Negara atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan angka beban ketergantungan Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 50-55, menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non produktif sebesar  $\pm 5\%$ .

### 2.3.3 Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Angka kepadatan penduduk kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Satuan yang biasa digunakan untuk menggambarkan angka kepadatan adalah orang/hektar atau orang/km<sup>2</sup>. Besarnya angka kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun 2015 sebesar 686,53 orang / km<sup>2</sup> luas wilayah.

Sebagian besar penduduk Purworejo terkonsentrasi di kecamatan Purworejo, Kutoarjo dan Bayan masing masing sebesar 1,606.73; 1,580.85 dan 1,079.15 orang/km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 397,85 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 407,73 orang/km<sup>2</sup>. Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas. Hal tersebut tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.5  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan  
Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan
1	Grabag	43,551	64.92	670.84
2	Ngombol	31,445	55.27	568.93
3	Purwodadi	37,223	53.96	689.83
4	Bagelen	29,329	63.76	459.99
5	Kaligesing	29,731	74.73	397.85
6	Purworejo	84,707	52.72	1,606.73
7	Banyuurip	40,855	45.08	906.28
8	Bayan	46,630	43.21	1,079.15
9	Kutoarjo	59,424	37.59	1,580.85
10	Butuh	39,622	46.08	859.85
11	Pituruh	46,645	77.42	602.49
12	Kemiri	51,696	92.05	561.61
13	Bruno	44,210	108.43	407.73
14	Gebang	40,692	71.86	566.27
15	Loano	35,287	53.65	657.73
16	Bener	49,388	94.08	524.96

Sumber data: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS (2016)

2.3.4 Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2014-2015 sebesar 0.34%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Bayan, Banyuurip, Gebang, Ngombol, Purworejo, Bruno, Butuh.  
*(sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2016).*

2.3.5 Mata pencaharian penduduk

Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Purworejo umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar didominasi sektor pertanian (36.66%), kemudian diikuti sektor perdagangan (22.61%), sektor jasa (16,72%), industri (13,53%), komunikasi (2,63%), keuangan (1,19%), pertambangan dan penggalian (0.28%) dan listrik, gas dan air (0.01%). *(Sumber : Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2016).*

Tabel 2.6

Persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang bekerja  
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2014

No	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	43,10	28,05	36,66
2	Pertambangan dan penggalian	0,19	0,40	0,28
3	Industri	9,00	19,59	13,53
4	Listrik, gas dan air	0,17	0,00	0,10
5	Konstruksi	10,74	0,33	6,28
6	Perdagangan	17,56	29,35	22,61
7	Komunikasi	4,27	0,45	2,63
8	Keuangan	1,02	1,41	1,19
9	Jasa-jasa	13,95	20,42	16,72

*Sumber data: Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun, BPS, 2016*

2.3.6 Tingkat Pengangguran

Pada tahun 2014, Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 64,95%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,1%, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 12.193 orang didominasi pencari kerja berpendidikan setingkat SLTA. Hasil perhitungan BPS untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 adalah sebesar 4,01 % .

2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 PDRB dan Perkembangannya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai

tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai dengan tahun 2015 ini menggunakan tahun dasar tahun 2010. Tabel berikut menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Purworejo berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, dimana keduanya telah dihitung dengan menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Tabel 2.7  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Purworejo Tahun 2011 s.d 2015

	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,695,906.96	2,846,779.72	3,124,856.37	3,261,078.64	3,595,239.42
2	Pertambangan dan Penggalian	71,234.21	75,122.72	81,206.30	102,679.08	111,028.19
3	Industri Pengolahan	1,675,053.44	1,821,084.78	1,988,763.25	2,329,509.87	2,500,675.60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,079.36	8,836.23	8,967.90	9,239.97	9,853.35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,695.37	7,456.88	7,390.97	7,690.27	8,342.61
6	Konstruksi	791,816.66	878,780.36	950,514.96	1,067,489.68	1,167,292.83
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,309,644.36	1,387,667.25	1,537,689.37	1,670,914.70	1,719,084.68
8	Transportasi dan Pergudangan	488,629.06	536,322.71	586,467.34	684,771.67	747,295.51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	207,908.78	217,678.59	232,455.84	262,057.28	283,320.29
10	Informasi dan Komunikasi	440,238.03	486,158.89	530,172.33	609,002.17	623,598.91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	337,620.46	375,501.59	394,602.20	427,019.96	481,956.45
12	Real Estate	189,775.23	203,791.06	222,226.85	252,979.12	278,076.43
13	Jasa Perusahaan	22,593.19	25,759.01	29,280.51	32,921.10	36,461.23
14	Adm.Pemerintahan,Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	419,844.52	468,145.10	496,929.30	531,381.94	573,961.23
15	Jasa Pendidikan	592,279.54	772,852.32	897,941.03	1,041,478.10	1,133,027.60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124,315.68	147,931.89	163,129.50	178,273.01	216,281.39
17	Jasa lainnya	202,511.42	210,816.70	225,162.60	259,528.80	296,943.76
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9,585,146.27	10,470,685.80	11,477,756.62	12,728,015.36	13,782,439.50

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2015).

Tabel 2.8  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Purworejo Tahun 2011 s.d 2015

	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,500,312.72	2,505,323.03	2,555,986.57	2,471,592.22	2,606,123.78
2	Pertambangan dan Penggalian	66,964.48	70,513.86	73,947.66	78,838.94	80,796.37
3	Industri Pengolahan	1,505,278.78	1,585,212.08	1,686,631.41	1,835,407.43	1,917,799.80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,989.75	8,878.55	9,502.61	9,733.31	9,926.26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,631.99	7,409.22	7,179.24	7,316.35	7,685.75
6	Konstruksi	755,532.63	805,702.90	842,613.99	878,289.77	916,122.36
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,252,551.94	1,289,742.80	1,386,758.60	1,465,842.02	1,474,918.82
8	Transportasi dan Pergudangan	488,076.40	531,732.07	575,140.89	625,145.30	659,744.65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201,022.10	206,439.66	212,278.15	228,945.36	238,058.42
10	Informasi dan Komunikasi	434,127.42	480,868.21	527,423.47	613,406.06	629,369.75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	318,383.05	323,013.03	325,319.58	334,320.60	365,231.80
12	Real Estate	186,293.32	199,078.09	214,377.39	232,405.73	242,358.14
13	Jasa Perusahaan	21,181.91	22,961.05	25,294.84	27,613.28	29,316.04
14	Adm.Pemerintahan,Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	414,905.36	417,093.30	426,649.02	427,486.58	446,904.95
15	Jasa Pendidikan	522,690.46	621,244.81	673,566.49	741,022.05	799,190.12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,646.58	128,923.77	136,223.94	143,114.80	165,131.34
17	Jasa lainnya	195,225.42	202,106.48	207,996.08	224,508.46	249,908.29
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,993,814.31	9,406,242.91	9,886,889.93	10,344,988.26	10,838,586.63

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2015).

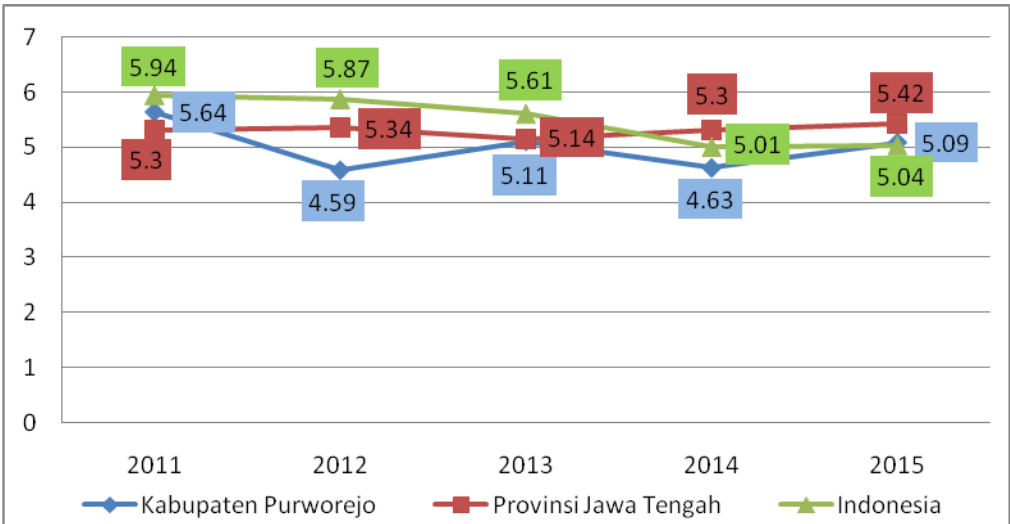
2.4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2011 s.d. tahun 2012 adalah dari 5,64%, turun menjadi 4,59%, meningkat menjadi 5,11% pada tahun 2013, turun menjadi 4,63% pada tahun 2014, meningkat menjadi 5,09% pada tahun 2015. Kondisi tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Namun demikian jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,04%, Kabupaten Purworejo masih berada di atas rata-rata Nasional, yang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.9  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2011-2015

Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Purworejo	5,64	4,59	5,11	4,63	5,09
Provinsi Jawa Tengah	5,30	5,34	5,14	5,3	5,42
Indonesia	5,94	5,87	5,61	5,01	5,04

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2015).



(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2011-2015, diolah)

Gambar 2.3 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo  
Tahun 2011 – 2015(%)

#### 2.4.3 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo

Pada tahun 2011 pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif 7,85%, sedangkan pertumbuhan tertinggi pada jasa pendidikan sebesar 16,53%.

Pada tahun 2012 pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan negative 2,92% dan pertumbuhan tertinggi masih pada jasa pendidikan sebesar 18,86%.

Pada tahun 2013, pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami pertumbuhan negatif 3,10% dan pertumbuhan tertinggi pada jasa perusahaan sebesar 10,16%. Sedangkan pada tahun 2014 pertumbuhan terendah pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 3,30% dan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 16,30%.

Tahun 2015 pertumbuhan pada semua lapangan usaha PDRB positif (tidak ada yang negatif). Pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,58% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,33%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PDRB dengan menggunakan metode pengelompokkan baru dari sektor ke lapangan usaha menunjukkan betapa dinamisnya pertumbuhan hampir semua lapangan usaha yang ada (17 lapangan usaha).

Beberapa lapangan usaha yang selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhannya diatas rata-rata lapangan usaha lainnya dan sekaligus merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan



- Informasi dan Komunikasi
- Real Estate
- Jasa Perusahaan
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Data tentang pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha di Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun terakhir secara lebih detail tampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.10  
 Pertumbuhan PDRB pada tiap lapangan usaha  
 di Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015  
 berdasar PDRB Tahun Dasar 2010

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.78	0.20	2.02	(3.30)	4.34
2	Pertambangan dan Penggalian	(7.85)	5.30	4.87	6.61	2.48
3	Industri Pengolahan	6.66	5.31	6.40	8.82	5.19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.81	11.12	7.03	2.43	2.01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.90	(2.92)	(3.10)	1.91	1.58
6	Konstruksi	0.32	6.64	4.58	4.23	4.31
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.69	2.97	7.52	5.70	4.17
8	Transportasi dan Pergudangan	3.54	8.94	8.16	8.69	7.10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.30	2.70	2.83	7.85	5.24
10	Informasi dan Komunikasi	8.16	10.77	9.68	16.30	7.33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.70	1.45	0.71	2.77	5.93
12	Real Estate	6.44	6.86	7.69	8.41	5.65
13	Jasa Perusahaan	8.90	8.40	10.16	9.17	6.36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.76	0.53	2.29	0.20	4.30
15	Jasa Pendidikan	16.53	18.86	8.42	10.01	6.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.10	11.48	5.66	5.06	7.01
17	Jasa lainnya	1.13	3.52	2.91	7.94	3.01
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.64	4.59	5.11	4.63	5.09

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2016)

#### 2.4.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo

Struktur ekonomi di Kabupaten Purworejo tahun 2010-2015 menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.11  
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015  
Berdasar PDRB Tahun Dasar 2010

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.50	27.80	26.63	25.85	23.89	26.09
2	Pertambangan dan Penggalian	0.85	0.74	0.75	0.75	0.76	0.81
3	Industri Pengolahan	16.58	16.74	16.85	17.06	17.74	18.14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
6	Konstruksi	8.85	8.40	8.57	8.52	8.49	8.47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.05	13.93	13.71	14.03	14.17	12.47
8	Transportasi dan Pergudangan	5.54	5.43	5.65	5.82	6.04	5.42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.26	2.24	2.19	2.15	2.21	2.06
10	Informasi dan Komunikasi	4.71	4.83	5.11	5.33	5.93	4.52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.64	3.54	3.43	3.29	3.23	3.50
12	Real Estate	2.06	2.07	2.12	2.17	2.25	2.02
13	Jasa Perusahaan	0.23	0.24	0.24	0.26	0.27	0.26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.79	4.61	4.43	4.32	4.13	4.16
15	Jasa Pendidikan	5.27	5.81	6.60	6.81	7.16	8.22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.22	1.29	1.37	1.38	1.38	1.57
17	Jasa lainnya	2.27	2.17	2.15	2.10	2.17	2.15
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2016)

#### 2.4.5.PDRB per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kabupaten Purworejo mencapai Rp 9.83 Juta menjadi Rp

11,02 Juta pada tahun 2011, Rp 12,12 Juta pada tahun 2012, Rp 13,59 Juta pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp 14,79 Juta pada tahun 2014 serta mencapai 15,25 Juta pada tahun 2015.

Tabel 2.12  
PDRB per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015  
(Juta Rupiah)

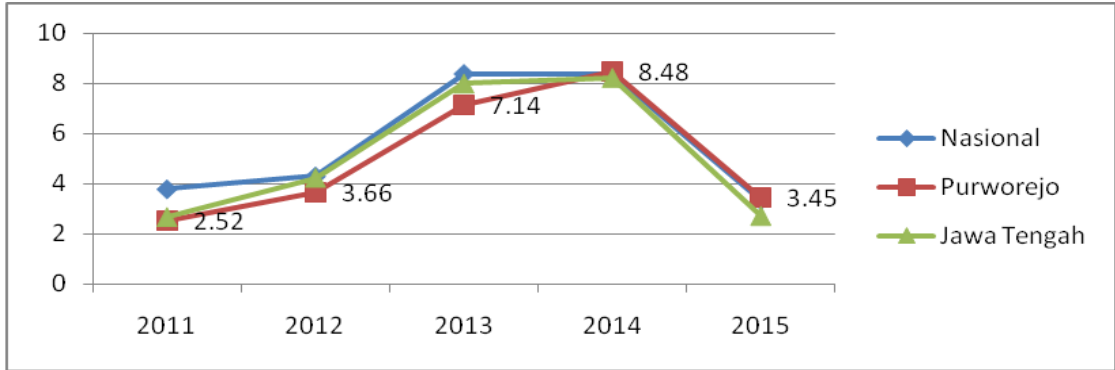
Cakupan Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Purworejo	11.02	12.12	13.59	14.79	15,25

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2012-2015)

2.4.6 Inflasi

Kondisi perekonomian daerah tidak bisa lepas dari pengaruh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama pengaruh kebijakan makro oleh pemerintah secara nasional. Inflasi menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dengan mencermati tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu akan diketahui tingkat perkembangan harga dan kestabilan perekonomian di wilayah tersebut.

Inflasi Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2015 cukup baik yaitu mencapai 3,45%, jauh lebih rendah dari kondisi tahun 2014 yang sebesar 8,48%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat perubahan harga di Purworejo pada tahun 2015 lebih stabil apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Perkembangan inflasi dari ahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tampak dalam gambar berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2011-2015

Gambar 2.4 : Laju Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015

Inflasi pada tahun 2015 secara umum dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas dari tujuh kelompok barang dan jasa, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar, Sandang, Kesehatan, Pendidikan, Rekreasi & Olahraga, dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Distribusi inflasi per kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13

Inflasi Kabupaten Purworejo menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2011-2015

No.	Kelompok Barang dan Jasa	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bahan Makanan	3,11	3,52	13,80	9,49	3,34
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,53	8,09	2,94	8,52	7,30
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar	2,48	2,34	5,17	6,81	6,99
4	Sandang	7,03	1,93	2,25	4,35	0,94
5	Kesehatan	2,03	3,99	1,93	2,92	1,50
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,15	1,59	0,64	0,00	2,15
7	Transport, Komunikasi dan Jasa keuangan	0,51	1,13	11,37	16,18	2,94
Inflasi Umum		2,52	3,66	7,14	8,48	3,45

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

Secara detil mengenai inflasi Kabupaten Purworejo menurut bulan dan kelompok barang dan jasa tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.14

Inflasi Kabupaten Purworejo menurut Bulan dan Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2015

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
Januari	-2,57	-0,16	2,54	0,16	0,00	0,00	-4,23
Februari	-3,19	1,78	2,46	0,20	0,28	0,00	-4,23
Maret	-3,61	2,36	4,41	0,33	0,28	0,00	-4,23
April	-3,58	3,30	4,31	0,05	0,28	0,00	-4,23
M e i	-5,00	4,45	5,96	-0,02	0,28	0,00	-4,23
J u n i	-3,59	6,53	5,88	-0,23	1,40	0,00	-4,23
J u l i	0,93	6,05	6,04	0,26	1,40	0,47	-1,29
Agustus	1,35	5,89	6,43	0,75	1,50	-2,15	-2,63
September	1,53	5,89	6,43	0,87	1,50	-2,15	-2,63
Oktober	-0,52	6,85	6,43	0,91	1,50	-2,15	-2,63
November	-0,17	6,85	6,99	0,93	1,50	-2,15	-2,94
Desember	3,34	7,30	6,99	0,94	1,50	-2,15	-2,94

Sumber: Indek Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo Tahun 2015

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.

Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

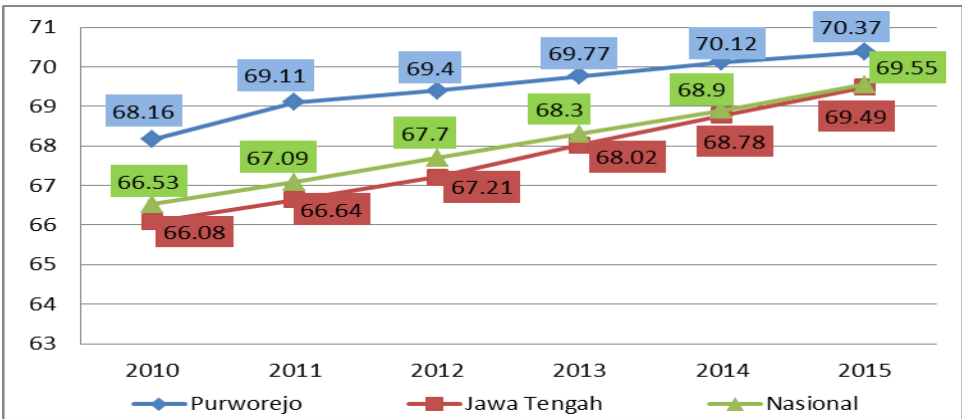
No.	Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Purworejo	2,52	3,66	7,14	8.48	3,45
2.	Empat Kota SBH					
	Purwokerto	3,40	4,73	8,50	7.09	2,52
	Surakarta	1,93	2,87	8,32	8.01	2,56
	Semarang	2,87	4,85	8,19	8.53	2,56
	Tegal	2,58	3,09	5,80	7.40	3,95
3.	Provinsi Jawa Tengah	2,68	4,24	7,99	8.22	2,73
4.	Nasional	3,79	4,30	8,38	8.36	3,35

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

2.4.7 Indek Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran rill per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Purworejo pada tahun 2015 sebesar 70,37 meningkat dari tahun 2014 sebesar 70,12. seperti terlihat pada gambar berikut :



(Sumber: BPS Kabupaten Purworejo & Bappeda Purworejo, 2011-2015, diolah).

Gambar 2.5 : Indeks Pembangunan Manusia Purworejo Tahun 2010 – 2015

Komponen pembentuk indikator IPM dalam metodologi yang baru ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

**Angka harapan hidup** adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah  $25 < x < 85$  (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Pada tahun 2011 angka harapan hidup di Kabupaten Purworejo adalah 73,56 tahun meningkat menjadi 73,66 tahun di tahun 2012, meningkat menjadi 73,77 di tahun 2013, meningkat menjadi 73,83 di tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 74,03.

**Angka melek huruf** pada metodologi yang baru berubah menjadi **Angka Harapan Lama Sekolah** yang menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Standar UNDP minimal 0 dan maksimal 18 tahun.

Pada tahun 2011 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo mencapai 12,69 meningkat menjadi 12,74 di tahun 2012, meningkat menjadi 12,83 pada tahun 2013,

meningkat menjadi 13,03 di tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 13,04.

**Rata-rata lama sekolah** adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo adalah 7,39 tahun meningkat menjadi 7,45 tahun di tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 7,51 tahun di tahun 2012, menjadi 7,57 tahun di tahun 2013, meningkat menjadi 7,63 di tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 7,65.

**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan** merupakan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan untuk menggambarkan daya beli masyarakat. Standar UNDP maksimal Rp. 737.720,- yang merupakan proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% per tahun selama periode 1993-2018. Pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Purworejo meningkat dari Rp. 8.919.000,- di tahun 2010 menjadi Rp. 8.921.000,- di tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 9.022.000,- di tahun 2012, menjadi Rp.9.155.000,- di tahun 2013, meningkat menjadi Rp. 9.189.000,- di tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 9.305.000,-. IPM Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahunnya dan di atas angka provinsi maupun nasional. Perkembangan indikator pembentuk IPM, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16  
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Purworejo

No	Tahun	IPM	Indikator Pembentuk			
			Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (th)	Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)
1	2010	68,16	73,45	12,26	7.39	8.919
2	2011	69,11	73,56	12,69	7.45	8.921
3	2012	69,40	73,66	12,74	7.51	9.022
4	2013	69,77	73,77	12,83	7,57	9.155
5	2014	70,12	73,83	13,03	7,63	9.189
6	2015	70,37	74,03	13,04	7,65	9.305

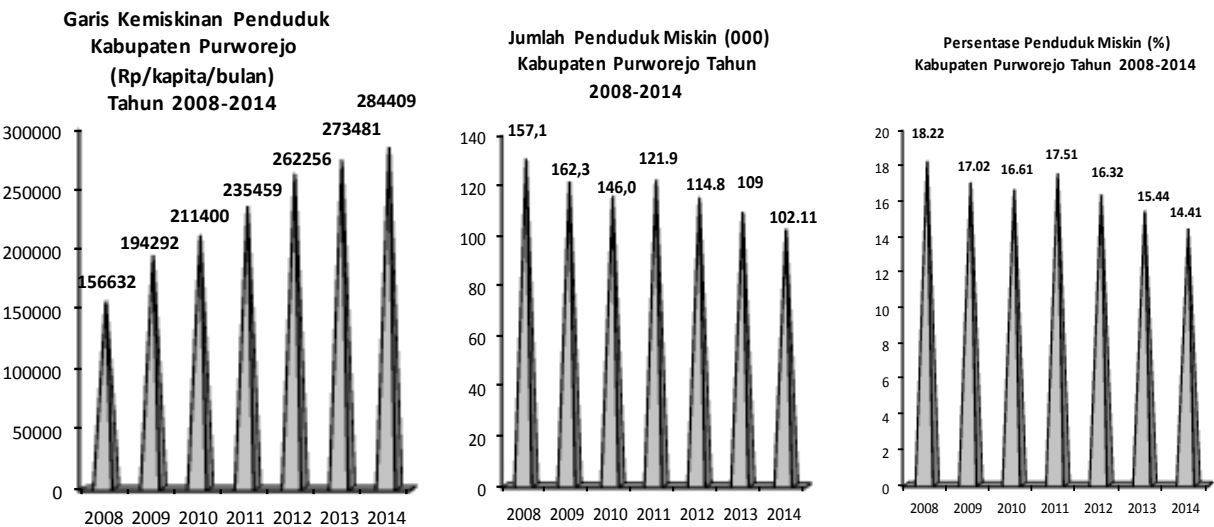
(Sumber: BPS Kabupaten Purworejo & Bappeda Purworejo, 2011-2016).

2.4.8 Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang akan dimuat disini meliputi kemiskinan, gini ratio serta ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia.

Salah satu metodologi pengukuran kemiskinan yang banyak digunakan adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan *basic needs*, maka dapat dihitung “garis kemiskinan konsumsi” dan selanjutnya dapat dihitung persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada sedikit di atas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas kecukupan konsumsi non-makanan).

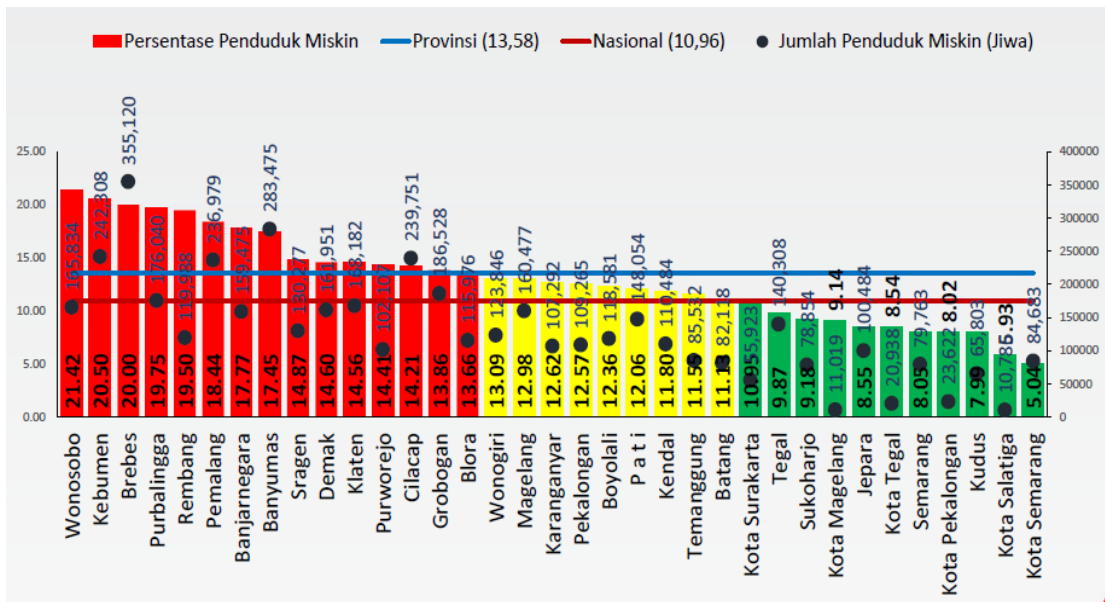


Sumber data: BPS, Indikator Inkesra dan IPM Kab.Purworejo tahun terbitan 2015  
Gambar 2.6 : Data dan Informasi Kemiskinan Kab Purworejo Tahun 2008 – 2014

Prediksi angka kemiskinan untuk tahun 2015 adalah sebesar 13,8%.



Angka kemiskinan berdasar garis kemiskinan Kabupaten Purworejo dibandingkan Kab/kota di Jawa Tengah dan nasional tampak dalam gambar berikut :



Gambar 2.7 : Kemiskinan Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten /Kota Tahun 2014

Ukuran ketimpangan pendapatan berikutnya adalah Gini Rasio. Gini Rasio merupakan koefisien utk menunjukkan derajat ketidakmerataan /ketimpangan secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

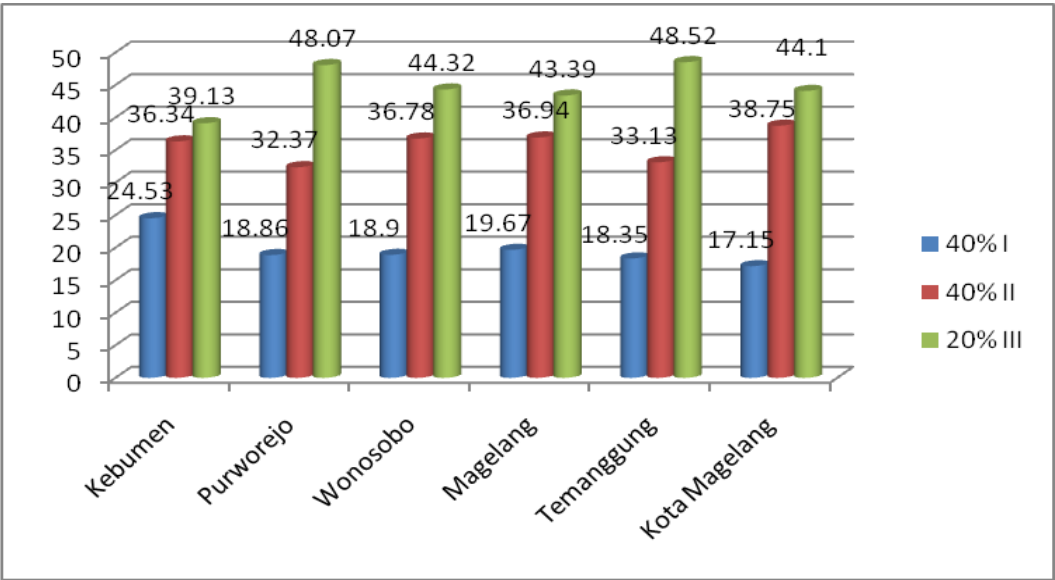
Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Berdasarkan Data Susenas 2013, Gini ratio Kabupaten Purworejo sebesar 0,34 kemudian meningkat menjadi 0,38 pada tahun 2014. Ini menunjukkan ada sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Purworejo. Kondisi yang lebih jelas akan tampak pada hasil ukuran ketimpangan kriteria Bank Dunia. Dimana pada tahun 2014 40% penduduk kelompok I yaitu kelompok berpendapatan terendah, persentase pendapatan yang diperolehnya sedikit menurun.

Ukuran Ketimpangan berikutnya adalah ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, yang ditentukan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan

penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi
- 2) Memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang
- 3) Memperoleh 17 persen atau lebih, maka ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan data susenas 2013 diperoleh, bahwa 40 persen kelompok pertama yaitu kelompok penduduk kurang beruntung memperoleh 21,35 persen dari total pendapatan, sehingga masuk sebagai ketimpangan rendah. Pada tahun 2014 menurun menjadi 18,86 persen, masih termasuk ketimpangan rendah (karena masih diatas 17%). Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Kedu, kondisi tersebut merupakan peringkat keempat setelah Kab.Kebumen, Kab.Magelang dan Kab.Wonosobo, sebagaimana tampak dalam gambar berikut ini:



(Sumber data: BPS, Indikator Kesra dan IPM Tahun Terbitan 2015)

Gambar 2.8 : Ketimpangan Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia di Kab/Kota se eks Karesidenan Kedu Jawa Tengah Tahun 2014

Berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015, penyebaran penduduk sangat miskin dan miskin perkecamatan di Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Tabel 2.17  
Penyebaran dan Persentase Penduduk Sangat Miskin dan Miskin Perkecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015

NO	Kecamatan	Penduduk Sangat miskin dan Miskin	Persentase terhadap jumlah penduduk per kecamatan ( %)
1	Grabag	9.729	22,34
2	Ngombol	5.572	17,72
3	Purwodadi	7.902	21,23
4	Bagelen	6.364	21,70
5	Kaligesing	9.399	31,61
6	Purworejo	12.504	14,76
7	Banyuurip	7.439	18,21
8	Bayan	11.414	24,48
9	Kutoarjo	12.147	20,44
10	Butuh	9.524	24,04
11	Pituruh	12.948	27,76
12	Kemiri	15.996	30,94
13	Bruno	24.240	54,83
14	Gebang	13.244	32,55
15	Loano	10.327	29,27
16	Bener	19.895	40,28
	Jumlah	188.644	26,55

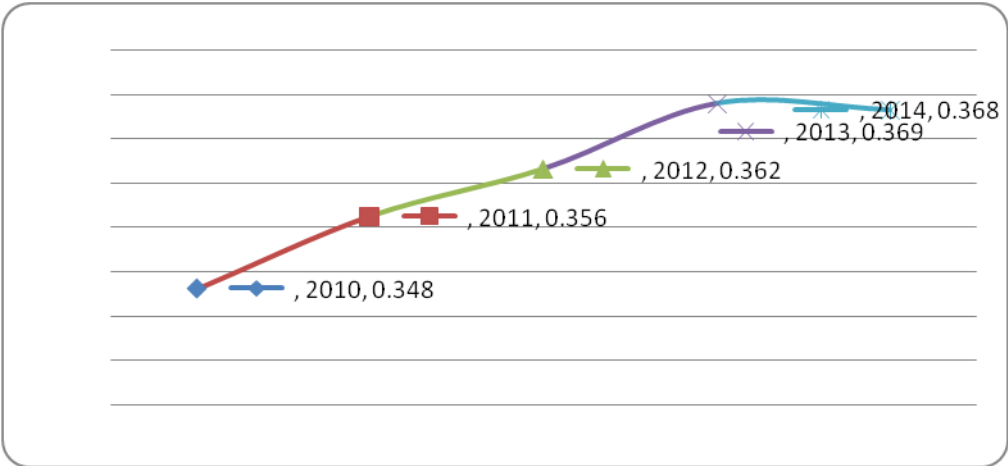
Sumber data : Hasil PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk sangat miskin dan miskin tertinggi berada di Kecamatan Bruno yaitu sebesar 24.240 jiwa dan yang terendah adalah Kecamatan Ngombol sebesar 5.572 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari persentasenya, tertinggi di Kecamatan Bruno sebesar 54,83% dan terendah di Kecamatan Purworejo sebesar 14,76 %. Secara jumlah maupun persentase Kecamatan Bruno menempati rangking tertinggi yang artinya bahwa kecamatan tersebut menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan.

#### 2.4.9 Gambaran pengembangan wilayah

Salah satu tolok ukur dari keberhasilan upaya-upaya pengembangan wilayah adalah dari tingkat ketimpangan antar wilayah yang dapat ditunjukkan dengan besaran Indeks Williamson.

Angka indeks ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah. Perkembangan tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu terakhir ini tampak dalam gambar berikut ini :



Sumber data: BPS, PDRB Kecamatan tahun terbit 2011 s.d 2015 (diolah)

Gambar 2.9 : Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah  
(Indeks Williamson) di Kab.Purworejo  
Tahun 2010 – 2014

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368.

Apabila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah kondisi ini relative lebih baik. Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 0,69. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin merata.

<div>Pendapatan per kapita (Y)</div> <div>Pertumbuhan Ekonomi (r)</div>	Y<	Y>
r<	Maju Dengan Pertumbuhan Cepat (Purworejo, Banyuurip, Kutoarjo)	Berkembang Cepat (Grabag, Bayan)
r>	Maju Tapi Tertekan (Purwodadi)	Kurang Berkembang (Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener)

Sumber data: BPS, PDRB Kecamatan tahun terbit 2015 (diolah)

Gambar 2.10 : Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo

Gambar tersebut diatas menunjukkan tipologi wilayah-wilayah di Kabupaten Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata di tingkat Kabupaten.

Terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Maju dengan pertumbuhan cepat, dimana pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi (didas rata-rata Kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo.
- 2) Berkembang cepat, dimana pendapatan perkapita rendah (dibawah rata-rata Kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya tinggi (didas rata-rata Kabupaten) termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Gebang dan Bayan.
- 3) Maju Tapi Tertekan, dimana pendapatan perkapita tinggi (didas rata-rata Kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi
- 4) Kurang Berkembang, dimana pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten).Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener.

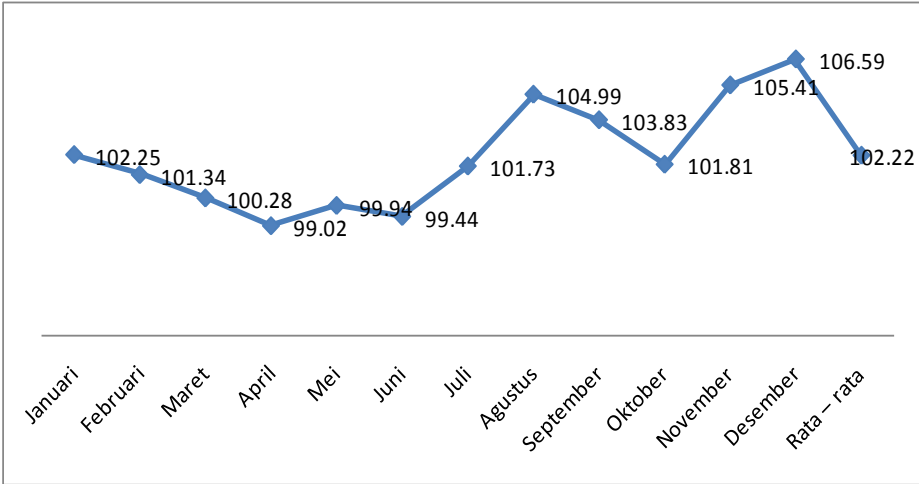
2.4.9 Nilai tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Indikator ini merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani atas barang-barang hasil produksi pertaniannya dengan harga yang dibayar petani atas pengeluaran konsumsi untuk kehidupan sehari-hari petani.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

- 1)  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- 2)  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- 3)  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2015 menunjukkan kondisi diatas 100 pada subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, maupun perikanan. Perkembangannya setiap bulan tampak pada gambar dan tabel berikut ini:



Gambar 2.11 : Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2015

Tabel 2.18  
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2015

Bulan	NTP
Januari	102,25
Februari	101,34
Maret	100,28
April	99,02
Mei	99,94
Juni	99,44
Juli	101,73
Agustus	104,99
September	103,83
Oktober	101,81
November	105,41
Desember	106,59
Rata – rata	102,22

Sumber data: Nilai Tukar Petani, BPS (2015)

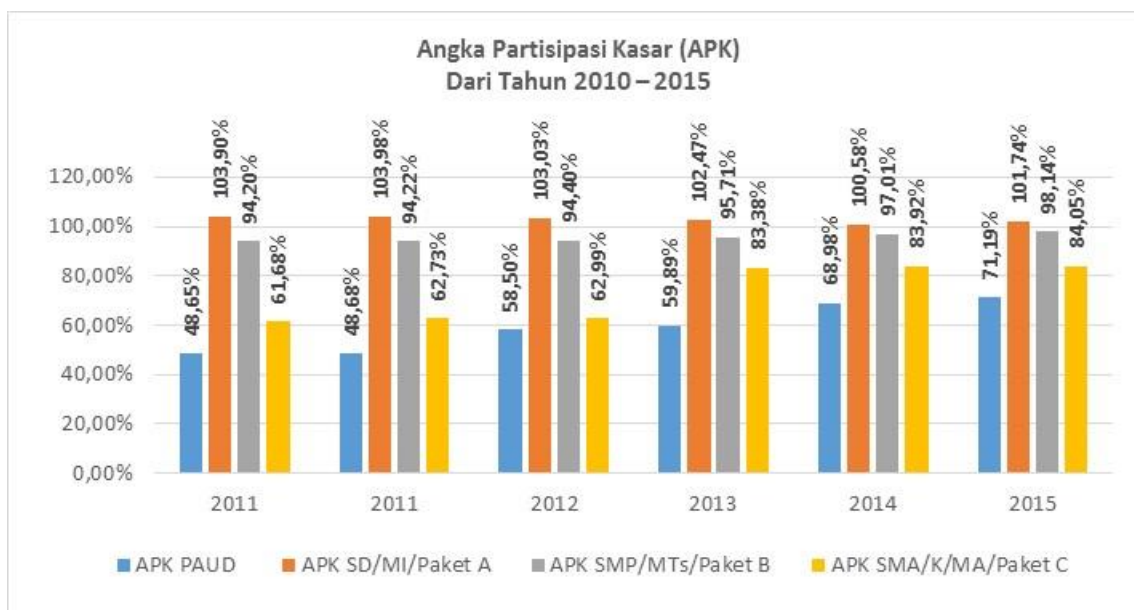
## 2.5. Aspek Pelayanan Umum

### 2.5.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar, merupakan indikator capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah seluruh peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada range jenjang tertentu menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

Tabel 2.19  
Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	a. APK PAUD	48,65%	48,68%	58,50%	59,89%	68,98%	71,19%
	b. APK SD/MI/Paket A	103,90%	103,98%	103,03%	102,47%	100,58%	101,74%
	c. APK SMP/MTs/Paket B	94,20%	94,22%	94,40%	95,71%	97,01%	98,14%
	d. APK SMA/K/MA/Paket C	61,68%	62,73%	62,99%	83,38%	83,92%	84,05%



Gambar 2.12 : Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2010-2015

- 1) Berdasarkan data diatas bahwa angka partisipasi kasar (APK) PAUD tahun 2010 sebesar 48,65% dan tahun 2015 telah tercapai sebesar 71,19%. Hal tersebut menggambarkan peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlunya pendidikan anak usia dini.
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SMI/Paket A tahun 2010 sebesar 103,90% dan tahun 2015 sebesar 101,74%, penurunan tingkat capaian diakibatkan dalam penghitungan jumlah peserta didik telah dilakukan pendataan riil namun untuk penghitungan angka pembagi rasio jumlah penduduk berusia 7 s/d 12 tahun berdasarkan angka statistik yang dilakukan dengan perhitungan yang berdasar pada random sampling data yang bersifat perkiraan
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2010 sebesar 94,20% dan tahun 2015 sebesar 98,14% terjadi peningkatan jumlah anak yang bersekolah dijenjang SMP dan adanya peran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan pendidikan yang memberi peran kontribusi pada program rintisan wajib belajar 12 tahun.
- 4) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2010 sebesar 61,68% dan tahun 2015 sebesar 84,95% atau meningkat sebesar 23,27%. Hal ini dikarenakan tingginya

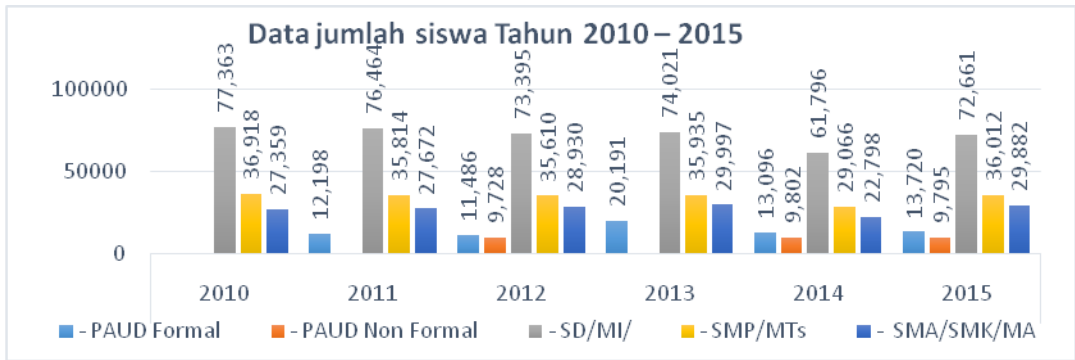


kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C serta adanya peran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan pendidikan yang memberi peran kontribusi pada program rintisan wajib belajar 12 tahun

Tabel 2.20  
Data jumlah siswa Tahun 2010 – 2015

Jenjang Sekolah	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
- PAUD Formal	Orang		12.198	11.486	20.191	13.096	13.720
- PAUD Non Formal				9.728		9.802	9.795
- SD/MI/	Orang	77.363	76.464	73.395	74.021	61.796	72.661
- SMP/MTs	Orang	36.918	35.814	35.610	35.935	29.066	36.012
- SMA/SMK/MA	Orang	27.359	27.672	28.930	29.997	22.798	29.882

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015



Gambar 2.13 : Data jumlah siswa tahun 2010-2015

Tabel 2.21  
Angka Partisipasi Murni  
Dari Tahun 2010 – 2015

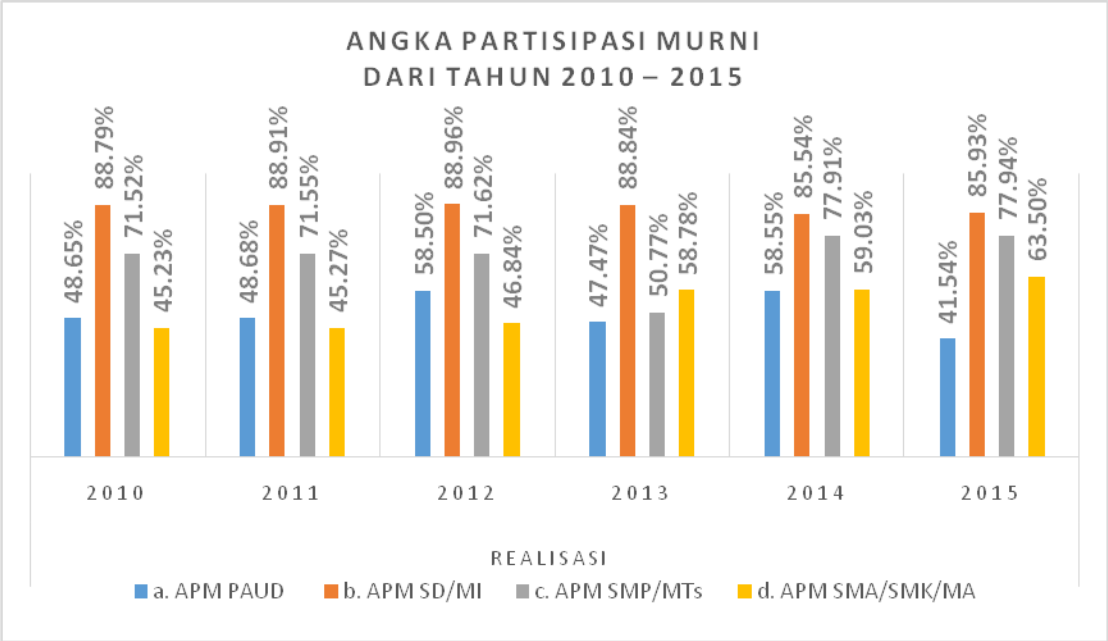
No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Angka Partisipasi Murni (APM)						
	a. APM PAUD	48,65%	48,68%	58,50%	47,47%	58,55%	41,54%
	b. APM SD/MI	88,79%	88,91%	88,96%	88,84%	85,54%	85,93%
	c. APM SMP/MTs	71,52%	71,55%	71,62%	50,77%	77,91%	77,94%
	d. APM SMA/SMK/MA	45,23%	45,27%	46,84%	58,78%	59,03%	63,50%

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Angka Partisipasi Murni, menunjukkan capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah peserta didik pada range usia dan jenjang tertentu atas jumlah penduduk

pada range jenjang tertentu menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan data diatas bahwa angka partisipasi Murni (APM) PAUD tahun 2010 sebesar 48,65% dan tahun 2015 capaian turun menjadi 41,54% hal terjadi karena terjadi peningkatan jumlah peserta didik jenjang SD merupakan keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2010 tercapai 88,79% dan tahun 2015 sebedar 85,93%, penurunan tingkat capaian diakibatkan :
  - a) Terjadinya pergeseran dalam jumlah yang signifikan range umur peserta didik pda saat ini untuk jenjang sekolah dasar telah berubah dari range usia 7 sampai 12 tahun saat ini usia peserta didik jenjang yang sama adalah 6 sampai dengan 11 tahun sehingga peserta didik usia 12 tahun saat ini telah berada pada jenjang sekolah menengah pertama dan peserta didik usia 6 tahun yang ada saat ini tidak terhitung dalam capaian tersebut
  - b) Dalam penghitungan jumlah peserta didik telah dilakukan pendataan riil namun untuk penghitungan angka pembagi rasio jumlah penduduk berusia 7-12 tahun berdasarkan angka statistik yang dilakukan dengan perhitungan yang berdasar pada random sampling data yang bersifat perkiraan
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2010 71,52% dan tahun 2015 sebesar 77,94% terjadi peningkatan jumlah peserta didik jenjang SMP merupakan keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- 4) Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2011 sebesar 45,27% dan tahun 2015 dapat tercapai 63,50% atau meningkat signifikan sebesar 18,23%. Hal ini dapat diwujudkan karena adanya upaya keras penguatan program Pendidikan menengah dalam perluasan daya tampung/aksesibilitas pelayanan pendidikan dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang memberi peran kontribusi pada program rintisan wajib belajar 12 tahun.

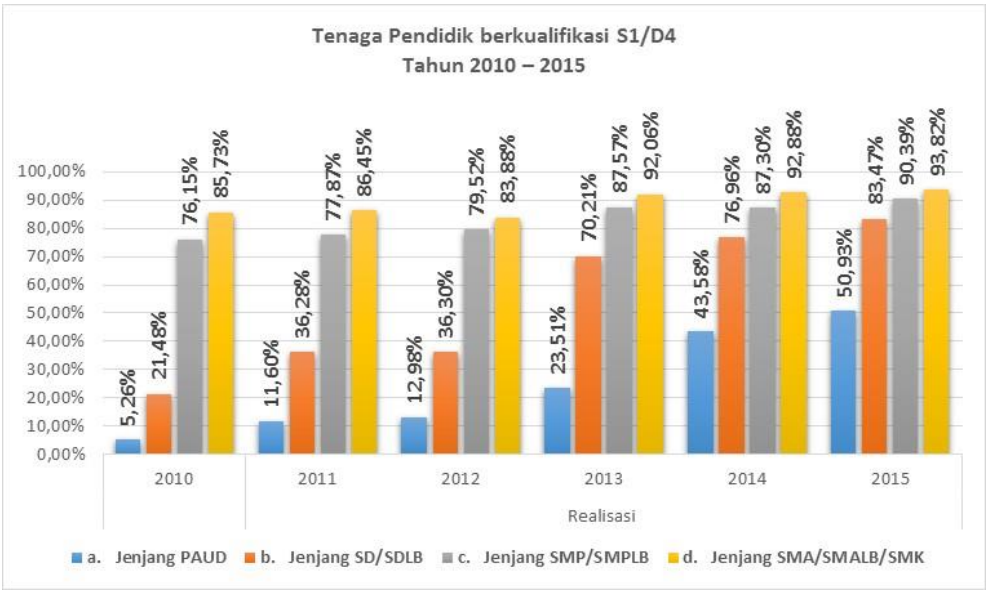


Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015  
Gambar 2.14 : Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan

Tabel 2.22  
Tenaga Pendidik berkualifikasi S1/D4  
Tahun 2010 – 2015

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Rasio layanan Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D4						
	a. Jenjang PAUD	5,26%	11,60%	12,98%	23,51%	43,58%	50,93%
	b. Jenjang SD/SDLB	21,48%	36,28%	36,30%	70,21%	76,96%	83,47%
	c. Jenjang SMP/SMPLB	76,15%	77,87%	79,52%	87,57%	87,30%	90,39%
	d. Jenjang SMA/SMALB/SMK	85,73%	86,45%	83,88%	92,06%	92,88%	93,82%

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015



Gambar 2.15 : Tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 Tahun 2010-2015

Ketersediaan Tenaga Pendidik berkualifikasi S1/D4 menunjukkan ketersediaan tenaga pendidik yang telah sesuai ketentuan perundangan yang dihitung dengan memperbandingkan Jumlah tenaga pendidik sesuai jenjang tertentu yang telah memiliki standar kealifikasi S1 atau D4 atas jumlah seluruh tenaga pendidik yang ada pada jenjang tertentu yang menghasilkan rasio keteresediaan sebagai berikut :

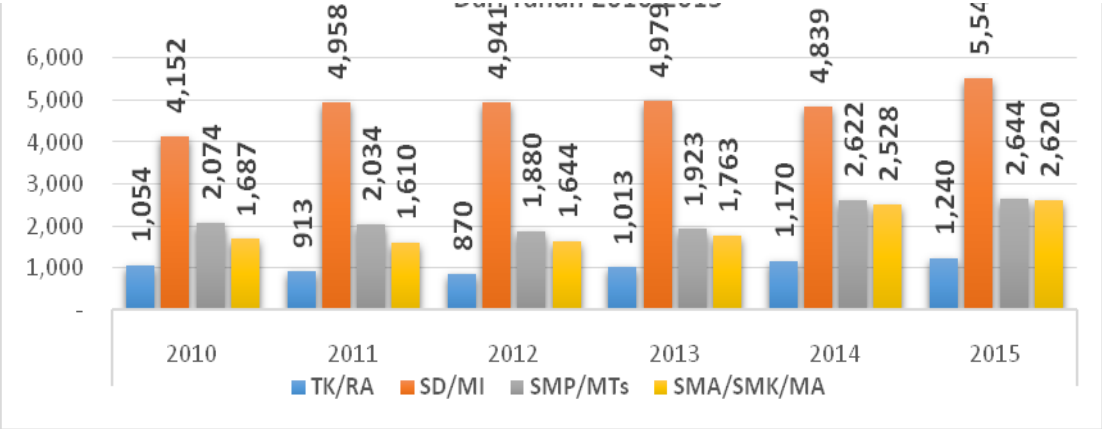
- 1) Ketersediaan Tenaga Pendidik berkualifikasi S1/D4 pada jenjang PAUD tahun 2010 baru tersedia 5,26% dan tahun 2015 tercatat telah 50,93% pendidik yang telah sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Hal ini merupakan hasil upaya pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan secara optimal semua sumber pendanaan yang tersedia.
- 2) Pada jenjang SD/SDLB ketersediaan Pendidik berkualifikasi S1/D4 pada akhir 2015 telah 83,47% pendidik yang sesuai dengan kualifikasinya dari capaian pada 2010 yang baru 21,48% yang berkualifikasi S1/D4.
- 3) Pada jenjang SMP/ SMPLB ketersediaan Pendidik Berkualifikasi S1/D4 meningkat sebanyak 14,24% dari

- awal tahun 2010 menjadi 90,39% pendidik berkuaifikasi S1/D4 pada tahun 2015. Adanya persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi yaitu kualifikasi tenaga pendidik minimal S1/D4 dan peran pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidik dengan memberikan subsidi/ beasiswa bagi tenaga pendidik. Peningkatan tersebut juga disertai dengan kesadaran tenaga pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
- 4) Ketersediaan Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D4 jenjang SMA/SMALB/SMK pada awal tahun 2010 sudah menunjukkan angka yang cukup baik dan semakin meningkat hingga pada tahun 2015 mencapai 93,82%. Hal ini menunjukkan bahwa Tenaga Pendidik jenjang SMA/SMALB/SMK pada umumnya sudah memenuhi kualifikasi jenjang S1/D4 serta tidak luput juga dari peran pemerintah yang terus mengupayakan peningkatan mutu pendidik demi meningkatnya kualitas pendidikan.

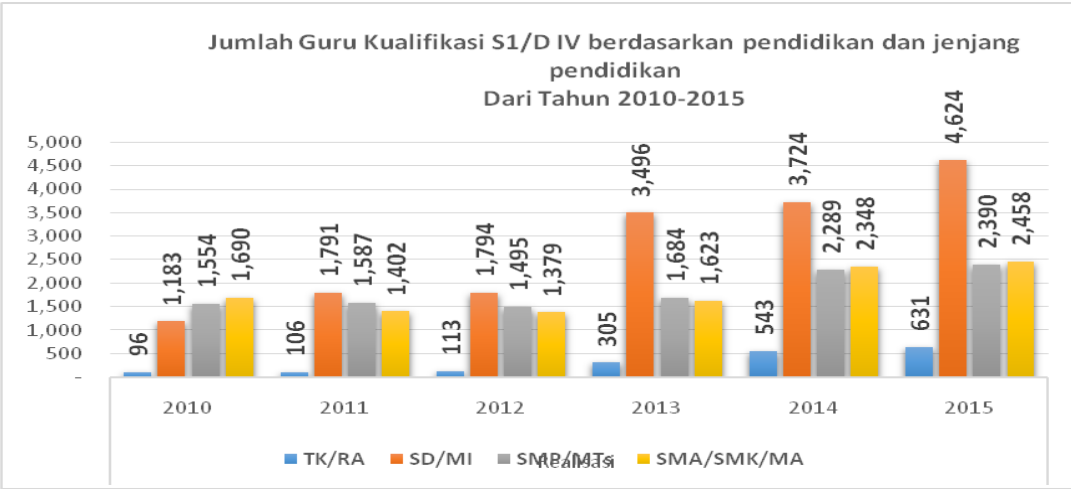
Tabel 2.23  
 Data Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan  
 Dan Jenjang Pendidikan  
 Tahun 2010-2015

Uraian	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Jumlah Guru</b>							
TK/RA	Orang	1.054	913	870	1.013	1.170	1.240
SD/MI	Orang	4.152	4.958	4.941	4.979	4.839	5.540
SMP/MTs	Orang	2.074	2.034	1.880	1.923	2.622	2.644
SMA/SMK/MA	Orang	1.687	1.610	1.644	1.763	2.528	2.620
<b>Jumlah Guru Kualifikasi S1/D IV</b>							
TK/RA	Orang	96	106	113	305	543	631
SD/MI	Orang	1.183	1.791	1.794	3.496	3.724	4.624
SMP/MTs	Orang	1.554	1.587	1.495	1.684	2.289	2.390
SMA/SMK/MA	Orang	1.690	1.402	1.379	1.623	2.348	2.458
<b>Guru yang lolos sertifikasi</b>							
TK/RA	Orang	24	85	178	281	469	647
SD/MI	Orang	1.067	1.626	2.609	2.856	2.247	3.106
SMP/MTs	Orang	390	553	1.297	1.318	1.416	1.694
SMA/SMK/MA	Orang	161	379	1.034	1.075	1.947	2.161

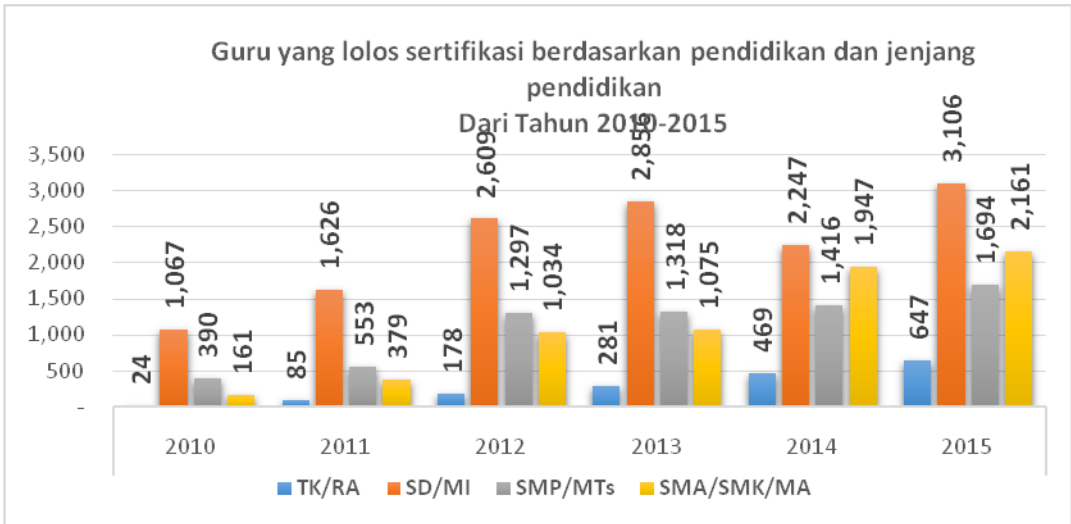
Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015



Gambar 2.16 : Jumlah guru berdasarkan pendidikan dan jenjang pendidikan dari tahun 2010 – 2015



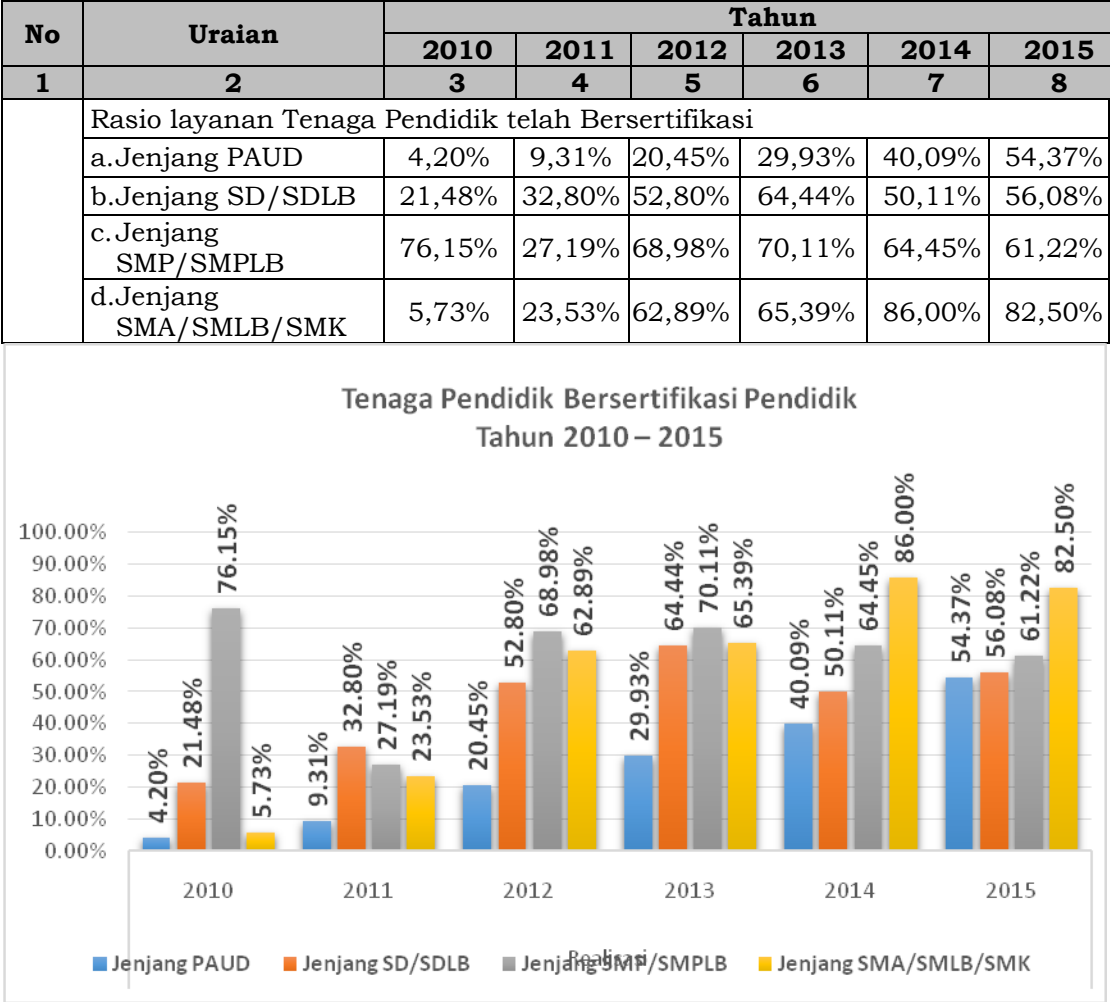
Gambar 2.17 : Jumlah guru dan kualifikasi S1/D4 berdasarkan pendidikan dan jenjang pendidikan dari tahun 2010-2015



Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Gambar 2.18 : Guru yang lolos sertifikasi berdasarkan pendidikan dan jenjang pendidikan dari tahun 2010-2015

Tabel 2.24  
 Tenaga Pendidik Bersertifikasi Pendidik  
 Tahun 2010 – 2015



Gambar 2.19 : Tenaga Pendidik Bersertifikasi Pendidik tahun 2010-2015

Ketersediaan Tenaga Pendidik Bersertifikasi didasarkan perbandingan jumlah tenaga pendidik bersertifikasi pada jenjang tertentu atas total jumlah tenaga pendidik keseluruhan pada jenjang tertentu yang menghasilkan perbandingan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Tenaga Pendidik telah Bersertifikasi jenjang PAUD tahun 2010 sebesar 4,20% dan tahun 2015 sebesar 54,37% meningkat sebesar 50,17%, hal ini menggambarkan makin banyak tenaga pendidik yang bersertifikasi.
2. Pada jenjang SD/SDLB Ketersediaan Tenaga Pendidik telah Bersertifikasi tahun 2010 sebesar 21,48% dan tahun 2015 sebesar 56,08% meningkat sebesar 34,6%, hal ini menggambarkan makin banyak tenaga pendidik /SDLB yang bersertifikasi.
3. Ketersediaan Tenaga Pendidik telah Bersertifikasi jenjang SMP/SMPLB tahun 2010 sebesar 76,15% dan tahun 2015 sebesar 61,22% penurunan sebesar 12,08%, merupakan gambaran masih



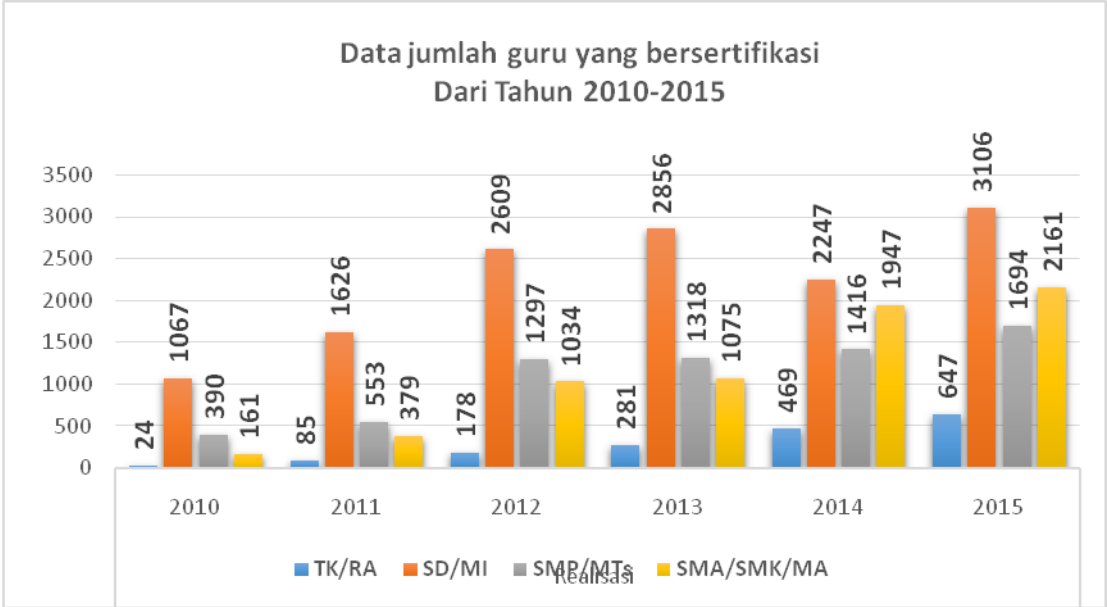
sedikitnya ketersediaan tenaga pendidik jenjang SMP/SMPLB yang bersertifikat yang diharapkan untuk pelayanan kepada peserta didik jenjang SMP/SMPLB.

4. Ketersediaan Tenaga Pendidik telah Bersertifikasi jenjang SMA/SMALB/SMK tahun 2010 sebesar 5,73% dan tahun 2015 sebesar 82,50% meningkat sebesar 76,77%, hal ini menggambarkan makin banyak tenaga pendidik yang bersertifikasi

Tabel 2.25  
Data jumlah guru yang bersertifikasi  
Dari Tahun 2010-2015

Uraian	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Guru yang lolos sertifikasi							
TK/RA	Orang	24	85	178	281	469	647
SD/MI	Orang	1.067	1.626	2.609	2.856	2.247	3.106
SMP/MTs	Orang	390	553	1.297	1.318	1.416	1.694
SMA/SMK/MA	Orang	161	379	1.034	1.075	1.947	2.161

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015



Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Gambar 2.20 : Data jumlah guru yang bersertifikasi dari tahun 2010-2015

Semua sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sudah melaksanakan kurikulum nasional dan lokal telah terlaksana 100% sejak tahun 2010.



Tabel 2.26  
Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal  
Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.27  
Angka Putus Sekolah  
Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	2010	Realisasi				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angka putus sekolah						
	a. Jenjang SD/SDLB	0,05%	0,07%	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%
	b. Jenjang SMP/SMPLB	0,09%	0,08%	0,05%	0,23%	0,07%	0,06%

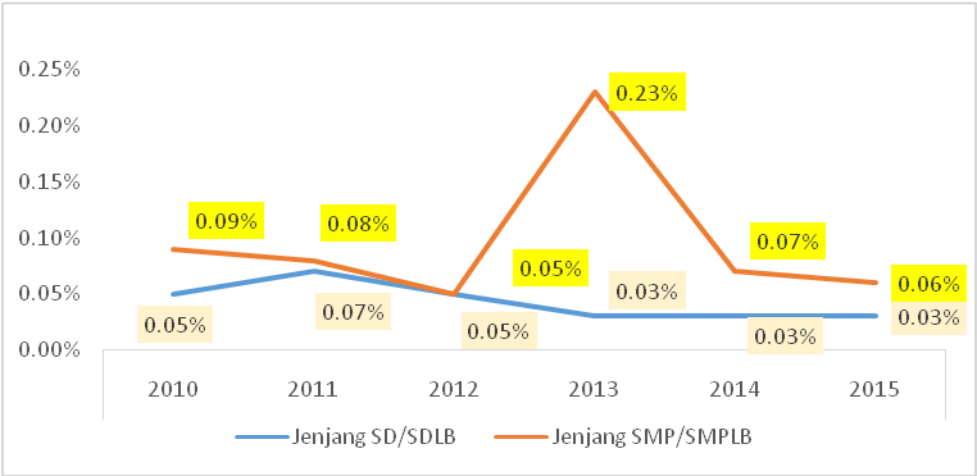
Angka putus sekolah jenjang SD/SDLB tahun 2010 sebesar 0,05% dan tahun 2015 sebesar 0,03% terjadi penurunan anak putus sekolah sebesar 0,02%. Hal ini merupakan keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung keberlangsungan anak bersekolah.

Angka putus sekolah jenjang SMP/SMPLB tahun 2010 sebesar 0,09% dan tahun 2015 sebesar 0,06% terjadi penurunan anak putus sekolah sebesar 0,03%. Hal ini merupakan keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung keberlangsungan anak bersekolah.

Tabel 2.28  
Jumlah anak putus sekolah sampai dengan tahun 2015

No	Uraian	2010	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Jenjang SD/SDLB	-	-	31	21	21	25
	b. Jenjang SMP/SMPLB	-	-	60	81	26	23

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015



Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015  
Gambar 2.21 : Angka putus sekolah

Tabel 2.29  
Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA  
Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA						
	a. Jenjang SD/SDLB	99,23%	99,48%	99,47%	98,83%	99,54%	100%
	b. Jenjang SMP/SMPLB	95,21%	96,00%	98,13%	91,34%	95,56%	100%
	c. Jenjang SMA/SMALB/SMK	97,29%	98,00%	99,47%	99,88%	94,04%	100%

Persentase kelulusan SD/SLB, tahun 2010 sebesar 99,23% dan tahun 2015 sebesar 100,00% mengalami peningkatan sebesar 0,77%. Hal ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang SD/SDLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana SD/SDLB, perpustakaan, alat peraga, buku untuk siswa.

Persentase kelulusan SMP/SMPLB, tahun 2010 sebesar 95,21% dan tahun 2015 sebesar 100% mengalami peningkatan sebesar 0,79%. Hal ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang SMP/SMPLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana SMP/SMPLB, perpustakaan, alat peraga, laboratorium, alat-alat laboratorium, dan buku untuk siswa.

Persentase kelulusan SMA/SMALB/SMK, tahun 2010 sebesar 97,29% dan tahun 2015 sebesar 100% mengalami peningkatan sebesar 2,71%. Hal ini disebabkan karena keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang SMA/SMALB/SMK, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana SMA/SMALB/SMK, perpustakaan, alat peraga, laboratorium, alat laboratorium, alat praktek, dan buku untuk siswa.

Tabel 2.30  
Angka melanjutkan Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angka Melanjutkan						
	a. Jenjang SD/SDLB	98,21%	99,00%	98,33%	99,47%	100,00%	100,00%
	b. Jenjang SMP/SMPLB	90,59%	91,00%	91,06%	94,23%	100,00%	100,00%

Angka melanjutkan jejang SD/SDLB tahun 2010 sebesar 98,21% dan tahun 2015 sebesar 100,00% mengalami peningkatan sebesar 1,79%. Hal ini merupakan keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung keberlangsungan anak bersekolah.

Angka melanjutkan jejang SMP/SMPLB tahun 2010 sebesar 90,59% dan tahun 2015 sebesar 100,00% mengalami peningkatan sebesar 9,41%. Hal ini merupakan keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung keberlangsungan anak bersekolah.

Tabel 2.31  
Rasio Guru Dengan Siswa Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rasio guru dengan siswa						
	a. Jenjang SD/SDLB	1:22	1:17	1:15	1:13	1 : 15	1 : 13
	b. Jenjang SMP/SMPLB	1:18	1:18	1:19	1:12	1 : 14	1 : 14
	c. Jenjang SMA/SMLB/SMK	1:15	1:18	1:18	1:11	1 : 12	1 : 11

Rasio guru dengan siswa jejang SD/SDLB tahun 2010 sebesar 1:22 dan tahun 2015 sebesar 1:13, sehingga telah tercukupi kebutuhan gurunya.

Rasio guru dengan siswa jejang SMP/SMPLB tahun 2010 sebesar 1:18 dan tahun 2015 sebesar 1:14 sehingga telah tercukupi kebutuhan gurunya.

Rasio guru dengan siswa jejang SMA/SMALB/SMK tahun 2010 sebesar 1:15 dan tahun 2015 sebesar 1:11 sehingga telah tercukupi kebutuhan gurunya.

Tabel 2.32  
Data jumlah guru dan siswa tahun 2010-2015

Uraian	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Jumlah Guru</b>							
-TK/RA	Orang	1054	913	870	1013	543	1.240
- SD/MI	Orang	4.152	4.958	4.941	4.979	5.401	5.540
- SMP/MT's	Orang	2.074	2.034	1.880	1.923	2.607	2.644
- SMA/SMK/MA	Orang	1.687	1.610	1.644	1.763	2.348	2.620
<b>Jumlah Siswa</b>							
- PAUD Formal	Orang	-	-	11.486	20.191	13.096	13.720
- PAUD Non Formal	Orang	-	-	9.728	-	9.802	4.434
- SD/SDLB	Orang	77.363	76.464	75.395	74.021	61.796	72.661
- SMP/SMPLB	Orang	36.918	35.814	35.610	35.935	29.066	36.012
- SMA/SMK/SMALB	Orang	27.359	27.672	28.930	29.997	22.798	29.882
- PAKET A	Orang	68	93	95	63	113	23
- PAKET B	Orang	868	405	402	382	425	261
- PAKET C	Orang	442	727	412	373	913	904

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Tabel 2.33  
Peningkatan sarana prasarana pendidikan  
Tahun 2010–2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan sarana prasarana pendidikan						
	a. Ruang Kelas SD/SDLB Baik	69,73%	81,25%	66,88%	74,12%	74,57%	72,23%
	b. Ruang Kelas SMP/SMPLB Baik	73,60%	79,85%	85,22%	87,05%	83,84%	83,83%
	c. Ruang Kelas SMA/SMALB/SMK Baik	95,10%	80,96%	88,40%	89,95%	86,76%	87,01%
	d. Ketersediaan Ruang Perpustakaan SD *)	23,12%	30,02%	26,40%	57,96%	74,38%	75,22%
	e. Ketersediaan Laboratorium IPA Lengkap SMP *)	73,68%	75,79%	78,76%	40,29%	82,80%	97,17%

Tabel 2.34  
Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Uraian	Satuan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pembangunan Ruang Kelas Baru							
Ruang kelas SD/MI	Unit	0	0	11	0	14	12
Ruang kelas SMP/MTs	Unit	0	19	5	5	4	5
Ruang kelas SMA/SMK/MA	Unit	0	41	37	4	7	5
Jumlah	Unit	0	0	53	9	25	22
Ruang kelas SD/MI							
Kondisi Baik	Unit	2839	2.306	2.369	2.605	2.698	2.593
Rusak Sedang	Unit	422	611	406	615	694	715
Rusak Berat	Unit	233	418	767	337	206	282
Jumlah	Unit	3.494	3.335	3.542	3.557	3.598	3.590
Ruang kelas SMP/MTs							
Kondisi Baik	Unit	902	852	894	880	877	1.032
Rusak Sedang	Unit	85	151	101	111	137	142
Rusak Berat	Unit	34	64	54	51	24	57
Jumlah	Unit	1.022	3.494	1.049	1.042	1.038	1231
Ruang kelas SMA/SMK/MA							
Kondisi Baik	Unit	652	638	709	745	760	837
Rusak Sedang	Unit	79	136	80	70	90	112
Rusak Berat	Unit	10	14	13	16	11	14
Jumlah	Unit	741	788	802	831	861	963
Sekolah memiliki perpustakaan							
SD/MI	Sekolah	47	123	150	332	400	425
SMP/MTs	Sekolah	82	82	82	73	77	76
SMA/SMK/MA	Sekolah	53	54	55	55	59	61
Sekolah yang memiliki laboratorium Bahasa/IPA/IPS/ruang praktek							
SMP/MTs	Sekolah	84	84	89	55	96	103
SMA/SMK/MA	Sekolah	99	100	101	132	185	185

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Peningkatan sarana prasarana pendidikan Ruang Kelas SD/SDLB Baik tahun 2010 sebesar 69,73% dan tahun 2015 sebesar 72,23% mengalami kenaikan sebesar 2,50%. Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam rangka peningkatan layanan di bidang pendidikan.

Peningkatan sarana prasarana pendidikan Ruang Kelas SMP/SMPLB Baik tahun 2010 sebesar 73,60% dan tahun 2015 sebesar 83,83% mengalami kenaikan sebesar 10,23%. Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam rangka peningkatan layanan di bidang pendidikan.

Peningkatan sarana prasarana pendidikan Ruang Kelas SMA/SMALB/SMK Baik tahun 2010 sebesar 95,10% dan tahun 2015 sebesar 87,01% mengalami penurunan sebesar 8,09%. Hal ini menggambarkan perlu penanganan prioritas oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun

daerah dalam rangka peningkatan layanan di bidang pendidikan.

Ketersediaan Ruang Perpustakaan SD tahun 2010 sebesar 23,12% dan tahun 2015 sebesar 75,22% mengalami kenaikan sebesar 52,10%.Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam rangka peningkatan layanan di bidang pendidikan.

Ketersediaan Laboratorium IPA Lengkap SMP tahun 2010 sebesar 73,68% dan tahun 2015 sebesar 97,17% mengalami kenaikan sebesar 23,49%. Hal ini menggambarkan keseriusan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam rangka peningkatan layanan di bidang pendidikan.

Tabel 2.35  
Satuan Pendidikan Telah Terakreditasi  
Tahun 2010–2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	a. Jenjang SD/SDLB	100%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	98,41%
	b. Jenjang SMP/SMPLB	100%	100,00%	100,00%	100,00%	94,00%	97,17 %
	c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,28%

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Satuan Pendidikan telah terakreditasi jenjang SD/SDLB tahun 2010 sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 98,41%, mengalami penurunan sebesar 1,59%.

Satuan Pendidikan telah terakreditasi jenjang SMP/SMPLB tahun 2010 sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 97,17%, mengalami penurunan sebesar 2,83%, hal ini karena adanya penambahan sekolah baru, dimana sekolah baru belum dapat melakukan akreditasi sebelum 3 tahun sejak pendiriannya, sehingga terjadi penurunan satuan pendidikan yang terakreditasi.

Tabel 2.36  
Satuan Pendidikan telah terakreditasi minimal B  
Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Satuan Pendidikan telah terakreditasi minimal B						
	a. Jenjang SD/SDLB	91,91%	93,00%	98,87%	98,87%	98,45%	96,94%
	b. Jenjang SMP/SMPLB	74,75%	75,76%	96,96%	96,96%	88,51%	90,29%
	c. Jenjang SMA/SMALB	1,67%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87,72%

Satuan Pendidikan telah terakreditasi minimal B Jenjang SD/SDLB tahun 2010 sebesar 91,91% dan tahun 2015 sebesar 96,94% mengalami kenaikan sebesar 5,03%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian sekolah dengan tingkat terakreditasi tingkat B telah semakin meningkat dari seluruh sekolah yang terakreditasi.

Satuan Pendidikan telah terakreditasi minimal B Jenjang SMP/SMPLB tahun 2010 sebesar 74,75% dan tahun 2015 sebesar 90,29% mengalami kenaikan sebesar 15,54%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian sekolah dengan tingkat terakreditasi tingkat B telah semakin meningkat dari seluruh sekolah yang terakreditasi.

Satuan Pendidikan telah terakreditasi minimal B Jenjang SMA/SMALB tahun 2010 sebesar 1,67% dan tahun 2015 sebesar 87,72% mengalami kenaikan sebesar 86,05%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian sekolah dengan tingkat terakreditasi tingkat B telah semakin meningkat dari seluruh sekolah yang terakreditasi.

Tabel 2.37  
Persentase SMK telah memiliki standar ISO 9001:2008  
Tahun 2010–2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	SMK telah memiliki standar ISO 9001:2008	11,11%	16,67%	16,66%	31,71%	36,59%	54,76%

SMK telah memiliki standar ISO 9001:2008 tahun 2010 sebesar 11,11% dan tahun 2015 sebesar 54,76% mengalami kenaikan sebesar 43,65%. Hal ini menunjukkan semakin banyak SMK di Kabupaten Purworejo yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan pelaksanaan kurikulum yang telah memenuhi standar ISO 9001:2008

Tabel 2.38  
Daftar SMK telah memiliki standar ISO 9001:2008

No	Nama Sekolah	Tahun Perolehan
1	SMKN 1 Purworejo	2010
2	SMKN 2 Purworejo	2012
3	SMKN TKM Purworejo	2013

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Tabel 2.39  
Regulasi tentang biaya pendidikanTahun 2010–2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Regulasi tentang biaya pendidikan	1	5	7	9	9	9

Sumber Data: Dinas Dindikbudpora Tahun 2015

Regulasi tentang biaya pendidikan tahun 2010 sebesar 1 dan tahun 2015 sebesar 9 mengalami kenaikan sebesar 8. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya regulasi tentang pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Purworejo sesuai dengan regulasi dari pusat.

Ketersediaan sekolah untuk melayani penduduk usia sekolah khususnya pada pendidikan dasar dapat ditunjukkan dengan angka rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar yaitu (SD dan SMP). Pada tahun 2011 sejumlah 689 sekolah melayani 114.031 siswa, artinya tiap sekolah rata-rata melayani 165 siswa. Kemudian sampai dengan tahun 2015 menjadi 1 sekolah rata-rata melayani 161 penduduka usia sekolah. Penurunan tersebut diantaranya karena adanya regrouping serta kecenderungan penurunan jumlah penduduk usia sekolah sejak tahun 2013. Dengan penurunan tersebut justru dapat makin meningkatkan kualitas proses belajar mengajar karena pelayanan pada tiap-tiap dapat makin optimal. Data yang menunjukkan kondisi tersebut tampak dalam tabel berikut :

Tabel. 2.40  
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Dasar)

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah sekolah (SD/MI/SMP/MTs)		689	671	717	674	671
	Jumlah penduduk usia 7-12 & 13-15		114,031	117,616	117,375	109,550	108,112
	Rasio Ketersediaan		0,60	0,57	0,61	0,62	0,62
			1 / 165.5	1/ 175.3	1 / 163.7	1 / 162.5	1 / 161.12

Sumber data: Dindikbudpora (2015)



### 2.5.2 Kesehatan

Data Capaian Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.32 berikut :

Tabel 2.41  
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan  
Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)</li> <li>Jumlah Kasus Kematian Ibu</li> </ul>	109,17	100,30	202	72,80	53,73	73,36
2.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	12.67	15,60	14,95	11,54	13,00	12,16
3.	Prevalensi gizi buruk	0,16%	0,11%	0,10%	0,13%	0,10%	0,097%
4.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	94%	90,00%	90,40%	87,90%	87,40%	88,70%
5.	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	93,00%	97,60%	98,00%	96,00%	98,60%
6.	Cakupan pelayanan nifas	96%	92,70%	96,20%	97,00%	97,00%	97,30%
7.	Cakupan kunjungan bayi	92%	90,5%	98,20%	97,20%	96,00%	98,30%
8.	Cakupan pelayanan anak balita	37%	77,00%	90,90%	92,00%	83,00%	76,50%
9.	Cakupan peserta KB aktif	80 %	81,30%	81,25%	83,70%	84,00%	84,60%
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	88 %	92,10%	132,20 %	119%	100%	100%
11	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	45%	89,40%	86,10%	73,00%	69,00%	69,80%
12	Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat	95 %	76,00%	55,00%	99,00%	100%	100%
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit :						
	a. Acut Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia< 15 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.Pneumonia Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. TB BTA positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.Penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memerangi HIV/AIDS dan penyaki tmenular lainnya ( MDG"s)</li> <li>Penemuan Penyakit HIV</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Usia Harapan Hidup (tahun)	70,01 th	70,01	70,78	72,10	71 th	72 th
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	50%	60,70%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi< 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	95,70%	100%	100%	100%	100%
19	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakatmiskin (Peserta Askeskin)	238.603 peserta	75,00%	66,00%	100%	100%	100%
20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	97,74%	100%	100%	100%	100%
21	Cakupan Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	-	-	-	-	-	19% *
22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6 - 24 bulan bagi keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yangb harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani	75%	81%	87%	91%	96%	98.71%
25	Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani	75%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota	60%	100%	100%	100%	100%	80,00%
27	Pencapaian RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo terakreditasi menjadi RSUD Tipe B Pendidikan	60%	0 %	0 %	0 %	100 %	100%

\* berlangsung mulai Tahun 2015

Berdasarkan data diatas yang perlu memperoleh penanganan lebih serius pada cakupan kunjungan Ibu hamil K4, dan cakupan Neonates dengan komplikasi yang ditangani.

Adapun data Sarana Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator bidang kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.42  
Rasio Layanan Sarana dan Tenaga Kesehatan  
Kabupaten Purworejo tahun 2015

No	Sarana Dan Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio Layanan
	SARANA KESEHATAN		
1	Puskesmas	27	0,027 Per 1000 penduduk
2	Poliklinik	9	0,009 Per 1000 penduduk
3	Pustu	64	0,064 Per 1000 penduduk
4	Poskesdes	256	0,256 Per 1000 penduduk
5	Posyandu	1655	16,55 per 100 balita
6	Rumah Sakit	7	0,0007 Per 10.000 penduduk
	TENAGA KESEHATAN		
1	Dokter	140	0,056 Per 2500 penduduk
2	Tenaga Medis	1002	0,4008 Per 2500 penduduk

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Adapun kinerja pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada tingkat pelayanan rujukan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43  
Jumlah Pasien Dan Rujukan Pada Pelayanan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Dari Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani					
	Jumlah Pasien	104.646	117.321	124.436	141.380	158.322
	Rujukan	35	418	1.032	2.530	2.049
2	Pelayanan pasien rawat inap yang tertangani					
	Jumlah pasien	16.989	18.566	20.043	20.114	19.994
	Rujukan	271	282	239	177	217

Sumber Data: RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo Tahun 2015

Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota

Pelayanan pasien mengalami kenaikan yang signifikan. Pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani pada tahun 2010 sejumlah 104.646 pasien dan pada tahun 2015 menjadi 158.322 pasien. Pelayanan pasien rawat inap yang tertangani pada tahun 2010 sejumlah 16.989 dan tahun 2015 menjadi 19.994 pasien. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah fasilitas tempat tidur untuk pasien rawat inap.

### 2.5.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum termasuk didalam urusan wajib pelayanan dasar. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.44  
Data Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Purworejo Dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase jalan dengan kualitas baik	55,00%	59,92%	63,44%	68,49%	72,83%	76,55%
2	Persentase jembatan dengan kondisi baik	67,00%	69,20%	96,10%	96,77%	91,65%	92,12%
4	Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%)	50,00%	40,80%	63,00%	79,07%	75,47%	77,638%
5	Persentase cakupan layanan air limbah	40,00%	92,00%	60,42%	91,89%	89,13%	91,38%
6	Persentase cakupan layanan persampahan	40,00%	47,06%	91,42%	60,42%	100,00%	100%
7	Persentase sampah yang tertangani		45,80%	57,80%	61,51%	65,00%	79,40%
8	Persentase TPA yang memenuhi kriteria di operasionalkan secara layak		25%	25%	30%	35%	40%
9	Pengurangan luas genangan( > 30 cm, > 2 jam )	20,00%	25,21%	24,00%	51,61%	16,72%	17,26%
10	Rasio layanan Irigasi/ daerah irigasi tercukupi	44,40%	75,04%	51,11%	57,01%	64,36%	72,03%
11	Tingkat Pengelolaan dan konservasi SDA (3 DAS)	25%	20,74%	25,23%	25,35%	28%	32,93%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Kondisi infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Purworejo di tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan capaian kinerja yang meningkat.

Adapun mengenai data panjang jalan pada tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.45  
Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo  
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kondisi Baik-Sedang ( km )	450,19	472,65	511,90	544,11	572,14
2	Jalan Kondisi Rusak ( Km )	191,32	160,12	135,87	114,74	100,09
3	Jalan Kondisi Rusak Berat ( Km )	109,88	114,56	100,56	88,48	75,10
JUMLAH		751,39	747,33	747,33	747,33	747,33

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Adapun kondisi fisik jembatan di Kabupaten Purworejo sampai dengan akhir 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46  
Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo  
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jembatan Kondisi Baik-Rusak Ringan ( m )	2834,69	3939,61	3964,05	3.754,12	3.754,32
2	Jembatan Kondisi Rusak Berat-Runtuh ( m )	1261,68	159,76	132,32	342,25	342,05
JUMLAH		4.096,37	4.096,37	4.096,37	4.096,37	4.096,37

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan kondisi jembatan tiap tahunnya semakin meningkat dan untuk kondisi jembatan dalam kondisi baik s/d rusak ringan terealisasi sebesar 3.754,12 meter. Capaian kinerja pembangunan di bidang jembatan sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2015 dikarenakan adanya kerusakan jembatan yang disebabkan oleh umur jembatan dan bencana alam, namun demikian secara umum capaian kegiatan pembangunan di bidang jembatan di akhir tahun 2015 yang terealisasi sebesar 91,65% masih jauh di atas target yang ditentukan yaitu sebesar 73,48%.

Penanganan penyediaan air minum perkotaan sampai dengan akhir 2015 mencapai 187.645 penduduk (92,39%) , adapun untuk pedesaan mencapai 431.537 penduduk (84,14%). Capaian pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47  
 Penanganan Penyediaan Akses Air Minum  
 di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase cakupan layanan air minum					
	a. Perkotaan	65,03%	66,23%	66,89%	69,36%	92.39%
	b. Pedesaan	55,56%	59,11%	65,22%	71,04%	84.14%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Urusan penataan ruang termasuk bagian urusan wajib pelayanan dasar. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.48  
 Pencapaian Kinerja Penataan Ruang  
 Kabupaten Purworejo dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan	0	1	2	2	3	3
2.	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	50 %	60%	63%	65%	65%	65%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Untuk jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan didukung dengan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian detil tata ruang, serta sosialisasi dan forum koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Capaian rencana tata ruang yang diperdakan sampai tahun 2015 ada 3 perda yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Kawasan Agropolitan Bagelen, Perda Hutan Kota.

Perda yang telah diterbitkan antara lain Peraturan Daerah No 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Peraturan Daerah No 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Agropolitan Bagelen (merupakan turunan dari Perda tentang RTRW) serta Peraturan Daerah 12 Tahun 2014 tentang Hutan Kota (inisiatif DPRD dan merupakan turunan dari Perda tentang RTRW) .

Perda yang belum diterbitkan sejumlah 3 (tiga) buah yaitu Perda tentang Zonasi RDTR, Perda tentang Kawasan Strategis serta Perda tentang Kawasan Perbatasan. Ketiga Perda dimaksud telah disusun Rancangan Perdanya, namun karena untuk Perda tentang Zonasi RDTR (yang merupakan turunan dari Perda tentang Kawasan Strategis serta Perda tentang Kawasan Perbatasan ) memerlukan Peta Rupa Bumi dengan skala 1 : 5.000 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), maka

Rancangan Perda tentang Kawasan Strategis serta Rancangan Perda tentang Kawasan Perbatasan juga belum diterbitkan. Selain itu terdapat satu hal lagi yang masih perlu disusun RDTR yaitu terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luasan 30.092 Ha.

Untuk penataan bangunan dan lingkungan dalam pemanfaatan ruang perlu upaya sosialisasi dan penegakkan aturan ijin mendirikan bangunan. Jumlah IMB yang telah diterbitkan dapat diketahui dari table berikut :

Tabel 2.49  
Jumlah Penerbitan IMB

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah IMB	466	363	461	629	918

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

2.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.50  
Kinerja Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan ketersediaan rumah layak huni</li><li>Ketersediaan rumah layak huni</li></ul>	85%	87,00%	77,15%	89,28%	80 %	82,03%
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	82%	84,25%	79,71%	85,00%	76%	52,64%
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	52,30%	53,00%	54,00%	55,00%	56%	57,69%
4	Kebutuhan rumah ( Backlog )		10.485	9.985	9.485	8.985	8.485

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015



Gambar 2.22 : Kinerja Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010 - 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penurunan pada cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2010 sejumlah 85% menjadi 80,43% pada tahun 2015 dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

Sedangkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,39%.

Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor : 188.4/570/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.51  
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman  
Kumuh di Kabupaten Purworejo

No	Nama Kawasan	Luas ( Ha )	Tingkat Kekumuhan
1	Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo	9,17	Sedang
2	Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo	4,39	Sedang
3	Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo	18,41	Berat
4	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	14,06	Berat
5	Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo	2,80	Sedang
6	Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo	39,30	Sedang
7	Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo	56,59	Berat
8	Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo	24,14	Sedang
9	Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo	11,92	Sedang
10	Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo	9,23	Sedang
11	Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo	7,40	Sedang
TOTAL		197,41	

**2.5.5 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri termasuk urusanyang harus dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja urusan tersebut tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut



Tabel 2.52  
 Data Persentase partisipasi masyarakat dalam PILPRES, PILEG,  
 PILKADATahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu ( PILPRES, PILEG, PILKADA )	53 %	53 %	53 %	58,52%	69,29%	61,72%

Di Kabupaten Purworejo dari data tabel diatas terjadi peningkatan patisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan melihat tingkat partisipasi pada Pemilu Gubernur Tahun 2013, Pileg dan Pilpres Tahun 2014. Pilkada pada tahun 2015 mengalami penurunan tingkat partisipasi dari tahun sebelumnya menjadi 61,72%

Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, daerah juga melakukan upaya-upaya pembinaan kepada LSM, ormas maupun partai politik. Jumlah kegiatan pembinaan tersebut pada tahun 2015 sebanyak 7 kegiatan untuk pembinaan politik dan 2 kegiatan untuk pembinaan LSM dan ormas.

Indeks Demokrasi Indonesia untuk Kabupaten Purworejo mencapai angka 63,79. Angka tersebut meningkat dari kondisi tahun 2011 yang sebesar 60,84

Berkaitan dengan Pencapaian Persentase penanggulangan bencana dari Tahun 2010-2015 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.53  
 Pencapaian Persentase Penanggulangan Bencana Tahun 2010-2015

NO	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka penanggulangan bencana melibatkan relawan. Jumlah relawan pada Tahun 2015 sebagai berikut:



Tabel 2.54  
 Relawan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo

NO.	NAMA ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL
1.	SAR Purworejo	86 Org
2.	TAGANA	32 Org
3.	SATGANA	46 org
5.	PMB Rescue	15 org
6.	BANSER	100 org
7.	SAR CINTALDO	60 org
8.	ORARI	15 org
9.	RAPI	10 org
10.	Masyarakat Hutan	10 org
11.	SENKOM	10 org
12.	UBALOKA (PRAMUKA/KWARCAB)	12 org
13.	Karang Taruna	123 org
14.	Relawan Padam Swakarsa	21 org
15.	IPNU	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>548 org</b>

Sumber Data: BPBD Kab.Purworejo

Kondisi upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat (tramtibumlinmas) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55  
 Perkembangan kapasitas Tramtibumlinmas  
 Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah polisi pamong praja	66	76	78	78	78
2	Jumlah Linmas	99	99	99	99	99
3	Penegakan perda	83	85	300	209	3446
4	Cakupan patrol petugas satpol	14%	14%	79%	79%	84%
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	78%	81%	100%	100%	100%

Sumber data: Data Dasar Pembangunan Daerah, Satpol PP (2015)

2.5.6 Sosial

Urusan sosial termasuk bagian urusan wajib pelayanan dasar. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.56  
 Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo Tahun 2010 - 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kemiskinan (%)	16,61	17,51	16,32	15,44	14,41	13,8*

\* Dalam Proyeksi

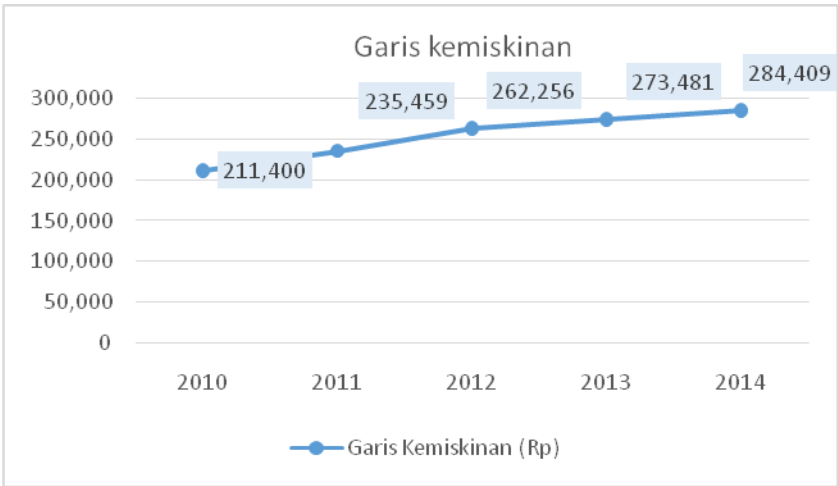
Sumber Data: BPS Tahun 2015

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih cukup tinggi, dan Persentasenya diatas rata rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Tabel 2.57  
Garis kemiskinan

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Garis Kemiskinan (Rp)	211.400	235.459	262.256	273.481	284.409

Sumber Data: BPS Tahun 2015



Gambar 2.23 : Garis Kemiskinan

Berdasarkan data diatas turunnya angka kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 14,41% dari kondisi awal tahun 2010 sejumlah 16,61% sehingga mengalami penurunan sebesar 2,20%. Sedangkan Garis Kemiskinan pada tahun 2014 sebesar Rp 284.409 dari tahun 2010 sebesar Rp 211.400.

Sementara untuk Tahun 2015, garis kemiskinan belum dipublikasikan.

Tabel 2.58  
Data PMKS yang tertangani Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8
	Persentase PMKS yang tertangani	0,77%	2.30%	19.72%	9,43 %	19,57%

Sumber Data: Dinsosnakertrans Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah kenaikan Persentase PMKS yang tertangani dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 18,8%.

Sementara itu sarana prasarana yang mendukung penyelesaian permasalahan yang dialami oleh PMKS antara lain adalah melalui ketersediaan panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Sampai dengan tahun 2015 jumlahnya mencapai 13 buah, 5 diantaranya dikelola oleh pemerintah. Perkembangan jumlah panti setiap tahunnya tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.59  
Jumlah Panti Yang Memenuhi Standar di Kab.Purworejo

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panti yang memenuhi standar	10	10	13	13	13
	a. Dikelola pemerintah	5	5	5	5	5
	b. Dikelola swasta	5	5	8	8	8

2.5.7 Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan termasuk urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.60  
Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo  
Dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Turunnya Jumlah Penganggur (orang)	14.937	12.972	20.694	16.429	3.640	3.188

Sumber data : BPS (2015)



Gambar 2.24: Jumlah Penganggur ( Orang ) Tahun 2010-2015

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam hal hubungan ketenagakerjaan, berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2014, tidak terdapat sengketa kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan. Sejumlah 12 kasus yang ada telah diselesaikan pada tingkat mediasi.

Penempatan tenaga kerja sampai dengan tahun 2015 kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.61  
 Penempatan Tenaga Kerja Dirinci Menurut Pendidikan Antar Kerja

		AKL	AKAD	AKAN	Total
1	SD	0	928	12	940
2	SLTP	30	255	151	436
3	SMA	22	152	119	293
4	SMK	239	930	259	1428
5	DI/DII	0	1	0	1
6	D III	0	2	0	2
7	S1	0	0	0	0
					3100

Sumber data : Database SKPD 2011-2015, Disnakertransos (2015)

### 2.5.8 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.62  
 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Purworejo dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IPG	60,80	64,67	65,49	65,49	66,16	66,16
2	% tindak kekerasan thd perempuan dan anak yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Index Pembangunan Gender pada tahun 2010 sebesar 60,80 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 66,16. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan keberhasilan pembangunan berwawasan

gender, yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 2.63  
Pencapaian Urusan/Sasaran PPPA 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase perempuan yang buta huruf	14,71	13,12	10,91	10,49	10,19	10,19
2.	Perempuan yang menduduki kursi di DPRD	5	5	5	6/9	8	8
3.	Perempuan yang duduk dalam instansi pemerintah	48,49	-	-	47,19	47,42	47,42
4.	Juml kebijakan daerah utk peningk. kualitas anak dan perempuan	-	-	1	3	5	5

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan penjelasan per indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase perempuan yang buta huruf pada kondisi tahun 2010 sebesar 14,71% dan pada akhir tahun 2015 sebesar 10,19% menunjukkan penurunan jumlah perempuan yang tidak dapat baca tulis.
- 2) Jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPRD menunjukkan peningkatan jumlah karena pergantian antar waktu maupun perolehan suara.
- 3) Jumlah perempuan yang duduk dalam instansi pemerintah ada penurunan dari tahun 2010 dikarenakan beberapa tahun terakhir terjadi moratorium penerimaan CPNS dan adanya pegawai yang pension.
- 4) Kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan telah diwujudkan baik dalam pelaksanaan PUG peningkatan perlindungan perempuan dan anak maupun pemenuhan hak anak di kabupaten purworejo.
- 5) Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan ke P2TP2A memperoleh layanan sesuai kebutuhan korban.

Tabel 2.64  
 Capaian Kinerja Penguatan Kelembagaan PUG dan  
 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan  
 Anak

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah SDM yang telah mengikuti TOT PUG	-	-	5	5	5	5
2.	Jumlah SDM yang dilatih PPRG	30	60	90	120	157	194
3.	Palatihan kader perempuan	130	240	390	520	680	760
4.	Peningkatan kualitas kader perempuan	350	700	1050	1300	1634	2134
5.	Jumlah kader pendamping terlatih						
	- layanan pengaduan dan pendampingan	10	14	38	58	93	109
	- layanan kesehatan	6	8	8	8	31	63
	- layanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani	3	5	5	5	17	36
	- layanan penegakan dan bantuan hukum	1	2	18	53	54	54
	- layanan reintegrasi dan pemulangan	-	-	-	-	-	32
	- kader P2K3	-	-	-	-	13	13
6.	Jumlah kasus kekerasan yang telah diselesaikan	80	65	90	93	63	70

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Capaian kinerja program/kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM menunjukkan peningkatan jumlah yang dibina/dilatih:

- 1) Perencanaan pembangunan yang responsif gender.
- 2) Peningkatan kualitas/ketrampilan kader perempuan di masing-masing organisasi dan kelompok.
- 3) Peningkatan kualitas pendamping pada setiap layanan korban kekerasan.

Tabel 2.65  
 Capaian Kinerja Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan  
 Perempuan

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kebijakan yang dibuat		-	1	3	5	5
2.	Jumlah peserta sosialisasi pemenuhan hak anak	-	140	490	1130	2030	2180
3.	Jumlah forum anak			1	10	17	17
4.	Jumlah kecamatan layak anak	-	-	-	1	2	3
5.	Jumlah desa/kelurahan layak anak	-	-	-	-	-	16
6.	Jumlah sarana bermain yang dibangun pemerintah	1	2	2	3	5	5

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Capaian kinerja program/kegiatan untuk mewujudkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan urusan PPPA dapat diwujudkan dalam upaya:

- 1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan pelaksanaan PUG, target capaian SPM penanganan korban kekerasan, kualitas hidup perempuan dan anak serta Kabupaten Purworejo Layak Anak.
- 2) Masih diperlukan program/kegiatan lanjutan untuk memfasilitasi Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam rangka pemenuhan hak anak.

Tabel 2.66  
Penyelesaian Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak  
Kabupaten Purworejo tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dewasa	39	28	43	52	39	38
2.	Anak	41	37	47	41	24	53
	Jumlah	80	65	90	93	63	91

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka tindak kekerasan pada anak pada tahun 2010 sebesar 80 kasus, dan pada tahun 2015 sejumlah 91 kasus. Selama periode lima tahun, jumlah kasus cenderung fluktuatif hal ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor arus informasi dan lingkungan pergaulan, serta permasalahan dalam keluarga.

Tabel 2.67  
Capaian Komponen Pendukung Ketimpangan IPM dan IPG  
Tahun 2014

No	Komponen Pendukung	Laki-Laki	Perempuan
1	Angka harapan hidup	69,36 tahun	73,32 tahun
2	Rata-rata lama sekolah	8,56 tahun	7,70 tahun
3	Angka melek huruf	96,97%	89,81%
4	Sumbangan pendapatan	68,08%	31,92%

### 2.5.9 Pangan

Ketahanan pangan sangat penting bagi daerah untuk mengetahui cadangan pangan yang tersedia. Regulasi daerah yang berhubungan dengan pangan antara lain Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian Kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan, Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 3170 / VI / 2014, Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 16 TAHUN 2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dari Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

Tabel 2.68  
Pencapaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan  
Dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Persentase cadangan pangan daerah	32%	65,2%	224,91%	189,84%	416,23%	293,30%
2	Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/ 1000 penduduk)	93 ton/1000 penduduk	84 ton/1000 penduduk	100,37 ton/1000 penduduk	99 ton/1000 penduduk	81 ton/1000 penduduk	93 ton/1000 penduduk
3	Jumlah desa rawan pangan	50 desa	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa	40 desa
4	Jumlah Produksi Padi (Ton)	302.895	307.019	324.456	329.595	322.168	358,548
5	Persentase kestabilan harga beras	84%	85%	85%	97%	98%	97,8%
6	Persentase kemudahan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga	85%	90%	90%	90%	100%	100%
7	Persentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/hari (gizi=kalori,protein,vitamin,le mak,dan mineral yang dikonsumsi penduduk)	86,2%	89%	89,7%	90,5%	90,7%	90,7%

Tabel 2.69  
Jumlah Lumbung Pangan Kabupaten Purworejo  
Tahun 2011-2014

No	Kecamatan	Desa	Diba- ngun tahun	Penerimaan Bansos/hibah.ton/gabah					Jumlah bantuan (ton) gabah
				2011	2012	2013	2014	2015*)	
1	Pituruh	Sikambang	2007						
		Sekartejo	2008						
		Karanganyar	2008						
		Keburusan	2008						
		Polowangi	2008						
		Kalimati	2010		4	4	1		9
		Tapen	2011		4	4			8
		Disem Wetan	2011				4		4
2	Butuh	Tamansari	2007						
		Lubang Lor	2010		4	4	1		9
3	Grabag	Rejosari	2008						
4	Purwodadi	Keduren	2008				1,5		1,5
		Ketangi	2010	4	4		1,5		9,5



No	Kecamatan	Desa	Dibangun tahun	Penerimaan Bansos/hibah.ton/gabah					Jumlah bantuan (ton) gabah
				2011	2012	2013	2014	2015*)	
5	Ngombol	Singkil kulon	2008						
		Awu – awu	2008						
		Tanjung	2011		4	4			8
		Secang	2011		4	4			8
6	Banyuurip	Kliwonan	2008						
		Triwarno	2011						
		Banyuurip	2011						
7	Bagelen	Krendetan	2008				1		1
		Piji	2010	4	4		1		9
		Soko Agung	2010	4	4		1,1		9,1
		Durensari	2011			4	1,5		5,5
8	Gebang	Bulus	2010		4	4	1		9
		Gebang	2013				16		16
9	Bayan	Tanjungrejo	2010		4	4			8
		Sambeng	2011			4	6,25		10,25
10	Loano	Jetis	2010				7,85		7,85
		Loano	2010	4	4				8
11	Kutoarjo	Kiyangkongrejo	2011		4	4			8
		Jumlah cadangan pangan tk desa							149,6 ton

Sumber Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

*Keterangan : Tahun 2015 direncanakan 4 lumbung pangan beserta lantai jemurnya, namun terkendala peraturan per Undang – undangan tentang hibah.*

Kinerja penurunan jumlah desa rawan pangan , realisasi pencapaiannya dari 50 desa menjadi 45 desa telah tercapai sampai dengan tahun 2014. Jumlah desa rawan pangan yang telah di tangani oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.70  
Penanganan Desa Rawan Pangan Kabupaten Purworejo  
tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tahap Persiapan	6 desa	1 desa	1 desa	9 desa	2 desa	9 desa
2	Tahap pertumbuhan		6 desa	1 desa	1 desa	9 desa	12 desa
3	Tahap Pengembangan			6 desa	1 desa	1 desa	-
4	Tahap kemandirian				2 desa	1 desa	1 desa
5	Pasca kemandirian					6 desa	5 desa

Sumber : Data Ketahanan Pangan diolah tahun 2015

Kerawanan pangan di tingkat desa tersebut, ditentukan oleh tujuh (7) indikator yang terbagi dalam tiga (3) aspek ketahanan pangan yang meliputi :

1. Aspek ketersediaan pangan  
Indikatornya: jumlah toko/warung kelontong,
  2. Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan  
Indikatornya: persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, persentase rumah tangga tanpa akses listrik,
  3. Aspek pemanfaatan pangan  
Indikatornya: jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan, jumlah penderita gizi buruk, jumlah sarana/fasilitas kesehatan
- Adapun Lokasi rawan / rentan pangan hasil pemetaan di Kabupaten Purworejo lebih rinci dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 2.71  
Lokasi Desa Rentan dan Rentan Pangan Kabupaten Purworejo kondisi Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa	Aspek Ketahanan Pangan		
			Aspek ketersediaan pangan	Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan	Aspek pemanfaatan pangan
1	Grabag	Kedungkamal		keluarga tanpa akses listrik 1,56%	Jumlah penduduk rentan pangan 19,42%,
2	Ngombol	Depokrejo	Akses terbatas (hanya 2 toko)	-	-
		Kaliwungukidul	Akses terbatas (hanya 3 toko)	keluarga tanpa akses listrik 1,94%	Jumlah penduduk rentan pangan 18,95%
		Kedondong	Akses terbatas (hanya 2 toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 16,3%.
		Joso	Akses terbatas (hanya 3 toko)	keluarga tanpa akses listrik 1,89%	Jumlah penduduk rentan pangan 1,78%
		Walikoro	Akses terbatas (hanya 2 toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 13,54%.
		Wingkotinumpuk	Akses terbatas (hanya 2 toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 8,4%.
3	Purwodadi	Kebonsari	Akses terbatas (hanya 2 toko)		
4	Kaligesing	Jatirejo	Akses terbatas (hanya 2 toko)	keluarga tanpa akses listrik 0,79%	Jumlah penduduk rentan pangan 35,98%
		Tlogoguwo		keluarga tanpa akses listrik 0,99%	Jumlah penduduk rentan pangan 26,47%
		Tawang Sari		keluarga tanpa	Jumlah penduduk

No	Kecamatan	Desa	Aspek Ketahanan Pangan		
			Aspek ketersediaan pangan	Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan	Aspek pemanfaatan pangan
				akses listrik 2,98%	rentan pangan 39,37%
		Somowono	Akses terbatas (hanya 2 toko)	keluarga akses listrik 0,91%	Jumlah penduduk rentan pangan 31,24%
5	Banyuurip	Seborokrapyak		keluarga akses listrik 1,94%	Jumlah penduduk rentan pangan 16,88%
6	Butuh	Sumbersari	Akses terbatas (tidak ada toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 11,81%
		Rowodadi	Akses terbatas (tidak ada toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 22,52%
		Wonorejowetan	Akses terbatas (tidak ada toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 26,61%,
		Kunirejowetan	Akses terbatas (hanya 2 toko)	keluarga akses listrik 7,14%	Jumlah penduduk rentan pangan 30,32%
		Lubang Dukuh	Akses terbatas (tidak ada toko)	keluarga akses listrik 3,42%	Jumlah penduduk rentan pangan 26,65%
7	Pituruh	Petuguran	Akses terbatas (hanya 3 toko)	keluarga akses listrik 4,43%	Jumlah penduduk rentan pangan 19,06%
		Luwengkidul	Akses terbatas (tidak ada toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 18,91%
8	Kemiri	Kaliglagah	Akses terbatas (hanya 1 toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 17,56%
		Kedungpomahan kulon		keluarga akses listrik 3%	Jumlah penduduk rentan pangan 11,95%, keluarga tanpa akses listrik 3%
9	Bruno	Plipiran		Keluarga akses listrik 1,96%	Jumlah penduduk rentan pangan 32,48%
		Somoleter		Keluarga akses listrik 2,65%	Jumlah penduduk rentan pangan 42,06%
		Brunorejo		Keluarga akses listrik 2,54%	Jumlah penduduk rentan pangan 29,68%
		Gowong		Keluarga akses listrik 1,90%	Jumlah penduduk rentan pangan 30,69%
		Kaliwungu		Keluarga akses listrik 1,69%	Jumlah penduduk rentan pangan 44,78%
10	Gebang	Bendosari		Keluarga akses listrik 2,64%	Jumlah penduduk rentan pangan 26,41%
		Kragilan		Keluarga akses listrik 2,79%	Jumlah penduduk rentan pangan 27,831%
		Prumben	Akses terbatas (hanya 4 toko)	Keluarga akses listrik 4,05%	Jumlah penduduk rentan pangan 27,45%
		Kalitengkek		Keluarga akses listrik	Jumlah penduduk rentan pangan 26,63%

No	Kecamatan	Desa	Aspek Ketahanan Pangan		
			Aspek ketersediaan pangan	Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan	Aspek pemanfaatan pangan
				2,73%	
12	Loano	Kalinongko		Keluarga tanpa akses listrik 3,15%	Jumlah penduduk rentan pangan 18,05%
		Karangrejo		Keluarga tanpa akses listrik 3,56%	Jumlah penduduk rentan pangan 16,96%
		Kalikalong	Akses terbatas (tidak ada toko)		Jumlah penduduk rentan pangan 22,15%
13	Bener	Benowo			Jumlah penduduk rentan pangan 23,84%,
		Wadas		Keluarga tanpa akses listrik 2,32%	Jumlah penduduk rentan pangan 34,25%
		Karangsari		Keluarga tanpa akses listrik 1,92%	Jumlah penduduk rentan pangan 23,98%
		Legetan		Keluarga tanpa akses listrik 3,98%	Jumlah penduduk rentan pangan 22,57%
		Kalijambe		Keluarga tanpa akses listrik 2,39%	Jumlah penduduk rentan pangan 19,33%
		Sokowuwuh		Keluarga tanpa akses listrik 1,78%	Jumlah penduduk rentan pangan 22,71%

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015

Produksi padi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,36 % dengan rerata kenaikan pertahun 4,81 %. Jumlah produksi padi dengan realisasi di tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar 307.019 ton, 324.456 ton, 329.595 ton dan 322.168 ton. Trend datanya cenderung naik dengan kenaikan sebesar 5,68 % di tahun 2012, 1,58% di tahun 2013 dan turun 2,25% di tahun 2014. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya serangan hama wereng dan tikus serta bencana alam banjir yang melanda kecamatan Ngombol, Kaligesing, Kutoarjo dan Butuh seluas 92 ha. Selain itu pada tahun 2014 tercatat pada Badan Pertanahan Nasional seluas 5,82 ha sawah beralih status ke perumahan.

### 2.5.10 Pertanian

Urusan pertanahan termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.72  
Kinerja Urusan Pertanahan  
Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Persentase Tanah Yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat	27%	19,52%	31%	26,99%	27,2%	30,75%
2.	Persentase rata-rata pertumbuhan kontribusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD	20%	14%	22%	109%	24%	28,49%



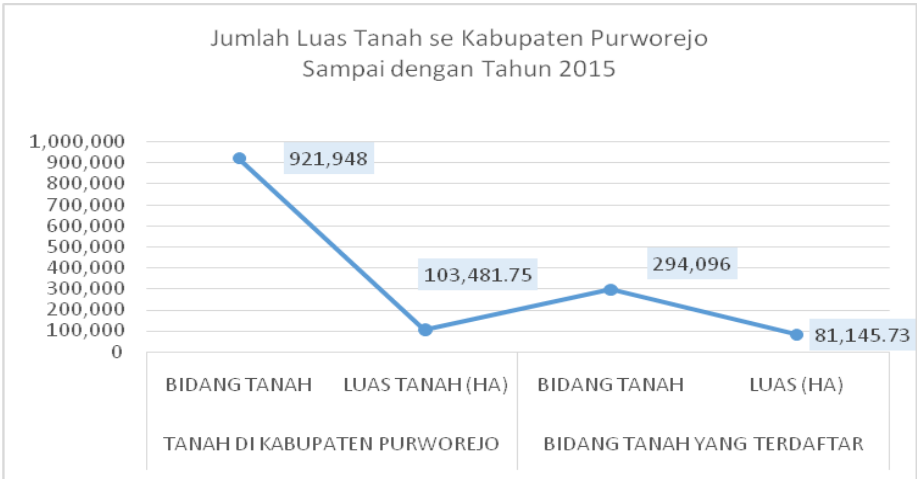
Gambar 2.25: Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015

Ketercapaian indikator Persentase Tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.73  
Jumlah Luas Tanah se Kabupaten Purworejo  
Sampai dengan Tahun 2015

NO	KABUPATEN	TANAH DI KABUPATEN PURWOREJO		BIDANG TANAH YANG TERDAFTAR	
		BIDANG TANAH	LUAS TANAH (HA)	BIDANG TANAH	LUAS (HA)
1	PURWOREJO	921.948	103.481,75	294.096	81.145,73

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo



Gambar 2.26 : Jumlah Luas Tanah se Kabupaten Purworejo Sampai Dengan Tahun 2015

Data sebagaimana di atas menunjukkan bahwa luas bidang tanah yang terdaftar se Kabupaten Purworejo (81.145,73 HA) dibandingkan dengan luas tanah se Kabupaten Purworejo (103.481,75 HA), maka capaian Persentase Tanah Yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat sebesar 78,42%.

Sedangkan jumlah bidang tanah yang terdaftar meliputi HM, HGB, HP, HMSRS, HPL dan Wakaf sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.74  
Jumlah Bidang Tanah se Kabupaten Purworejo  
Sampai Dengan Tahun 2015

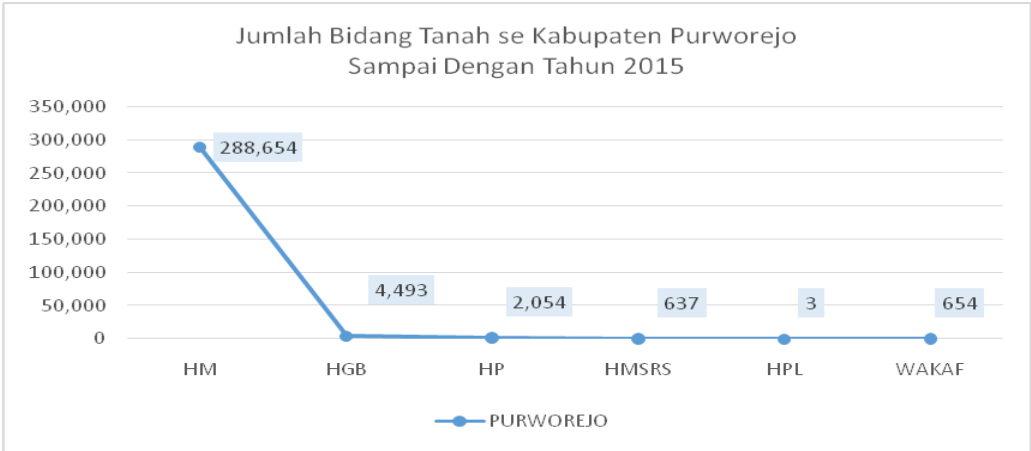
NO	KABUPATEN	JUMLAH BIDANG YANG TERDAFTAR							BIDANG TANAH YANG BELUM TERDAFTAR
		HM	HGB	HP	HMSRS	HPL	WAKAF	JUMLAH	
1	PURWOREJO	288.654	4.493	2.054	637	3	654	294.096	624.707

Sumber : BPN Purworejo

Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan asset Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

Tahun 2012/2013 terdapat 1 (satu) sengketa pertanahan menyangkut tanah kantor Kecamatan Bener, Tahun 2014/2015 terdapat satu sengketa pertanahan menyangkut tanah Kantor Kelurahan Baledono yang diklaim masyarakat

Sementara itu sengketa pertanahan di masyarakat berdasarkan data dari BPN Purworejo pada tahun 2013 terdapat 6 kasus selesai tertangani, kemudian tahun 2014 terdapat 20 kasus tertangani, dan tahun 2015 kasus yang berhasil tertangani sejumlah 12 kasus.



Gambar 2.27 : Jumlah Bidang Tanah se Kabupaten Purworejo Sampai Dengan Tahun 2015

Berkaitan dengan Persentase rata-rata pertumbuhan kontribusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2), yang semula merupakan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, dialihkan ke Pemerintah Daerah., menjadi Pajak Daerah.

Persentase pertumbuhan kontribusi Pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kecnderungan meningkat sepanjang tahunnya.

2.5.11 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.75  
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purworejo Dari Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Pencegahan pencemaran air	20%	41%	100%	100%	100%	100%
2.	Pencegahan pencemaran udara sumber yang tidak bergerak	0%	0%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	0%	10%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	70%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2015

2.5.12    **Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Urusan kependudukan dan catatan sipil termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.76  
KinerjaUrusan Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Purworejo dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Lamanya waktu yang digunakan untuk pelayanan kependudukan :	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari
	- Pelayanan KK	3	3	3	2	2	2
	- Pelayanan KTP	3	1	1	1	1	1
	- Pelayanan Pindah datang	1	1	1	1	1	1
	Pelayanan pencatatan sipil:						
	- Akte Kelahiran	21	21	7	7	7	7
	- Akte Kematian	14	14	7	7	7	7
	- Keterangan Lahir Mati	14	14	7	-	-	-
	- Akte Perkawinan	14	14	14	4	4	4
	- Akte Perceraian	14	14	3	3	3	3
	- Pengakuan Anak	14	14	14	7	7	7
	- Pengesahan Anak	14	14	14	7	7	7
	- Perubahan Nama	24	24	23	7	7	7
	- Perubahan Status Kewarganegaraan	24	24	23	7	7	7
	- Pembatalan Perkawinan	14	14	14	7	7	7
	- Pembatalan Perceraian	14	14	14	7	7	7
2.	Persentase penduduk yang memiliki KTP	100 %	50,80 %	98,08%	86,58 %	81,16 %	88, 15 %
3.	Persentase kepemilikan akte kelahiran	100 %	14,80 %	84,07%	95,71 %	96,23 %	95,50 %
4.	Persentase terpeliharanya data base kependudukan	100 %	96,87 %	100%	100	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada Persentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2015 masih mencapai 88, 15 % dari kondisi awal tahun 2010 sebesar 100%. Disamping itu Persentase kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2015 masih mencapai 95,50% dari kondisi awal tahun 2010 sebesar 100%.

Penerapan KTP Nasional tersebut sudah berbasis pada NIK.

2.5.13    **Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan wajib dengan kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :



Tabel 2.77  
Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan)	8%	9,40%	10,80%	6,75%	29,71%	8,83%
2	Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	469	469	469	469	469	469
3	Temuan inovasi dan kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat	0%	10%	50%	20%	50%	53,3%
4	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes	10%	24,52%	42,82%	69,69%	30%	30%
5	Desa/ Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Desa (RPJMD-Des)	250	469	469	467	467	469
6	Persentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa)	80%	76,11%	80%	80%	86%	100%
7	Jumlah PKK Aktif	494	494	494	494	494	494
8	Jumlah Posyandu Aktif	1647	1647	1647	1647	1647	1647

Berdasarkan data diatas bahwa angka tingkat swadaya masyarakat pada tahun 2010 sampai tahun 2015 rata-rata sebesar 14,70%.

Tabel 2.78  
Data Aparat Desa Di Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010-2015

Formasi Perangkat	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Desa	469	469	469	469	469	469
Sekretaris Desa	469	469	469	469	469	469
Kepala Urusan	2.156	2.156	2.131	2.114	2.106	2.106
Kadus	1.658	1.655	1.640	1.640	1.641	1.641
PTL	512	474	555	576	581	581
Jumlah Aparat Desa	5.226	5.225	5.258	5.268	5.279	5.279

Sumber data : Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Setda Kab Purworejo Tahun 2015

2.5.14 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.79  
Kinerja Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi  
Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Tingkat prevalensi peserta KB Aktif ( % )	70	80,69	82,91	83,44	82,40
	TK Prevalensi Kesertaan KB Pria ( % ) PA Pria	3.822	4.152	4.218	4.152	4.058
	Peserta KB Baru	3,92 %	4,22 %	4,16 %	4,11 %	5,11 %
	Peserta KB Baru Pria	16.266	17.012	16.099	14.621	12.722
	Peserta KB Aktif	712	838	581	380	340
	Pasangan Usia Subur/PUS	97.894	98.492	101.376	101.205	98.999
	Kelompok Prio Utomo	121.723	121.617	122.131	120.755	119.535
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	35	35	38	40	48
	1. Kelp. PIK Remaja/ Mahasiswa	24	28	33	39	62
	2. Kapasitas Intitusi (PIK R/M)					
	- Tumbuh	18	20	22	26	37
	- Tegak	4	5	8	8	13
	- Tegar	2	3	3	5	12

Sumber data: Badan KBPM Kab Purworejo Tahun 2015

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa:

- a) Tingkat prevalensi kesertaan KB aktif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 12,40 %, dari 70 % menjadi 82,40 % pada tahun 2014 hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB untuk kesejahteraan dan kesehatan keluarga.
- b) Tingkat prevelansi kesertaan KB pria dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,19 % dari tahun 2010 peserta KB Pria sebanyak 3.822 akseptor menjadi 4.058 pada tahun 2014 atau 5,11 %, kenaikan lambat dikarenakan belum adanya kesadaran kaum pria dalam berKB dan belum adanya kesepakatan pasangan suami istri untuk mengikuti kesertaan KB pria.

- c) Meningkatnya pelayanan KB bagi peserta KB Baru ( PB ) selama 5 tahun dari tahun 2010 – 2014 sebanyak 76.720 akseptor atau 100,61 % dari target / PPM PB sebesar 76.248 akseptor.
- d) Meningkatnya pelayanan KB bagi peserta KB Baru ( PB ) selama 5 tahun dari tahun 2010 – 2014 sebanyak 76.720 akseptor atau 100,61 % dari target / PPM PB sebesar 76.248 akseptor.
- e) Terlaksananya peserta KB Baru Pria selama 5 tahun dari tahun 2010 – 2014 sebanyak 2.851 akseptor terdiri dari Medis operasi pria MOP sebanyak 166 dan 2.685 pemakai kondom
- f) Meningkatnya pembinaan bagi Pasangan Usia Subur ( PUS ) sebagai peserta KB Aktif (PA) pada tahun 2010 sebesar 97.894 atau 80,09 % terhadap PUSi sebesar 121.723 pada tahun 2014 menjadi 98.999 peserta aktif atau 82,82 % dari PUS sebesar 119.535 pasangan.
- g) Meningkatnya Pembentukan dan pembinaan Paguyuban Prio Utomo dari 35 kelompok pada tahun 2010 menjadi 48 kelompok pada tahun 2014 meningkat sebesar 72,91 %.
- h) Meningkatnya pembentukan dan pembinaan terhadap pusat informasi dan konseling remaja (PIK R) dari 24 pada tahun 2010 menjadi 62 kelompok pada tahun 2014, dengan pentahapan tumbuh 37, tegak 13 dan tahap tegar 12 Kelompok.

**2.5.15 Perhubungan**

Urusan perhubungan termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.80  
 Pencapaian Kinerja Urusan Perhubungan  
 Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai kebutuhan	25%	38%	48,50%	61,34%	92,14%	97,11%
2.	Persentase sarana perhubungan dengan kondisi baik	40%	45%	95,45%	93%	100%	98,48%
3.	Persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan	30%	32%	58%	75%	75%	75%

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
4.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%	75%
a.	Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani angkutan umum	172	172	172	172	172	172
b.	Jumlah jaringan jalan yang seharusnya dilayani angkutan umum	229	229	229	229	229	229
5	Tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
a.	Jumlah halte yang ada	4	4	4	4	4	4
b.	Jumlah unit halte yang seharusnya ada	8	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

- 1) Realisasi capaian kinerja Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai kebutuhan terus mengalami peningkatan dari kondisi awal sebesar 25% hingga pada akhir 2015 mencapai 97,11%. Peningkatan capaian ini disumbangkan oleh peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan, diantaranya jumlah ketersediaan angkudes, rambu, guardrail, marka, unit pengujian, traffic light dan warning light.
- 2) Dari data diatas terlihat bahwa, Persentase sarana prasarana perhubungan dengan kondisi baik mengalami peningkatan yang pada tahun pertama RPJMD. Persentase pada tahun 2010 sebesar 40% menjadi 45% pada tahun 2011, selanjutnya di tahun 2012 mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan yakni mencapai 95,45%. Dan capaian sampai dengan akhir 2015 bisa mencapai 98,48%..
- 3) Persentase jumlah sarana prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan terus mengalami kenaikan dari kondisi awal yakni sebesar 30%. Pada tahun 2011 sarana prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan bisa tercapai 32% dan sampai dengan akhir 2015 mencapai 75%.

Dukungan sarana prasarana untuk menghasilkan layanan kinerja urusan perhubungan, ketersediaannya tampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.81  
Data Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

No	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	1. Angkudes / Ijin trayek (buah)	660	660	660	660	660
	2. Rambu Jalan (buah)	408	553	800	1154	3154
	3. Guard rail (meter)	1432,8	1940,8	2012,8	2604,8	651
	4. Marka Jalan (meter)	3074,8	5676,6	13661,6	18661,6	86373
	5. Unit Pengujian (unit)	1	1	1	1	1
	6. Traffic Light (buah)	13	13	16	19	19
	7. Warning Light (buah)	37	41	51	56	136
	8. Pelican Crossing (buah)	-	-	-	1	2
	9. Terminal (buah)	6	6	6	6	6
	10. Halte	4	4	4	4	4
	11. Jumlah Perlintasan Sebidang Yang Berpalang Pintu	14	14	14	14	14

Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

Pelaksanaan evaluasi jaringan trayek diharapkan bisa menentukan kebutuhan jaringan transportasi dan moda transportasi mencakup beberapa hal yaitu : a). mengurangi atau menambah jumlah jaringan transportasi, b). mengurangi dan menambah armada transportasi dan c). menentukan moda transportasi yang tepat. Data realiasi ijin trayek sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.82  
Realisasi Ijin Trayek

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Ijin Trayek	73	61	159	205	142

Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

Tabel 2.83  
Rasio Ijin Trayek dan KIR Angkutan Umum  
Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Uraian	Tahun 2015
1	Rasio Ijin Trayek	100% (650 pemohon ijin terlayani semua)
2	Uji Kir Angkutan Umum	100% (4304 KBWU)

Sumber : Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

### 2.5.16 Komunikasi dan Informasi

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib dengan kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.84  
Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika  
Dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Persentase pem-publish-an data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru	60%	70%	77,50%	90%	50%	59%
2.	Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI	10	14	10	70	77	77
3.	Persentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	50%	60%	100%	77%	91%	100%
4.	Persentase pengendalian tower telekomunikasi	50%	100%	55,46%	79,86%	100%	100%
5	Jumlah penyiaran radio/stasiun TV lokal	9/0	9/0	9/0	9/1	9/1	9/1
6	Jumlah website milik pemerintah daerah	71	71	71	71	71	71

- 1) Berdasar tabel di atas terlihat bahwa indikator Persentase pem-publishkan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru pada awal RPJMD menunjukkan peningkatan. Tahun 2011 naik 10% menjadi 70%, tahun 2012 naik lagi menjadi 77,50% dan pada tahun 2013 mencapai angka 90%. Namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup besar, indikator Persentase pem-publishkan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru hanya sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya jumlah SKPD yang aktif dalam mempublishkan data dan informasi.
- 2) Dari kondisi Tahun 2010 Sistem Informasi yang dimiliki pemerintah berbasis TI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 ada 14 SIM, tahun 2012 bertambah 4 SIM lagi. Seiring dengan semakin banyaknya tupoksi SKPD yang bisa diaplikasikan dalam SIM pada tahun 2013 banyak SIM baru yang dibuat, dan jumlah SIM sampai akhir tahun 2013 mencapai 70 SIM. Pada tahun berikutnya jumlah

- SIM yang ada bertambah lagi 7 SIM sehingga sampai akhir 2015 SIM yang ada sebanyak 77 SIM.
- 3) Pada Tahun 2010, SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN baru 50% dari total SKPD di Kabupaten Purworejo. Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10% menjadi 60%. Selanjutnya terus mengalami peningkatan, tahun 2012 menjadi 100%, namun sampai akhir 2015 jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN mengalami kenaikan menjadi 100%.
- 4) Berdasar tabel di atas, pada tahun 2010 jumlah tower yang sudah dikendalikan sebesar 50%. Tahun 2011 seluruh tower sudah bisa dikendalikan. Tahun 2012 tower yang bisa dikendalikan hanya 55,46% saja. Namun tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 79,86% dan sampai akhir 2015 sebanyak 144 tower semuanya sudah termonitoring, sehingga capaian indikator mencapai 100%.

**2.5.17 Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**

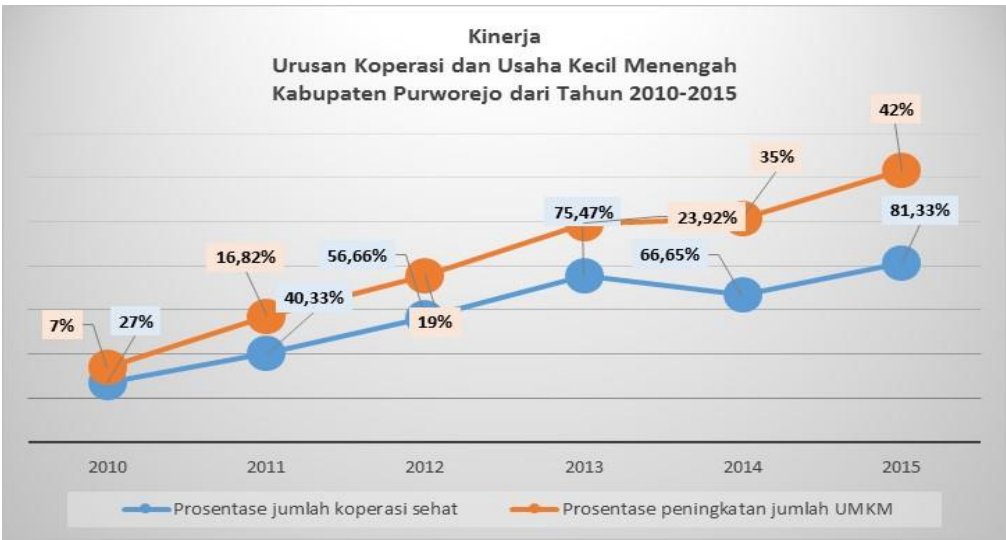
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk urusan wajib. Jumlah koperasi dampai tahun 2015 sebanyak 273 dengan perincian : Koperasi aktif 230, Koperasi tidak aktif 25, dan Koperasi beku 18

Kinerja koperasi sehat tahun 2010 sebesar 96, tahun 2011 sebesar 123 dari 125 koperasi yang dinilai, 2012 sebesar 121 dari 125 koperasi yang dinilai, Tahun 2013 sebesar 120 dari 135 koperasi yang dinilai, Tahun 2014 sebesar 125 dari 150 koperasi yang dinilai, Tahun 2015 sebesar 122 dari 150 koperasi yang dinilai

Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.85  
Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Purworejo dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase jumlah koperasi sehat	27%	40,33%	56,66%	75,47%	66,65%	81,33%
2	Persentase peningkatan jumlah UMKM	7%	16,82%	19%	23,92%	35%	42%



Gambar 2.28 : Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 - 2015

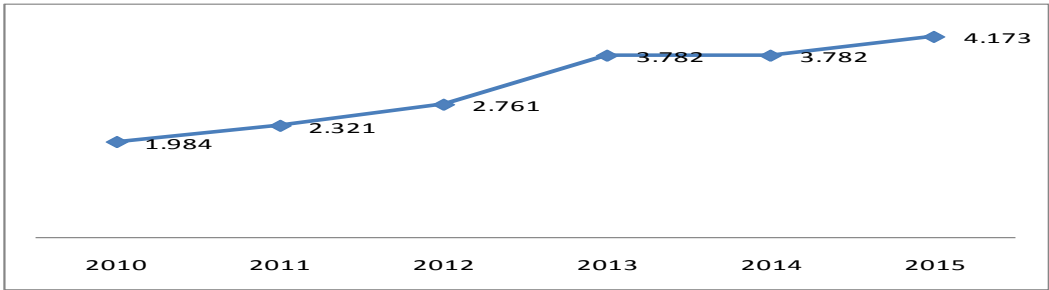
Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan peningkatan Persentase jumlah koperasi sehat sebesar 54,33% dan Persentase peningkatan jumlah UMKM sebesar 35 % dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Jumlah UMKM dari tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.86  
Jumlah UMKM Yang Dibina Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah UMKM yang dibina	1.984	2.321	2.761	3.782	3.782	4.173

Sumber data : Diskoperindagpar Kab.Purworejo Tahun 2015



Gambar 2.29 : Jumlah UMKM yang dibina Kabupaten Purworejo Tahun 2010 - 2015

UMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang pertumbuhannya di Kabupaten Purworejo belum sesuai dengan harapan dan masih perlu didorong untuk dikembangkan termasuk kualitas produk dan daya saing pasar.



2.5.18 Penanaman Modal

Urusan penanaman modal termasuk urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.87  
Kinerja Penanaman Modal  
Kabupaten Purworejo dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Jumlah Investor	323	339	431	450	453	572
2	Nilai investasi ( Milyar )	43	45,9	140,2	92,94	111,23	215,34
3	Jumlah perizinan investasi yang diterbitkan	324	327	454	474	517	572

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Purworejo sejumlah 323 investor meningkat pada tahun 2015 sejumlah 572 investor. Nilai investasi meningkat pada tahun 2011 sejumlah 43 M menjadi sebesar 215,34 Mpada tahun 2015.

Jumlah perizinan dari tahun 2011-2015 meningkat 248 izin.Jumlah perizinan investasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat diketahui dari permohonan SIUP yang diterbitkan sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88  
Jumlah SIUP yang diterbitkan  
Tahun 2010 – 2015

NO	BULAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Januari	30	28	43	59	50	42
2	Pebruari	25	22	36	43	54	52
3	Maret	24	25	42	29	50	50
4	April	22	25	43	59	43	56
5	Mei	32	35	41	38	38	58
6	Juni	26	24	39	42	42	51
7	Juli	33	31	42	36	34	28
8	Agustus	25	30	30	20	35	40
9	September	24	26	36	39	37	52
10	Oktober	30	32	41	36	40	45
11	Nopember	23	24	28	39	45	59
12	Desember	30	25	33	34	49	39
	JUMLAH	324	327	454	474	517	572

Sumber data : KPMPT Kab.Purworejo 2015

Adapun besarnya nilai investasi tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.89  
Data Nilai Investasi Tahun 2010-2015

NO	BULAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Januari	3,541,000,000	2,768,000,000	7,323,000,000	6,881,500,000	6,324,600,000	21,875,759,000
2	Pebruari	3,289,500,000	1,204,000,000	4,373,500,000	4,722,700,000	7,580,000,000	9,595,200,000
3	Maret	3,132,000,000	6,603,134,900	17,911,384,030	4,072,646,400	18,723,236,800	7,767,058,000
4	April	3,417,250,000	2,039,000,000	8,362,862,219	7,314,447,244	8,631,487,530	29,861,391,545
5	Mei	2,528,342,125	5,806,084,175	8,888,669,923	9,263,058,797	6,355,650,000	6,539,850,000
6	Juni	4,570,996,500	3,132,550,000	12,633,822,537	5,654,550,000	5,185,736,000	22,124,247,058
7	Juli	4,948,790,000	2,684,932,000	11,402,822,537	31,434,530,075	13,016,363,543	4,241,850,000
8	Agustus	3,740,652,000	3,732,699,295	9,609,458,418	2,091,612,500	6,085,029,655	6,780,000,000
9	September	3,341,600,000	4,398,100,000	3,038,974,784	5,040,000,000	6,670,041,254	57,980,250,129
10	Oktober	5,609,400,000	3,569,600,000	8,982,686,830	7,543,556,732	2,629,487,726	11,643,913,346
11	Nopember	1,149,060,000	3,234,000,000	26,191,308,669	3,508,000,000	8,973,000,000	20,664,750,000
12	Desember	3,869,611,592	6,758,772,525	21,704,000,000	5,416,229,804	21,060,000,000	16,260,000,000
	JUMLAH	43,138,202,217	45,930,872,895	140,422,489,947	92,942,831,552	111,234,632,508	215,334,269,078

Sumber data : KPMPT Kab.Purworejo 2015

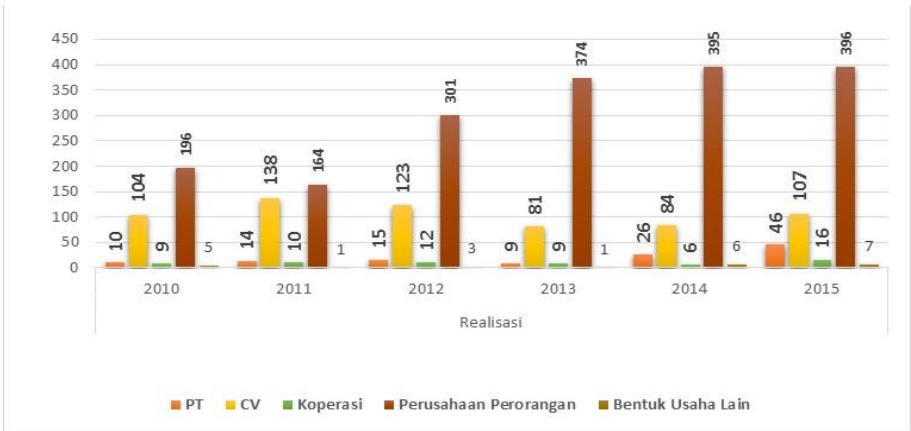
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 nilai investasi di Kabupaten Purworejo setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2015.

Sedangkan izin investasi berdasarkan bentuk usaha dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.90  
Izin Investasi Menurut Bentuk Usaha  
Tahun 2010 – 2015

NO.	BENTUK USAHA	TAHUN						JML
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	PT	10	14	15	9	26	46	120
2	CV	104	138	123	81	84	107	637
3	Koperasi	9	10	12	9	6	16	62
4	Perusahaan Perorangan	196	164	301	374	395	396	1826
5	Bentuk Usaha Lain	5	1	3	1	6	7	23
	JUMLAH IZIN	324	327	454	474	517	572	2668

Sumber data : KPMPT Kab.Purworejo 2015



Gambar 2.30 : Izin Investasi Bentuk Usaha Tahun 2010 - 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jumlah Perusahaan Perorangan di Kabupaten Purworejo setiap tahun mengalami peningkatan paling tinggi. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pengusaha-pengusaha di Kabupaten Purworejo untuk mengurus izin usahanya.

2.5.19    **Kepemudaan dan Olahraga**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.91  
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga  
Kabupaten Purworejo dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Jumlah prestasi olahraga	12	15	17	22	33	30
2	Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi	10	12	12	12	6	11
3	Jumlah organisasi kepemudaan	20	20	20	20	20	60
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	5	5	5
5	Jumlah klub olahraga	72	72	80	82	85	85
6	Jumlah gedung olahraga	16	16	16	16	16	16

Sumber data : Data dasar pembangunan , Dindikbudpora (2015)



Gambar 2.31 : Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 - 2015

Jumlah prestasi olahraga tahun 2010 sebesar 12 kejuaraan dan tahun 2015 sebesar 27 kejuaraan, mengalami kenaikan perolehan kejuaraan yaitu sebanyak 15 kejuaraan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran serta pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan prestasi olahraga.

Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi tahun 2010 sebesar 10 dan tahun 2015 sebesar 11, mengalami kenaikan sebanyak 1. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran serta pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kelompok pemuda berprestasi

2.5.20 Statistik

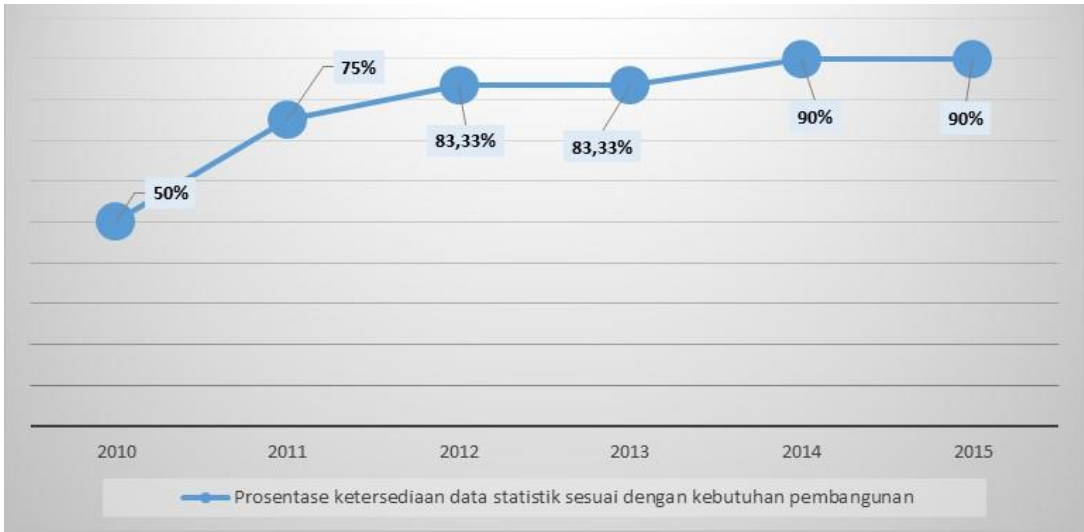
Urusan statistik merupakan salah satu urusan wajib dengan kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.92  
Ketersediaan data statistik  
Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	50%	75%	83,33 %	83,33 %	90%	90%

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Dokumen statistik kabupaten						
	- Kabupaten dalam angka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- PDRB Kabupaten						
	- PDRB Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Inflasi dan Indeks Harga Konsumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- IPM dan Inkesra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Nilai Tukar Petani	-	-	-	-	-	100%

Sumber data : Bappeda Kabupaten Purworejo, 2015



Gambar 2.32: Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Statistik tahun 2010 - 2015

Penyediaan Data Statistik Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan. Penyelenggaraan pengembangan statistik (kerjasama, dukungan penyelenggaraan statistik dasar, Koordinasi Statistik Antar Sektoral, dan Jejaring Statistik Khusus) dengan lembaga/instansi statistik dalam Pengembangan data/ informasi/statistik daerah.

### 2.5.21 Persandian

Capaian kinerja urusan persandian sampai dengan tahun 2015 adalah meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita sandi dari pusat dan propinsi. Rata-rata tiap tahun 5 sampai dengan 10 berita sandi. Pengelola persandian juga saat ini memberikan pelayanan telekomunikasi berita telepon/fax antar perangkat daerah di Kabupaten Purworejo, melayani sejumlah 41 perangkat daerah.

Tabel. 2.93  
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah berita sandi yang ditangani	3	3	2	2	1

Sumber : Setda Kabupaten Purworejo, 2015

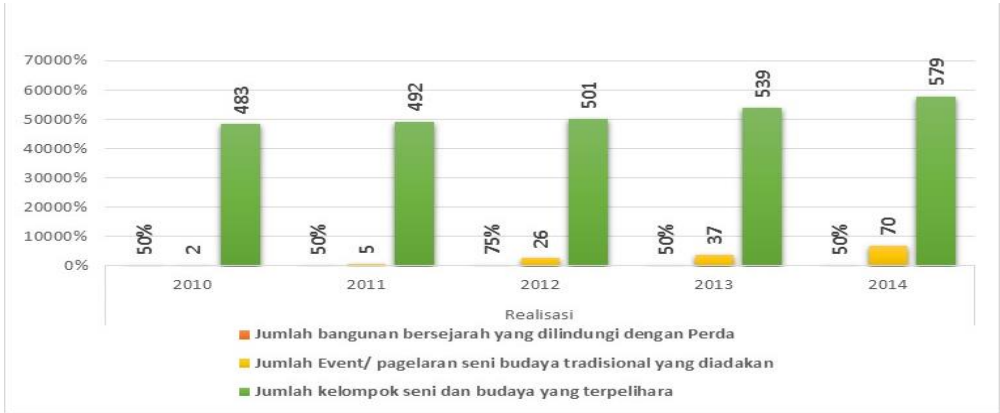
Memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan persandian meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten.

2.5.22 **Kebudayaan**

Urusan Kebudayaan termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.94  
Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	5	6	7	8
1	Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan Perda	50%	50%	75%	50%	50%
2	Jumlah Event/ pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan	2	5	26	37	70
3	Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara	483	492	501	539	579



Gambar 2.33 : Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2010 - 2014

Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan Perda Tahun 2010 sebesar 50% dan tahun 2014 sebesar 50% , tidak mengalami kenaikan karena jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan perda jumlahnya masih sama belum mengalami kenaikan. Data Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan Perda sebanyak 79 buah. Jumlah Event/ pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan tahun 2010 sebanyak 2 kali dan tahun 2014 sebanyak 70 kali, mengalami kenaikan sebesar 68 kali. Hal ini menunjukkan semakin pedulinya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menjaga kelestarian budaya melalui pementasan-pementasan seni budaya.

Sedangkan jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara tahun 2010 sebesar 483 kelompok dan tahun 2014 sebesar 579 kelompok, mengalami penambahan 96 kelompok. Hal ini menunjukkan makin banyaknya kelompok seni yang terpelihara baik oleh desa, mapun oleh kabupaten dan ini menggambarkan bahwa kelompok seni dan budaya masih menampilkan karya seni dan budaya.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya untuk memfasilitasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas seni dan budaya di daerah terdapat 1 buah gedung kesenian, namun demikian kondisinya kurang representatif.

### 2.5.23 Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib dengan kinerjanya belum mengembirakan terutama dalam hal jumlah pengunjung dan ketersediaan bahan pustaka serta dukungan sarana prasarana yang representatif. Adapun kinerja urusan perpustakaan tahun 2010 sampai 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.95  
Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah	33.871	28.094	34.276	31.326	30.598	29.317
2	Jumlah	45	45	45	47	49	50

	sekolah/tempat yang disinggahi perpustakaan keliling						
3	Jumlah koleksi bahan pustaka	34.992	36.192	35.634	36.279	36.920	37.670
4	Jumlah perpustakaan						
	a. Perpustakaan Kabupaten	1	1	1	1	1	1
	b. Perpustakaan desa (yang memenuhi standar)	1	1	2	2	2	2

Sumber : Kantor Arpusda Tahun 2015

### 2.5.24 Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib dengan kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.96  
Kinerja Urusan Kearsipan  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Juml berkas (dok/arsip negara yang dikelola dengan baik)	26.299	26.299	34.274	34.395	46.774	49.274

Upaya peningkatan SDM pengelola arsip telah dilakukan beberapa kegiatan, rata-rata dilakukan sebanyak 3 kegiatan setiap tahunnya.



Gambar 2.34 : Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010 - 2015

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah berkas/dokumen/arsip negara /daerah yang telah dikelola dengan baik selalu mengalami peningkatan yang signifikan.



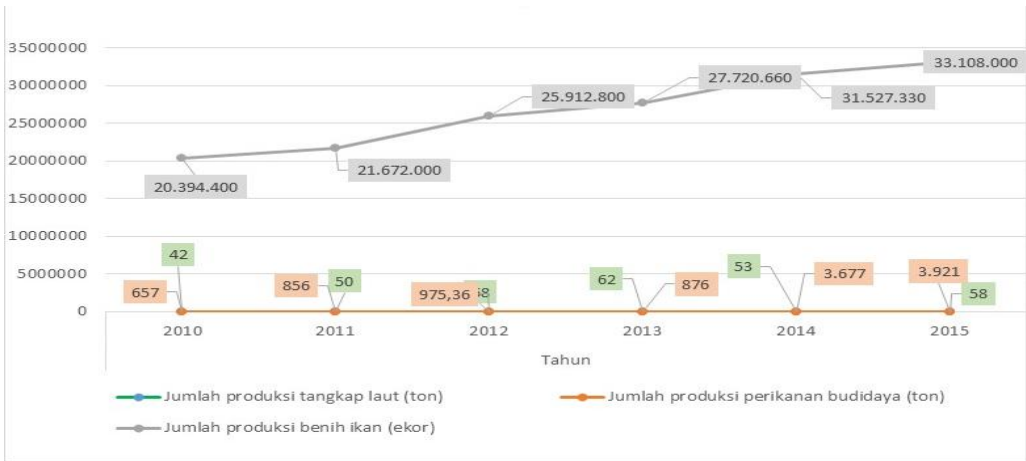
2.5.25 Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan dan kelautan merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.97  
Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan  
Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Jumlah produksi tangkap laut (ton)	42	50	68	62	53	58
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	657	856	975,36	876	3.677	3.921
3	Jumlah produksi benih ikan (ekor)	20.394.400	21.672.000	25.912.800	27.720.660	31.527.330	33.108.000
4	Jumlah pengolah ikan yang dibina (orang)	50	162	250	435	545	575
5	Cakupan bina kelompok nelayan						
	a. Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan	8	8	10	10	2	5
	b. Jumlah kelompok nelayan	8	8	28	61	62	63

Sumber : DPPKP Kabupaten Purworejo Tahun 2015



Gambar 2.35 : Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa kinerja perikanan dan kelautan mengalami peningkatan. Peningkatan itu meliputi: produksi tangkapan laut, produksi perikanan budidaya dan pengolah ikan yang mendapatkan pembinaan.

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan walaupun masih dibawah target nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013 konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo sebesar 11,2 kg/kap/tahun, tahun 2014 sebesar 11,6 kg/kap/tahun. Masih dibawah target Provinsi Jawa Tengah yaitu di tahun 2013 sebesar 18,19 kg/kap/tahun, tahun 2014 sebesar 20,92 kg/kap/tahun dan nasional sebesar 38,0 kg/kap/tahun.

2.5.26 **Pariwisata**

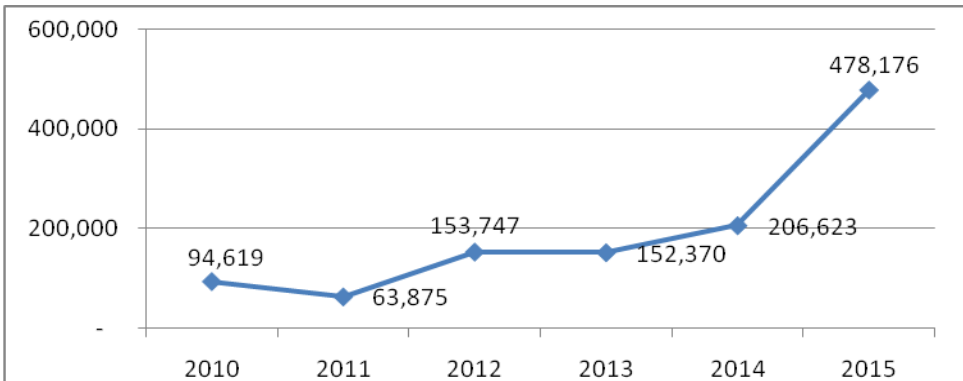
Urusan pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.98  
Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata  
Kabupaten Puworejo Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor hotel dan restoran	12%	16,59%	16,90%	17,18%	17,18%	17%
2	Kontribusi pariwisata terhadap PAD	1,42%	4,07%	1,92%	2,64%	0,53%	17%

Di Kabupaten Purworejo terdapat 4 obyek wisata yang sudah dikelola yaitu: Pantai Jatimalang, Kolam Renang Artha Tirta, Goa Seplawan, Geger Menjangan.

Untuk Pantai Keburuhan belum terkelola, rencana ke depan akan dikembangkan menjadi obyek wisata pantai terpadu Pantai Jatikontal, Pantai Jatimalang, dan Pantai Keburuhan. Perkembangan jumlah pengunjung pariwisata di Kab.Purworejo terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, selengkapnya tampak dalam grafik berikut ini :



Sumber : Diskoperindagpar Kab.Purworejo (2016)  
Gambar 2.36 : Perkembangan Jumlah Kunjungan Pariwisata  
Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2015

2.5.27 Pertanian

Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pilihan dengan kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.99  
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Produktivitas lahan budidaya pertahun padi, palawija, dan holtikultura meningkat (ha/ tahun)	70.000	70.770	90.435	135.748	98.152	117,977
2	Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun)	700.000	707.700	904.350	1.357.480	981.520	897,220
3	Persentase kelompok tani berbadan hukum (kelompok tani)		-	4	4	22	19
4	Jumlah kelompok usaha pertanian dalam arti luas yang diberi permodalan (kelompok)	3	5	17	263	274	295
5	Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (ha)	16	15	15	4	6,00	5,44
6	Jumlah jenjang kelompok tani						
	Pemula	1.013	7%	-44%	30%	50%	30
	Lanjut	838	-24%	33%	30%	51%	34
	Madya	93	-20%	216%	40%	201%	130
	Utama		0	1	2	5	19
7	Panjang jaringan irigasi pedesaan dalam kondisi baik (m)	202.952	220.947	222.952	257.659	291.296	222,652
8	Jumlah produksi padi (ton)	302.895	307.019	324.456	329.595	322.168	358,548
9	Jumlah produksi jagung (ton)	26.122	17.748	29.558	9.986	13.206	18.370
10	Jumlah produksi kedelai (ton)	3.279	5.210	5.980	3.063	3.483	3.948
11	Jumlah produksi daging (kg)	7.253.547	7.415.245	7.750.386	7.921.033	8.508.581	9.027.330
12	Jumlah produksi telur (kg)	924.115	968.554	981.868	924.700	1.250.620	1426940
13	Jumlah populasi ternak besar (ekor)	17.736	22.111	23.588	16.884	19.722	21.286
14	Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	213.686	212.317	233.321	229.199	242.867	257.464
15	Jumlah populasi ternak unggas (ekor)	1.114.956	1.507.792	1.523.464	1.372.676	1.576.222	3.431.077
16	Jumlah populasi aneka ternak (ekor)	3.063	10.520	3.080	3.380	4.024	7.134
17	Jumlah kelahiran IB (ekor)	2.467	4.633	4.838	4.768	5.381	5.124
18	Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah penanganan pencegahan penyakit hewan (ekor)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DPPKP Kabupaten Purworejo, 2016

Produktivitas lahan budidaya pertahun padi, palawija, dan hortikultura meningkat (ha/tahun) dari 70.000 Ha pada tahun 2010 meningkat menjadi 70.770 ha, 90.435 ha, 135.748 ha dan 98.152 ha pada tahun 2014. Penurunan pada tahun 2014 diantaranya dikarenakan terjadi banjir yang cukup besar pada akhir tahun 2013 sehingga banyak membenamkan areal sawah dan kebun dan mempengaruhi hasil panen tahun 2014. Disamping itu ada beberapa komoditas yang mengalami tanam mundur, sekitar 985 ha jagung belum dipanen pada akhir tahun 2014 karena baru ditanam. Selain itu serangan hama dan penyakit dan alih fungsi lahan juga mempengaruhi produktivitas lahan. Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat dari 700.000 orang/tahun menjadi 981.520 orang /tahun atau sebesar 40,19 %.

Produksi padi, jagung dan kedelai terjadi fluktuatif. Untuk produksi padi trend datanya cenderung naik dengan kenaikan sebesar 5,68 % di tahun 2012, 1,58% di tahun 2013 dan turun 2,25% di tahun 2014. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya serangan hama wereng dan tikus serta bencana alam banjir yang melanda kecamatan Ngombol, Kaligesing, Kutoarjo dan Butuh seluas 92 ha. Selain itu pada tahun 2014 tercatat pada Badan Pertanahan Nasional seluas 5,82 ha sawah beralih status ke perumahan. Data ini belum termasuk alih fungsi lahan yang tidak mengajukan ijin.

Produksi jagung terjadi fluktuatif. Secara berturut turut produksi jagung sebesar 26.122 ton, 17.748 ton, 29.558 ton, 9.986 ton dan 13.206 ton dari tahun 2010 hingga 2014. Penurunan pada tahun 2013 diakibatkan karena kondisi iklim tahun 2013 yang cenderung basah, pada bulan Juni dan Juli curah hujan masih tinggi, sehingga tanaman palawija mengalami penurunan. Selain itu kecamatan Grabag yang selama ini menjadi salah satu sentra jagung, banyak yang beralih ke tanaman hortikultura. Pada tahun 2014 melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Bero diberikan bantuan benih jagung untuk lahan seluas 770 ha, namun karena terjadi tanam mundur peningkatan produksi jagung tahun 2014 belum optimal.

Produksi kedelai cenderung mengalami penurunan berturut turut produksi kedelai dari tahun 2010 hingga 2014 yaitu 3.279 ton, 5.210 ton, 5.980 ton, 3.063 ton dan 3.483 ton. Penurunan produksi pada tahun 2013 dikarenakan kondisi iklim yang cenderung basah sehingga produksi kedelai mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2014 terjadi puso tanaman kedelai di kecamatan Pituruh, Kutoarjo, dan Ngombol seluas 136 ha.

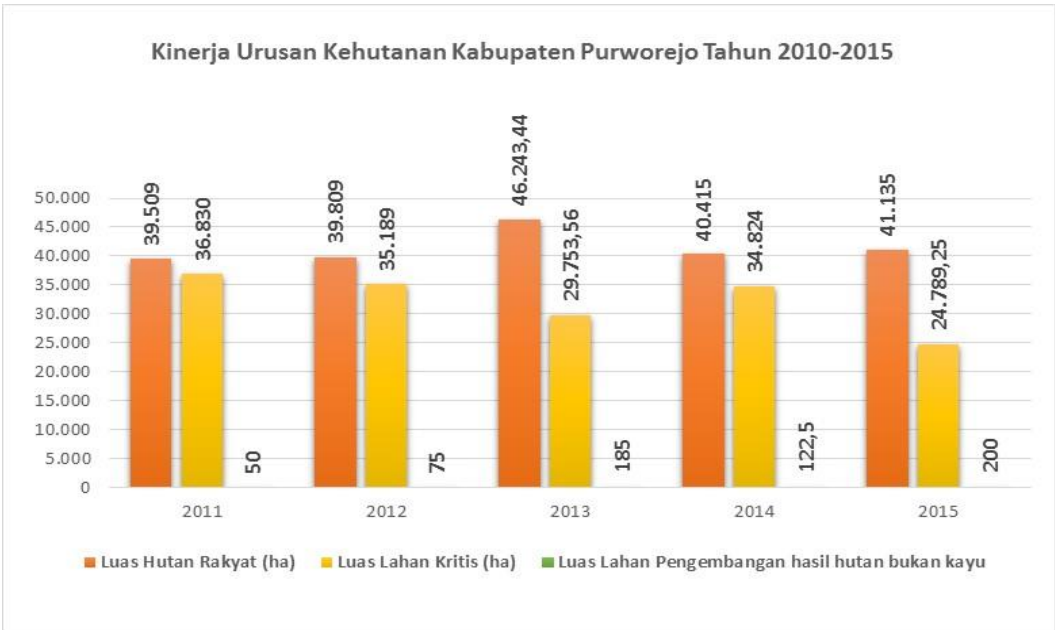
### 2.5.28 Kehutanan

Urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pilihan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagian besar urusannya beralih ke provinsi dan daerah diberi kewenangan hanya menangani taman hutan raya. Adapun kinerjanya pada tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.100  
Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	
1	Luas Hutan Rakyat (ha)	39.509	39.809	46.243,44	40.415	41.135	41.435
2	Luas Lahan Kritis (ha)	36.830	35.189	29.753,56	34.824	24.789,25	24.489,25
3	Luas Lahan Pengembangan hasil hutan bukan kayu	50	75	185	122.5	200	200

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo, 2016



Gambar 2.37 : Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2015

2.5.29 Energi dan Sumber daya mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan salah satu urusan pilihan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagian besar urusannya beralih ke provinsi. Adapun kinerjanya pada tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.101  
Pencapaian Kinerja Urusan ESDM  
Kabupaten PurworejoTahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	
1	Dusun Tanpa Akses Listrik	9,60%	9% (16 dusun)	8,00%	4,00%	6,00%	5%
2	Jumlah Pemanfaatan Energi Alternatif Baru Terbarukan (Unit)	-	0	20	27	27	27

Sumber : SDAESDM Kabupaten Purworejo, 2015

Dusun tanpa akses listrik pada kondisi awal 9,60% atau sejumlah 175 dusun pada tahun 2011 menurun menjadi 5% pada tahun 2015. Berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) Tahun 2015 jumlah rumah tangga yang belum berlistrik Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 576 rumah tangga dari 208.167 rumah tangga.

Mulai tahun 2016 urusan ketenagalistrikan sudah tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota.

2.5.30 Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.102  
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan transaksi produk lokal	13,61%	10%	17%	17,39%	17,18%	19%
2	Persentase pertumbuhan ekspor	0	8%	3,360%	5,25%	7,43%	47%
3	Persentase rata-rata pertumbuhan PDRB	9,78%	9,79%	10,46%	10,19%	4,99%	9,79%

Sumber : Dinas Koperindagpar Kabupaten Purworejo, 2015

Selain kinerja diatas, disisi lain masih terdapat beberapa persoalan yaitu kondisi pasar daerah yang rusak, dan belum terbangunnya kembali pasar Baledono yang terbakar pada tahun 2013.

Tabel 2.103  
Kondisi Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No	Nama Pasar	Kondisi		
		Baik	Kurang	Buruk
1	Pasar Baledono			V
2	Pasar Kutoarjo	v		
3	Pasar Suronegaran	v		
4	Pasar Pituruh	v		
5	Pasar Kemiri			V
6	Pasar Wirotaman	v		
7	Pasar Hw Dukuhrejo	v		
8	Pasar Grabag	v		
9	Pasar Kaliboto		v	
10	Pasar Maron			V
11	Pasar Krendetan	v		
12	Pasar Jenar Wetan	v		
13	Pasar Purwodadi		v	
14	Pasar Kedungsri	v		
15	Pasar Butuh		v	
16	Pasar Banyuasin		v	
17	Pasar Pagi		v	
18	Pasar Mundusari		v	

19	Pasar Seren		v	
20	Pasar Gebang		v	
21	Pasar Winong		v	
22	Pasar Kenteng			V
23	Pasar Tegal Miring		v	
24	Pasar Soko		v	
25	Pasar Guron			V
26	Pasar Ngori		v	
27	Pasar Geparang		v	

Sumber data: Data Dasar Pembangunan, Diskoperindagpar (2015)

Selain itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan perdagangan terdapat peralihan sub urusan kemetrologian yang semula kewenangan provinsi menjadi kewenangan kabupaten/kota.

**2.5.31 Perindustrian**

Urusan industri merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.104  
Pencapaian Kinerja Urusan industri  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian	13554 unit	3%	6%	6%	12%	15%
2	Persentase peningkatan jumlah klaster yang terbentuk	26 KUB	11,5%	15%	104%	124%	135%
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	24	24	28	32	40	58

Sumber : Dinas Koperindagpar Kabupaten Purworejo, 2015

Industri di Kabupaten Purworejo perlu didorong pengembangannya dari indusri kecil ke industri menengah serta lebih difokuskan pada sub sistem agribisnis hilir.

**2.5.32 Transmigrasi**

Transmigrasi di Kabupaten Purworejo diutamakan bagi keluarga produktif yang miskin. Dari tahun 2010 sampai dengan 2015 capaiannya menurun dikarenakan sangat tergantung kepada kuota yang ditentukan dari pemerintah pusat. Hal ini tergambar sebagaimana data dalam tabel berikut :



Tabel 2.105  
 Pencapaian Kinerja Bidang Ketransmigrasian Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi	40 %	39,34 %	30,17 %	30,68 %	18,10 %	0%

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Purworejo, 2015

**2.5.33 Fungsi Penunjang Urusan Dukungan Fungsi DPRD**

Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting. Sampai dengan tahun 2015 dukungan fungsi DPRD adalah untuk menjamin 3 ( tiga ) fungsi tersebut tepat waktu tercapai 100 %. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2014-2019 adalah 45 orang, dengan komposisi 9 orang wanita dan 36 pria.

**2.5.34 Fungsi Penunjang Urusan Pembinaan Dan Pengawasan**

Bahwa untuk membantu Bupati di bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibentuk Inspektorat. Untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah, menggunakan ukuran tingkat maturitas yang didalamnya meliputi lima (5) unsur yaitu :

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian resiko
- Aktivitas pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan pengendalian internal

Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2015 berada pada level 1,36.

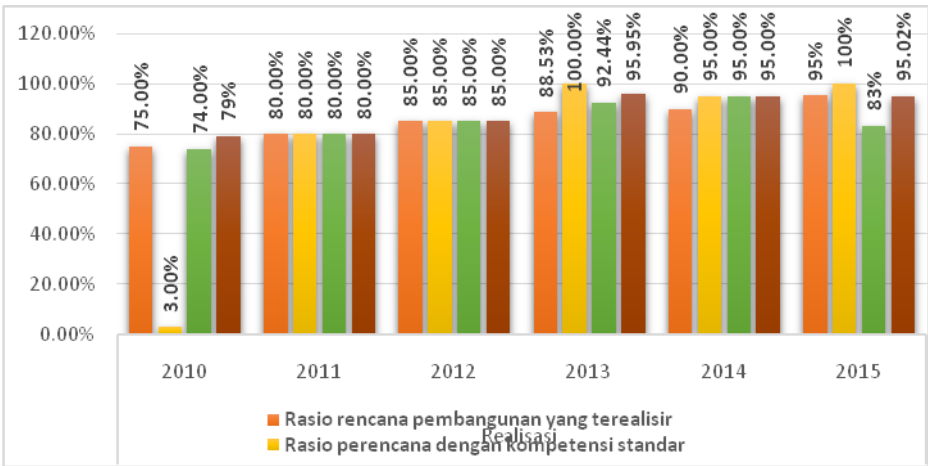
**2.5.35 Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**

Fungsi penunjang perencanaan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mencakup perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. Sampai dengan tahun 2015 pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.106  
Pencapaian Perencanaan Pembangunan  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Rasio rencana pembangunan yang terealisasi	75%	80,00%	85,00%	88,53%	90,00%	95,27%
2.	Rasio perencanaan dengan kompetensi standar	3%	80,00%	85,00%	100,00%	95,00%	100%
3.	Persentase efisiensi kinerja SKPD	74%	80,00%	85,00%	92,44%	95,00%	83,03%
4.	Persentase efektivitas kinerja SKPD	79%	80,00%	85,00%	95,95%	95,00%	95,02%

Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo, 2015



Gambar 2.38 : Rasio Perencanaan Pembangunan yang terealisasi

Untuk indikator kinerja Rasio Rencana Pembangunan yang terealisasi didukung dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan serta evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan rencana pembangunan baik jangka pendek (RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD), sehingga dapat menjadi *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.

Capaian rasio perencanaan pembangunan yang terealisasi dari APBD dibandingkan yang direncanakan dalam RKPD mengalami fluktuasi sesuai prioritas sasaran dan program kegiatan di tahun berjalan serta ketersediaan dana, baik

yang bersumber dari PAD, transfer, hibah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun komposisi rasio program dan kegiatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.107  
Komposisi Rasio Program dan Kegiatan  
Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	Tahun														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		RKPD	APBD	%	RKPD	APBD	APBD	RKPD	APBD	%	RKPD	APBD	%	RKPD	APBD	%
1	PROGRAM	432	430	99,53	454	450	99,11	394	390	98,98	469	464	98,93	180	180	100%
2	KEGIATAN	2.490	2.396	96,22	2.501	2.320	92,76	2.775	2.460	88,65	3.012	2.825	93,79	3159	3159	100%

Sumber data : Bappeda Kab.Purworejo, 2015

Indikator kinerja Rasio perencana dengan kompetensi standar didukung dengan kebijakan meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan perencanaan melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan dan sosialisasi tentang perencanaan pembangunan serta menyusun dan mengimplementasikan SOP Perencanaan pembangunan daerah.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan peraturan yang berlaku, kebutuhan akan aparatur yang memiliki kompetensi teknis perencana mengalami peningkatan, hal ini juga sebanding dengan perkembangan peraturan yang berlaku serta kebutuhan penggunaan aplikasi perencanaan pembangunan. Perkembangan rasio perencana dengan kompetensi standar tahun 2011 sampai 2015 dilakukan secara rutin untuk seluruh SKPD melalui kegiatan pembinaan teknis perencanaan maupun update data perencanaan kepada aparatur perencana.

Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ketentuan sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.108  
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan  
Kabupaten Purworejo

1	RPJPD	Tersedia	Perda No.3 Tahun 2010
2	RPJMD	Tersedia	Perda No.2 Tahun 2011
3	RKPD	Tersedia	Perbup No.23.A Tahun 2011 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2012
4	RKPD	Tersedia	Perbup No.18 Tahun 2012 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2013

5	RKPD	Tersedia	Perbup No.17 Tahun 2013 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2014
6	RKPD	Tersedia	Perbup No. 16.1 Tahun 2014 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2015
7	RKPD	Tersedia	Perbup No.9 Tahun 2015 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2016

Sumber data: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2015

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu. Hal tersebut mencakup dua (2) hal yaitu ditingkat Daerah dan di tingkat Perangkat Daerah. Sampai dengan tahun 2015 capaiannya 96, yang merupakan rata – rata tertimbang dari realisasi kinerja tingkat Kabupaten, ketepatan waktu penyusunan perencanaan tingkt Kabupaten dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah.

**2.5.36 Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan**

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan ditunjang oleh Sistem Inovasi Daerah ( SIDA). Sampai dengan tahun 2015 pencapaian SIDA sampai pada tahap penguatan kelembagaan yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya inovasi di masyarakat maupun di perangkat daerah.

**2.5.37 Fungsi Penunjang Urusan Keuangan**

Tabel 2.109  
Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pertumbuhan Pendapatan (PAD, Bagi hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan)	60,9 M	46%	37%	109%	272%	424,24%
2	Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase Bagian Laba BUMD	5% (2,1 M)	35% (2,84M)	78% (3,74M)	98% (4,153M)	141% (5,07M)	173,71% (5,74M)
5	Waktu Penetapan APBD	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	Tepat waktu

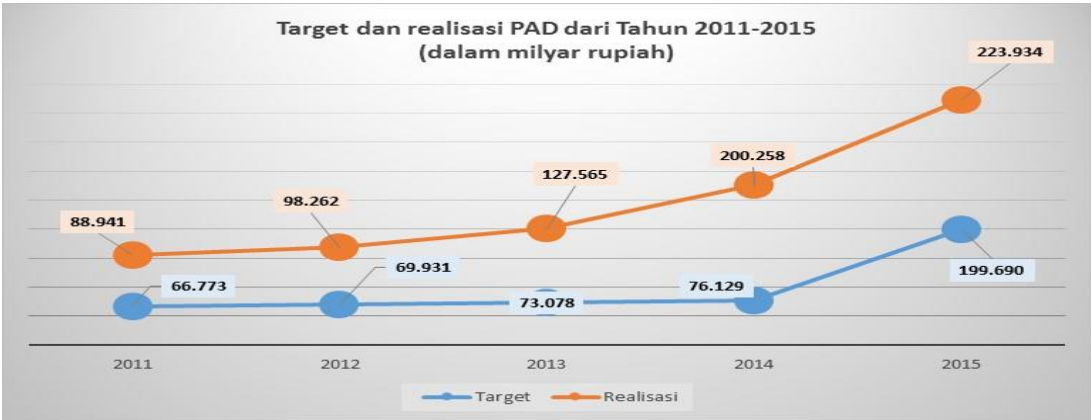
Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Adapun target dan realisasi makro capaian pendapatan asli daerah tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.110  
Target dan realisasi PAD dari Tahun 2011-2015  
(dalam milyar rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	66.773	88,941
2	2012	69.931	98,262
3	2013	73.078	127,565
4	2014	76.129	200,258
5	2015	199.690	223.934

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015



Gambar 2.38 : Target dan realisasi PAD Tahun 2011 - 2015

Peningkatan PAD secara signifikan semula pada tahun 2011 sebesar Rp 66.733M menjadi Rp 223.934 M pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terjadi karena pengalihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah dan penerimaan BLUD RSUD. Peningkatan nilai penyumbang PAD Nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.111  
Komponen PAD dari Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Pajak Daerah	12,014	12,114	30,475	34,200	38,016
Hasil Retribusi Daerah	12,202	14,621	16,923	21,953	16,713
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,850	3,120	4,154	5,074	5,747
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61,875	68,407	76,013	139,031	173,456
Jumlah	88,941	98,262	127,565	200,258	233,934

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Tabel 2.112  
Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2015

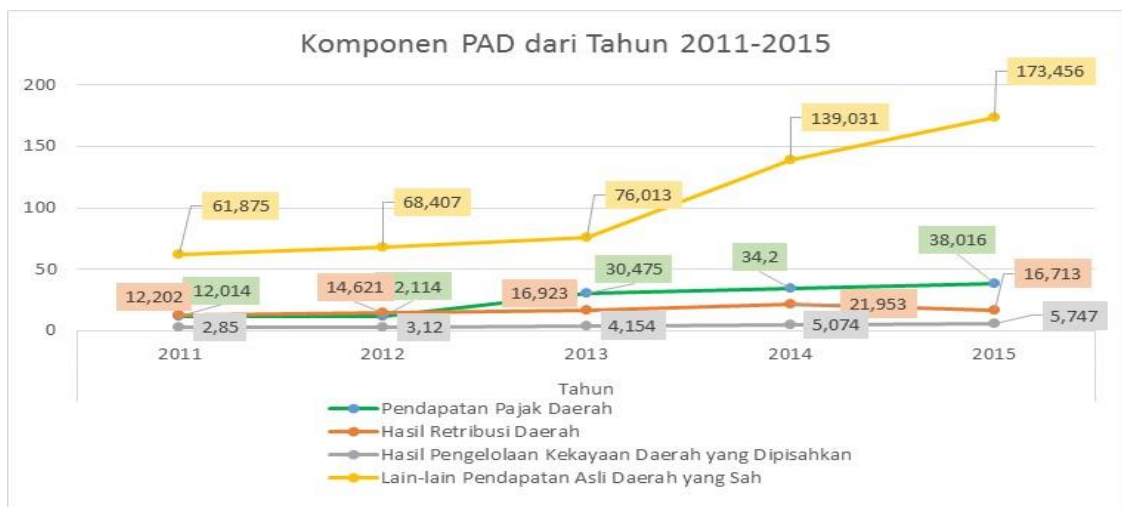
No	Jenis Pajak	Obyek Pajak
1	Pajak Hotel	Hotel Bintang Satu
		Hotel melati Tiga
		Losmen/Rmh Penginapan/Pesanggrahan/Kos
2	Pajak Restoran	Rumah Makan/Warung
		Katering/Jasa Boga / kantin dll
		Pedagang kaki lima
3	Pajak Hiburan	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/busana Pameran
4	Pajak Reklame	Reklame papan/billboard
		Reklame Kain
5	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan PLN
		Pajak Penerangan Jalan Non PLN
6	Pajak Pengambilan mineral bukan logam	Pajak Penambangan Batu Kali/Pasir
7	Pajak Parkir	Pajak Parkir
8	Pajak Air Tanah	Pajak Air Bawah Tanah
9	Pajak Pengusahaan sarang burung wallet	Pajak sarang burung walet
10	Pajak Bumi & Bangunan	PBB - P2
11	BPHTB	

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Tabel 2. 113  
Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2015

NO	Jenis Retribusi	Obyek Retribusi
1	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan
		Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
		Ret.Pengg.Biaya KTP Cetak Akte Capil
		Retribusi Pelayanan Pemakaman
		Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
		Retribusi Pelayanan pasar
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
		Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
		Retribusi Penggantian Cetak Peta
		Retribusi Pelayanan Pendidikan
		Retribusi Penyedotan Kakus
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	RETRIBUSI JASA USAHA	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
		Retribusi Jasa Pasar Grosir dan atau Pertokoan
		Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
		Retribusi Jasa Usaha-usaha Terminal
		Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
		Ret.Jasa Ush Tpt Penginapan/Pesanggrahan/ Vila
		Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
		Retribusi Rumah Potong Hewan
		Ret. Jasa Ush Pelayanan Pelabuhan Kapal
		Ret. Jasa Usaha tempat Rekreasi dan OR
		Ret. Jasa Usaha Pelayanan Penyeberangan
		Ret. Jasa Usaha Penj. Produksi Ush Daerah
3	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
		Ret. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
		Retribusi Ijin gangguan
		Retribusi Ijin Trayek

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015



Gambar 2.39 : Komponen PAD dari tahun 2011 - 2015

- (1) Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini WTP ditargetkan tercapai pada Tahun 2015 dimana pada awal tahun perencanaan yaitu pada tahun 2010 opini yang diperoleh adalah WDP. Opini WTP diperoleh telah dicapai pada Tahun ke 2 pelaksanaan RPJMD yaitu pada laporan keuangan Tahun 2012 yang diaudit pada awal Tahun 2013, selanjutnya pada tahun

2013 juga diperoleh opini WTP serta pada tahun 2014 kembali diperoleh opini WTP

(2) Laba BUMD

Kegiatan yang dilaksanakan melalui penyertaan modal pada BUMD berdasarkan Peraturan Daerah yaitu :

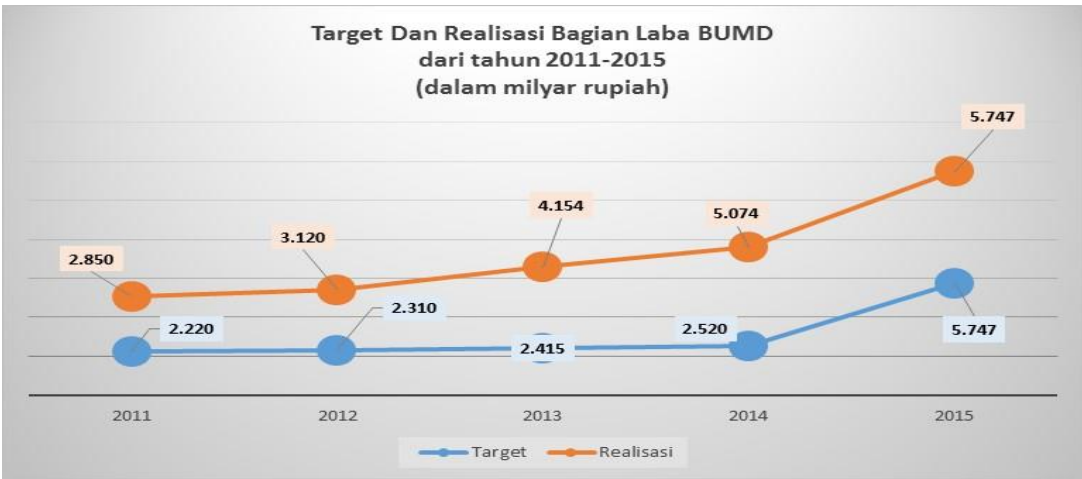
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Graha Husada Medika
- Bank Purworejo
- Bank Kredit Kecamatan (BKK)
- Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU)
- PT. Bank jateng

Laba BUMD meningkat sepanjang tahunnya sejalan dengan peningkatan nilai penyertaan modal pada BUMD sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.114  
Target Dan Realisasi Bagian Laba BUMD  
dari tahun 2011-2015 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2011	2.220	2.850
2012	2.310	3.120
2013	2.415	4.154
2014	2.520	5.074
2015	5.747	5.747

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015



Gambar 2.40: Target dan Realisasi Bagian Laba BUMD dari Tahun 2011 – 2015

(3) Waktu Penetapan APBD



Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD pada awal tahun perencanaan tidak tepat waktu, yang selanjutnya ditargetkan tepat waktu setiap tahunnya. Pada Tahun ke RPJMD target tersebut telah dicapai dimana realisasi penetapan APBD nampak pada tabel berikut.

Tabel 2.115  
Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari tahun 2011-2015

Tahun	Waktu Penetapan	Realisasi
2011	15 Januari 2011	Tidak tepat waktu
2012	31 Desember 2011	tepat waktu
2013	29 Desember 2012	tepat waktu
2014	30 Desember 2013	tepat waktu
2015	30 Desember 2014	tepat waktu

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015

2.5.38 Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian Serta Diklat

Tabel 2.116  
Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Persentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)	80%	79,66%	84,84%	89,68%	93,86%	94,33%
2	Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM	72%	69,10%	80,94%	82,48%	85,68%	91,27%
3	Persentase tingkat pendidikan aparat	56%	68,00%	72,60%	77,99%	95,85%	96,22%
4	Persentase tingkat pelanggaran disiplin PNS	28%	29,62%	20,46%	12,36%	11,51%	1,85%
5	Persentase aparat yang mendapatkan penghargaan	78%	82,19%	83,78%	85,54%	89,69%	78,35%

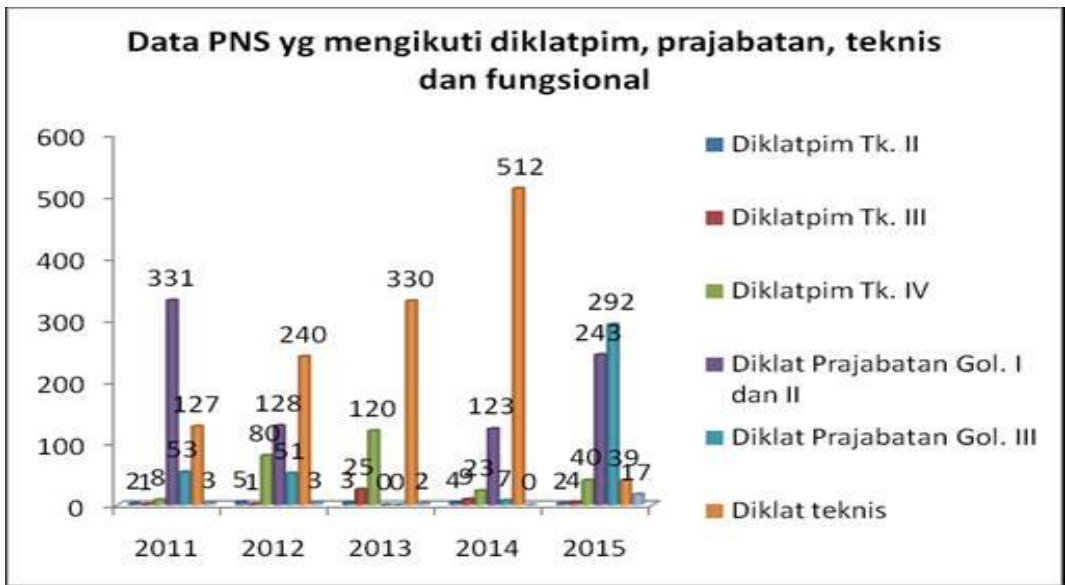
No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Persentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya	50%	60,50%	70,56%	84,00%	86,50%	92,10%
7	Persentase tingkat tertib administrasi kepegawaian	70%	75,49%	85,91%	90,66%	97,50%	100,00%

- Berkaitan dengan ketercapaian Kinerja selama tahun 2010-2015 dijelaskan sebagai berikut:
- (1) Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Persentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)

Berdasarkan data indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa Persentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya pada tahun 2010 sebesar 80,00% dan tahun 2015 sebesar 94,33%. Hal ini disebabkan banyak pegawai yang senantiasa meningkatkan kompetensinya baik melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun pelatihan teknis.

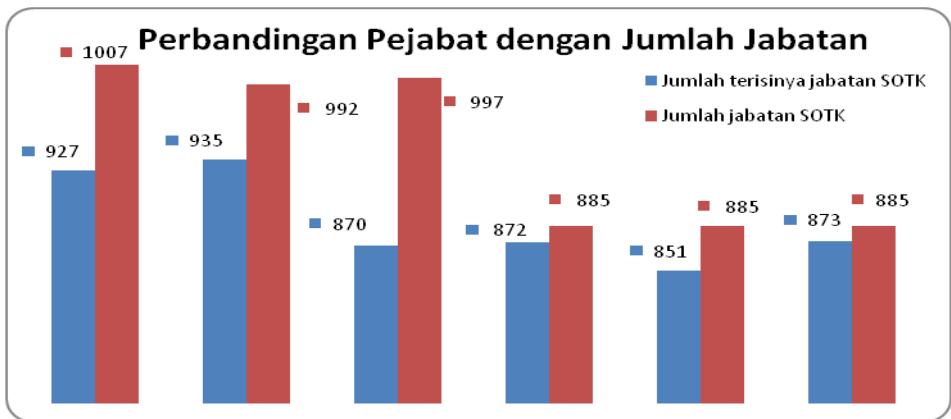
- (2) Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintahan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM (Diklatpim Tingkat II,III,IV dan Diklat Prajabatan gol I, II, III) dibandingkan dengan jumlah aparatur yang wajib mengikuti Diklatpim Tingkat II, III, IV dan Diklat Prajabatan Golongan I, II, III. Adapun Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM tahun 2010 sebesar 72,00% dan tahun 2015 sebesar 91,27%atau meningkat sebesar 19,27%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat struktural eselon II, III dan IV yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan baik penyelenggaraan sendiri maupun pengiriman ke beberapa lembaga diklat seperti Badan diklat provinsi Jawa Tengah dan Pusdiklat regional Yogyakarta. Juga CPNS yang wajib mengikuti diklat prajabatan senantiasa bisa dilaksanakan. Data pejabat yang mengikuti diklatpim sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini:



Gambar 2.41 : Data PNS yang mengikuti diklatpim, Prajabatan, Teknis dan fungsional

Dari grafik diatas menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baik Tingkat II, III maupun IV.



Gambar 2.42 : Perbandingan Pejabat dengan Jumlah Jabatan

Tabel 2.117  
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Purworejo  
Tahun 2016-2021

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
SD	1,29%	1,17%	0,99%	1,10%	1,00%
SMP	3,22%	3,09%	2,89%	3,05%	3,05%
SMA	30,27%	25,77%	23,59%	24,92%	22,95%
Diploma	33,68%	26,13%	25,15%	21,51%	16,87%
S-1	30,08%	40,81%	43,73%	45,43%	48,77%
S-2	1,45%	3,04%	3,65%	3,99%	7,35%

Sumber BKD Kabupaten Purworejo, 2015

Kondisi eksisting aparatur pemerintah daerah Kab.Purworejo s.d pertengahan bulan Mei 2016 sejumlah 10.391 orang, sebagian besar diantaranya adalah pria (52%), usia 51-60 tahun (48%), berpendidikan D4/S1 (50%), Golongan III (43%), Jabatan Fungsional tertentu (61%).

**2.5.39 Fungsi Penunjang Urusan Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Dan Pelayanan Administratif**

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Bentuk perumusan kebijakan berupa diantaranya berupa, penerbitan produk hukum.

Pencapaian kinerja bidang hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2015 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.118  
Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo  
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	100%	100%	99%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo Tahun 2015

Dari data diatas terlihat bahwa, Persentase ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kondisi baik mengalami peningkatan yang cukup hingga tahun 2011 - 2015 mampu mencapai 100%,

Jumlah produk hukum yang telah diterbitkan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119  
Jumlah Produk Hukum dari tahun 2010-2014

No.	Jenis Produk Hukum	2011	2012	2013	2014
1	Peraturan Daerah	29	21	14	16
2	Peraturan Bupati	18	73	130	79
3	Keputusan Bupati	738	627	821	874

Sumber Data: Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo Tahun 2015

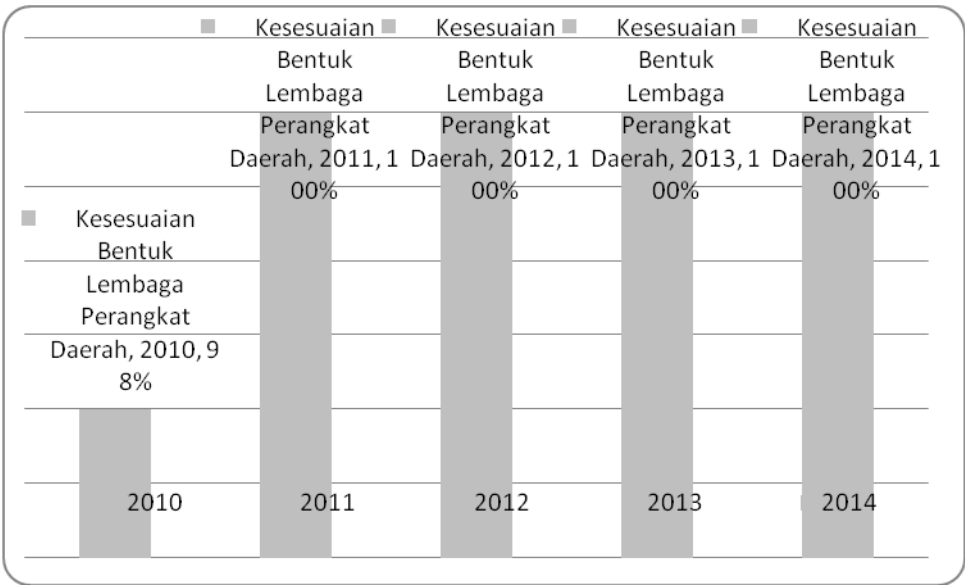
Capaian ketersediaan produk hukum daerah didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia berupa:

- a) Tim Penerbit Produk-produk hukum Daerah;
- b) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- c) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d) Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Fungsi Penyusunan Kebijakan , Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah mencakup empat puluh satu (41) perangkat daerah lembaga teknis, dinas daerah, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Kecamatan.

Dengan terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 maka akan terjadi perubahan kelembagaan pemerintah daerah kembali mengingat adanya peralihan urusan pemerintahan daerah

Adapun kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah sampai dengan tahun 2015 sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini:



Sumber Data: *Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo Tahun 2015*  
Gambar 2.43 : Persentase kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dari tahun 2010-2014

2.6. Aspek Daya Saing

Kinerja pencapaian aspek daya saing daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan akhir tahun 2015 dapat ditinjau dari beberapa hal yang dapat memacu pergerakan semua sektor pelayanan dasar maupun sektor produktif terkait aksesibilitasnya serta merupakan kewenangan daerah, didukung beberapa tolok ukur lain terkait ketentraman ketertiban masyarakat yang mendukung menciptakan stabilitas daerah sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan dan produksi daerah dapat berjalan dengan lancar. Capaian dari beberapa tolok ukur tersebut adalah sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.120  
Kinerja Aspek Daya Saing Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kondisi Baik-Sedang ( Km )	450,19	472,65	511,90	544,11	572,14
2	Jalan Kondisi Rusak ( Km )	191,32	160,12	135,87	114,74	100,09
3	Jalan Kondisi Rusak Berat ( Km )	109,88	114,56	100,56	88,48	75,10
4.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	75,11 %	75,11 %	75,11 %	75,11 %	75,11 %
	c. Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani angkutan umum	172	172	172	172	172
	d. Jumlah jaringan jalan yang seharusnya dilayani angkutan umum	229	229	229	229	229
5	Tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
	c. Jumlah halte yang ada	4	4	4	4	4
	d. Jumlah unit halte yang seharusnya ada	8	8	8	8	8
6	Tingkat kriminalitas (jumlah kasus tertangani)					56

Sumber data : Data dasar pembangunan daerah 2011-2015

Tabel 2.121  
Tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo Tahun 2015

No		Jumlah kasus	Jumlah Kasus Yang Ditangani
1	Jumlah kasus narkoba	1	1
2	Jumlah kasus pembunuhan	0	0
3	Jumlah kasus seksual	9	9
4	Jumlah kasus penganiayaan	6	5
5	Jumlah kasus pencurian	56	33
6	Jumlah kasus penipuan	8	6
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	2	2

Sumber data : Polres Purworejo (2015)

## **2.7. Evaluasi RPJMD 2011-2015.**

RPJMD 2011-2015 memiliki Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah sejumlah 230 indikator. Hasil evaluasi RPJMD 2011-2015 pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran tidak tercapai dan 213 (dua ratus tiga belas) indikator kinerja sasaran tercapai.

Secara rinci hasil evaluasi indicator kinerja sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.122

## Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2011 – 2015

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan)	8.00%	5.00%	20.00%	6.75%	29.71%	8.83%	15%	Tidak Tercapai	BKBPM
		2. Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	469	469	469	2,410	469	469	469	Tercapai	BKBPM
	2. Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Temuan inovasi dan kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat	0%	10%	50%	200%	50%	53.3%	50%	Tercapai	BKBPM
	3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan	1. Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes	10.00%	24.52%	42.82%	69.69%	30.00%	30%	30%	Tercapai	BKBPM



Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan pembangunan di desa	2. Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Desa (RPJMD-Des)	250	469	469	467	467	469	469	Tercapai	BKBPM
		3. Persentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa)	80%	76,11%	80%	80%	86%	100%	100%	Tercapai	BKBPM
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyapaikan pendapat di pemilu	1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILLEG, PILKADA)	53.00%	53%	53%	58.52%	68.00%	61.87%	60%	Tercapai	Kesbangpol
	2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat	1. Persentase penanganan pelanggaran peraturan perda & perbup	100.00%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	Tercapai	Kantor Satpol PP
		2. Persentase penanganan konflik yang terjadi di masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Kesbangpol dan Satpol PP
	3. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Persentase pelayanan penanggulangan bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	BPBD
Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya produktivitas sektor	1. Produktivitas lahan budidaya pertahun padi,	70,000	70,770.74	90,435	135,748	98,133	117,977	72,500	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan Pengemba ngan Agribisnis yang Berdaya Saing	pertanian dalam arti luas	palawija, dan holtikultura meningkat (ha/tahun)									
		2. Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun)	700,000	707,700	904,350	1,357,480	981,330	897,220	725,000	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
	2. Penguatan kelembagaan pertanian dalam arti luas (kelompok tani)	1. Persentase kelompok tani berbadan hukum (kelompok tani)	0	0	4	4	4	19	15	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
	3. Penguatan permodalan usaha pertanian dalam arti luas	1. Jumlah kelompok usaha pertanian dalam arti luas yang diberi permodalan (kelompok)	3	5	17	263	274	295	20	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
	4. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	1. Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (ha)	16	15	15	4	6	5,44	11	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
	5. Meningkatkan jenjang kelas kelompok tani	1. Jumlah jenjang kelompok tani									
		Pemula	1013	1080 kelp	565 kelp	30%	50%	30%	50%	Tercapai	Diperlatanak dan Kantor KP
		Lanjut	838	633kelp	1115 kelp	30%	51%	34%	50%	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
		Madya	93	74kelp	294 kelp	30%	201%	130%	50%	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
		Utama	0	0	1	3	5	19	5	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Meningkatkan cakupan pelayanan irigasi pedesaan	1. Panjang jaringan irigasi pedesaan dalam kondisi baik (m)	202,952	220,947	222,952	257,659	291,296	222,652	252,952	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
	7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Jumlah produksi padi (ton)	302,895	307,019	324,456	329,595	322,168	358,548	357,888	Tercapai	DPPKP dan Kantor KP
		2. Jumlah produksi jagung (ton)	26,122	17,748	29,558	9,986	13,206	18,370	37,073	Tidak tercapai	DPPKP dan Kantor KP
		3. Jumlah produksi kedelai (ton)	3,279	5,210	5,981	3,063	3,483	3,948	5,470	Tidak tercapai	DPPKP dan Kantor KP
	8. Meningkatnya produksi hasil ternak, populasi ternak, kelahiran IB, dan penanganan teknak sakit	1. Jumlah produksi daging (kg)	7,253,574	7,415,245	7,750,386	7,921,033	8,508,581	9,027,330	8,008,528	Tercapai	DPPKP
		2. Jumlah produksi telur (ton)	924,115	968,554	981,868	924.7	1,250,620	1,426,940	1,071,300	Tercapai	DPPKP
		3. Jumlah populasi ternak besar (ekor)	17,736	22,111	23,588	16,884	19,722	21,286	22,170	Tercapai	DPPKP
		4. Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	213,686	212,317	233,321	229,199	242,867	257,464	267,108	Tercapai	DPPKP
		5. Juml populasi ternak unggas (ekor)	1,114,956	1,507,792	1,523,464	1,372,676	1,576,222	3,431,077	1,393,695	Tercapai	DPPKP
		6. Jumlah populasi aneka ternak (ekor)	3,063	10,520	3,080	3,380	4,024	7,134	3,829	Tercapai	DPPKP
		7. Jumlah kelahiran IB (ekor)	2,467	4,633	4,838	4,768	5,381	5,124	3,750	Tercapai	DPPKP
		8. Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DPPKP
		9. Jumlah penanganan pencegahan penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DPPKP

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		hewan (ekor)									
	9. Meningkatnya pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi sumber daya hutan	1. Luas hutan rakyat (ha)	39,509	39,809	46,243.44	40,415	41,135	41,435	41,009	Tercapai	Dinhutbun
		2. Luas lahan kritis (ha)	36,830	35,189	29,753.56	34,824	24,789	24,489.25	33,989	Tercapai	Dinhutbun
		3. Luas lahan pengembangan hasil hutan bukan kayu (ha)	50	75	185	122.5	200	200	175	Tercapai	Dinhutbun
	10. Meningkatnya produksi tangkap nelayan Kabupaten Purworejo di 5 TPI	1. Jumlah produksi tangkap laut (ton)	42	50	68	61.6	53	58	62	Tercapai	DPPKP
	11. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	657	856	975.36	876	3,677	3,921	1,370	Tercapai	DPPKP
		2. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	20,394,400	21,672,000	25,912,800	27,720,660	31,527,330	33,108,000	34,898,400	Tercapai	DPPKP
	12. Meningkatnya kualitas dan produksi pengolahan ikan	1. Jumlah pengolah ikan yang dibina (orang)	50		250	435	545	575	400	Tercapai	DPPKP
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Persentase cadangan pangan daerah	32.00%	65.20%	224.91%	189.84%	416.23%	293.30%	50.00%	Tercapai	Kantor KP
		2. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/1000 penduduk)	93	84	100.37	99	81	93	93	Tercapai	Kantor KP
		3. Jumlah produksi padi/beras (ton)	302,895	302,895	307,019	329,595	322,168	358,548	357,888	Tercapai	Kantor KP
		4. Jumlah desa rawan	50	50	45	45	45	40	40	Tercapai	Kantor KP

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pangan (desa)									
	2. Meningkatnya distribusi dan keterjangkauan bahan pangan	1. Persentase kestabilan harga beras	84.00%	84%	85%	97.00%	98.00%	97.8%	100%	Tercapai	Kantor KP
		2. Persentase kemudahan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga	85.00%	85%	90%	90.00%	100.00%	100%	100%	Tercapai	Kantor KP
	3. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan	1. Persentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/hari (gizi=kalori, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang dikonsumsi penduduk)	86.20%	86.20%	89%	90.50%	90.70%	90,7%	100%	Tercapai	Kantor KP
	1. Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agroindustri dalam pengelolaan potensi pertanian	1. Persentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian	13.554	13,554	3%	6%	12%	15%	15%	Tercapai	Diskoperinda gpar
Pembangu nan Infrastrukt ur yang Pro Investasi dan Berkelanjut an	1. Meningkatnya kualitas penataan ruang	1. Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan	0	1	2	3	3	3	5	Tidak tercapai	Bappeda
		2. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	50.00%	60%	65.00%	65.00%	65.00%	65%	70%	Tercapai	Bappeda dan DPU
	2. Meningkatnya penggunaan pola	1. Pencegahan pencemaran air	20%	41%	80%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Kantor LH

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)	2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Kantor LH
		3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	0%	10%	25%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Kantor LH
		4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	50.00%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	Tercapai	Kantor LH
	2. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)	5. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan	5355 Ha	3.266,7 ha	(3.536,2 ha) 33,96%	41.42%	22%	(89.307.656 Ha) 32.49%	(3467,75 ha) 35%	Tercapai	SDAESDM dan Kantor LH
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain)	1. Persentase jalan dengan kualitas baik	55.00%	59.92%	63.44%	68.49%	72.83%	76.55%	60%	Tercapai	DPU
		2. Persentase jembatan dengan kondisi baik	67.00%	69.20%	96.10%	96.77%	91.65%	92.12%	74.10%	Tercapai	DPU
		3. Rasio layanan irigasi (Daerah Irigasi tercukupi)	44.40%	75.04%	51.11%	57.01%	64.36%	72.03%	67.40%	Tercapai	SDAESDM

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Akses air bersih (dari 181 desa rawan air bersih tertangani)	64.00%	81.11%	67.65%	79.90%	106.08%	116.02%	88%	Tercapai	DPU
		5. Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%)	50.00%	40.80%	63.00%	79.07%	75.47%	77.638%	80%	Tercapai	DPU
		6. Persentase cakupan layanan air limbah	40.00%	92.00%	60.42%	91.89%	89.13%	91.38%	60%	Tercapai	DPU
		7. Persentase cakupan layanan persampahan	40.00%	47.06%	91.42%	60.42%	100.00%	100%	60%	Tercapai	DPU dan Kantor LH
		8. Luas genangan air hujan/banjir yang tertangani	20.00%	25.21%	24.00%	51.61%	16.72%	17.26%	30%	Tidak tercapai	Dinas SDAESDM dan DPU
		9. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air (3 Daerah Aliran Sungai)	25%	20.74%	25.23%	25.35%	28%	32.93%	35%	Tercapai	SDAESDM
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )	10. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	85%	87%	77.15%	89.28%	80%	80.43%	90%	Tercapai	DPU, KBPM, Kesbangpol, & BPBD
		11. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	82.00%	84.25%	79.71%	85.00%	76.00%	52.64%	86%	Tidak tercapai	DPU
		12. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	52%	53%	54%	55%	56%	57.69%	57%	Tercapai	DPU
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana	13. Persentase ketersediaan sarpras	25.00%	38%	48.50%	61.34%	92.14%	97.11%	80%	Tercapai	Dishubkomin fo

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )	perhubungan sesuai kebutuhan									
		14. Persentase sarana perhubungan dengan kondisi baik	40.00%	45%	95.45%	93.00%	100.00%	98.48%	70%	Tercapai	Dishubkomin fo
		15. Persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan	30.00%	32%	40.00%	58.00%	75.00%	75%	75%	Tercapai	Dishubkomin fo
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )	16. Dusun tanpa akses listrik	10.00%	9% (16 dusun)	8.00%	4.00%	6.00%	5.00%	5.00%	Tercapai	SDA
		17. Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit)	0	8 unit biogas	20	27	27	27	60	Tidak tercapai	Diskoperinda gpar
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	1. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah	1. Persentase pertumbuhan pendapatan (PAD, Bagi Hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan)	Rp.60.9 milyar	46% (Rp 88.941.780.524)	37,23% (Rp. 98.262.003.374)	109%(127,566M)	272.00%	424.24% (319.26 M)	30% 79,17 M	Tercapai	DPPKAD
	2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	1. Persentase bagian laba BUMD	Rp.2.1 milyar	35% (2,84 M)	78% (3.74M)	98% (4,153M)	141% (5,07M)	173.71% (5.74 M)	25% (2,79 M)	Tercapai	DPPKAD dan Bagian Perekonomian SETDA
	2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	2. Persentase jumlah koperasi sehat	27.00%	40.33%	56.66%	75.47%	66.65%	81.33%	75%	Tercapai	Diskoperinda gpar
		3. Persentase peningkatan jumlah UMKM	7%	16.82%	19%	23.92%	35%	42%	10%	Tercapai	Diskoperinda gpar



Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung daya saing daerah	1. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan	1. Persentase peningkatan jumlah kluster yang terbentuk	26 kluster	11,5% (29 usaha bersama)	15% (30 usaha bersama)	104% (57 KUB)	124%	135%	30%	Tercapai	Diskoperindagpar
	2. Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal	1. Persentase peningkatan transaksi produk lokal	13.61%	10.00%	17.00%	17.39%	17.18%	19.00%	23.00%	Tercapai	Diskoperindagpar
		2. Persentase pertumbuhan ekspor	0.00%	8.00%	33.60%	525.43%	7.43%	47.00%	60.00%	Tidak tercapai	Diskoperindagpar
	3. Meningkatnya nilai tambah produk-produk lokal	1. Persentase rata-rata pertumbuhan PDRB	9.78%	9.79%	10.46%	10.19%	4.99%	5.09%	9.85%	Tidak tercapai	Diskoperindagpar
	4. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan jumlah investor	323 investor	-3,82% (327)	33,52% (454)	39.41% (474)	40.45%	41% (572)	25% (431)	Tercapai	1. Sekretariat Daerah (Bagian Prekonomian), KPMPT, dan 3). Bappeda
		2. Persentase peningkatan nilai investasi	43 milyar	1,73% (45,93 M)	218% (140,42 M)	110% (92.94 M)	110% (92.94 M)	125% (111,3M)	25% (55,8 M)	Tercapai	
		3. Jumlah perijinan investasi yang diterbitkan	324	327	33,52% (454)	39.41% (474)	517 / 42.98%	572 / (500%)	25%	Tercapai	KPMPT
	5. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	1. Persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor hotel & restoran.	12.00%	15%	1.35%	16.90%	17.18%	17%	16%	Tercapai	Diskoperindagpar
		2. Kontribusi pariwisata terhadap PAD	1.42%	4.07%	1.92%	2.64%	0.53%	17.00%	6.19%	Tercapai	Diskoperindagpar

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	6. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan aset budaya	1. Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan perda	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		2. Jumlah event/ pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan	9	2	5	37	16	84	50	Tercapai	Dikbudpora
		3. Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara	453	483	492	539	579	579	519	Tercapai	Dikbudpora
	7. Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP	1. Persentase Tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat	25.45%	27%	19.52%	26.99%	27.2%	30.75%	35%	Tercapai	Bagian Pemerintahan Setda dan DPPKAD
		2. Persentase rata-rata pertumbuhan konstibusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD	19%	20%	14%	109%	24%	28.49%	24%	Tercapai	Bagian Pemerintahan Setda dan DPPKAD
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan	1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	1. Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Persentase kompetensi	80.00%	79.66%	84.84%	89.68%	93.86%	94.33%	90%	Tercapai	BKD dan Setda

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reformasi Birokrasi		pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)									
		2. Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM	72.00%	69.10%	80.94%	82.48%	85.68%	91.27%	85%	Tercapai	BKD
		3. Persentase tingkat pendidikan aparat	56.00%	68.00%	72.60%	78%	95.85%	96.22%	90%	Tercapai	BKD
		4. Persentase tingkat pelanggaran disiplin PNS	28.00%	29.62%	20.46%	12.36%	11.51%	2.19%	10.00%	Tercapai	BKD
		5. Persentase aparat yang mendapatkan penghargaan	78.00%	82.19%	83.78%	85.54%	89.69%	78.35%	85%	Tercapai	BKD
		6. Persentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya	50.00%	60.50%	70.56%	84.00%	86.50%	92.10%	90%	Tercapai	BKD
		7. Persentase Aparatur yang bebas dari Praktek KKN	75%	85%	99.99%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Setda
		8. Persentase Tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur	90%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	Tercapai	Setda
		9. Persentase Tingkat tertib administrasi kepegawaian	70%	75.49%	85.91%	90.66%	105%	95.01%	95%	Tercapai	BKD
Pemantapa n Tata	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Persentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	Tercapai	Setda

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	pemerintahan	2. Persentase SKPD yang predikat akuntabilitas baik	0.00%	5%	9%	1.35%	15.35%	100%	20%	Tercapai	Inspektorat
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	3. Meningkatkan mekanisme dan tata hubungan antar SKPD / instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan	1. Persentase kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Setda
		2. Persentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi	90%	100%	100%	95%	98%	100%	100%	Tercapai	Setda
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan public	1. Persentase SKPD yang menerapkan SPM	8.00%	10%	13.63%	22.70%	17.50%	19%	20%	Tercapai	Setda
		2. Persentase SKPD yang memiliki SOP	8.00%	10%	10.60%	17.50%	17.50%	19%	20%	Tercapai	Setda
		3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah memiliki IKM (Indeks Kepuasan	3	3	7 SKPD /Unit Kerja	9 SKPD	12 unit	16	12 SKPD /Unit Kerja	Tercapai	Setda

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e) dan Reformasi Birokrasi		Masyarakat)									
		4. Berkurangnya tindak komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	60	50	48	120	43	16	47	Tercapai	Setda
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	5. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan anatar eksekutif dan legislatif sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	1. Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan kerjasama aktif Pemerintah Daerah dan DPRD	10	12	18	8	15	17	20	Tercapai	Setwan
		2. Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tercapai	DPPKAD
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	6. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK	Wajar dengan pengecu alian	Wajar dengan pengecu alian	Wajar tanpa pengecu alian	Wajar tanpa pengecu alian	Wajar tanpa pengecu alian	Wajar tanpa pengecu alian	Wajar tanpa pengecu alian	Tercapai	DPPKAD

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantapa n Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e) dan Reformasi Birokrasi	7. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Persentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Kecamatan

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	8. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Persentase tertib administrasi kelurahan (terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Kelurahan
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	9. Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Tingkat ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Bagian Hukum Setda

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	10. Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan	1. Persentase jumlah kasus yang tertangani	39 kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Inspektorat
		2. Persentase pengembalian kerugian negara/daerah ke Kas negara/daerah	Rp.813.838.962	Rp 640.998.736 (78,76%)	78,31% (Rp 1.774.450.084,55)	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Inspektorat
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	11. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	1. Rasio rencana pembangunan yang terealisasi	75%	80%	85.01%	88.53%	90%	95.27%	100%	Tercapai	Bappeda
		2. Rasio perencanaan dengan kompetensi standar	3%	80%	87.88%	100%	95%	100%	100%	Tercapai	Bappeda
		3. Persentase efisiensi kinerja SKPD	74%	80%	96.67%	92%	95%	83.03%	100%	Tercapai	Bappeda
		4. Persentase efektivitas kinerja SKPD	79%	80%	97.23%	96%	95%	95.02%	100%	Tercapai	Bappeda
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	12. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	1. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pelayanan kependudukan (hari)									
		a. KK	3	3	3	2	2	2	2	Tercapai	Disdukcapil
		b. KTP	3	1	1	1	1	1	1	Tercapai	Disdukcapil
		c. Pindah Datang	1	1	1	1	1	1	1	Tercapai	Disdukcapil



Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e) dan Reformasi Birokrasi		d. Akte Kelahiran	21	21	7	7	7	7	14	Tercapai	Disdukcapi
		e. Akte Kematian	14	14	7	7	7	7	12	Tercapai	Disdukcapi
		f. Keterangan Lahir Mati	14	14	7	0	12	*	12	Tercapai	Disdukcapi
		g. Akte Perkawinan	14	14	14	4	4	4	12	Tercapai	Disdukcapi
		h. Akte Perceraian	14	14	3	3	3	3	12	Tercapai	Disdukcapi
		i. Pengakuan anak	14	14	14	7	7	7	12	Tercapai	Disdukcapi
		j. Pengesahan Anak	14	14	14	7	7	7	12	Tercapai	Disdukcapi
		k. Perubahan Nama	24	24	23	7	7	7	18	Tercapai	Disdukcapi
		l. Perubahan Status Kewarganegaraan	24	24	23	7	7	7	18	Tercapai	Disdukcapi
		m. Pembatalan Perkawinan	14	14	14	7	7	7	12	Tercapai	Disdukcapi
		n. Pembatalan Perceraian	14	14	14	7	7	7	12	Tercapai	Disdukcapi
		2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP	100%	50.8%	98.08%	86.58%	81.16%	88.15%	100%	Tercapai	Disdukcapi
		3. Persentase Kepemilikan akta kelahiran	100%	14.8%	84.07%	95.71%	96.23%	95.5%	100%	Tercapai	Disdukcapi
		4. Persentase terpeliharanya data base kependudukan	100%	96.87%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Disdukcapi
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang	13. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah	1. Persentase publish-an data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru	60.00%	70%	77.50%	90.00%	50.00%	100%	100%	Tercapai	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi		2. Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI	10	14	10	70	77	77	20	Tercapai	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
		3. Persentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	50%	60%	100%	77%	91%	100%	100%	Tercapai	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
		4. Persentase pengendalian tower telekomunikasi	50%	100%	55.46%	79.86%	100%	100%	100%	Tercapai	Dishubkominfo dan Bagian Humas Setda
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	14. Peningkatan ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1. Persentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	50.00%	75%	83.33%	83.33%	90.00%	116.67%	100%	Tercapai	Bappeda

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	15. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	1. Jumlah berkas (dokumen/arsip negara) yang dikelola dengan baik	26,299	26,299	34,274	34,395	46,774	52,215	35,000	Tercapai	Kantor Arpusda
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi	16. Meningkatnya pelayanan perpustakaan daerah	1. Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah	33,871	28,094	34,276	31,326	30,598	29,317	34,500	Tercapai	Kantor Arpusda
		2. Jumlah sekolah/tempat yang di singgahi perpustakaan keliling	45	45	45	47	49	50	50	Tercapai	Kantor Arpusda
		3. Jumlah koleksi bahan pustaka	34,992	36,192	35,634	36,279	36,920	37,670	37,500	Tercapai	Kantor Arpusda
Meningkatkan akses dan kualitas ketersediaan kesehatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pencegahan dan peningkatan kualitas)	1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	109.17	100.30	202	72.80	53.73	73.36	102	Tercapai	DKK

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	12.67	15.6	14.95	11.54	13	12.16	8	Tercapai	DKK
		3. Prevalensi gizi buruk	0.16%	0.11%	0.10%	0.13%	0.10%	0.097	0.10%	Tercapai	DKK
		4. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	100.0%	100%	Tercapai	DKK
		5. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	94.00%	90%	90.40%	87.90%	87.40%	88.7%	96%	Tercapai	DKK
		6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	88%	92.1%	132.20%	119%	100%	100%	100%	Tercapai	DKK
		7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	93%	97.60%	98%	96%	98.6%	96%	Tercapai	DKK
		8. Cakupan pelayanan nifas	96%	92.7%	96.20%	97%	97%	97.3%	96%	Tercapai	DKK
		9. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	45%	89.4%	86.10%	73%	69%	69.8%	100%	Tidak tercapai	DKK
		10. Cakupan kunjungan bayi	92.00%	90.5%	98.20%	97.20%	96.00%	98.3%	95%	Tercapai	DKK
		11. Cakupan pelayanan anak balita	37%	77%	90.90%	92%	83%	76.5%	90%	Tercapai	DKK
		12. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan	5%	76%	55%	99%	75%	100.0%	100%	Tercapai	DKK

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		setingkat									
		13. Cakupan peserta KB Aktif	80.00%	81.3%	81.25%	83.70%	84.00%	84.6%	85%	Tercapai	DKK
		14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit									
		a. Acude Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	Tercapai	DKK
		b. Pneumonia Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	Tercapai	DKK
		c. Pasien baru TB BTA positif	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	Tercapai	DKK
		d. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	Tercapai	DKK
		e. Penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	Tercapai	DKK
		15. Usia harapan hidup (tahun)	70.01	70.00	70.78	72.10	71.51	72.00	72	Tercapai	DKK
		16. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (MDG's)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DKK
		17. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yg hrs diberikan sarana kes (RS) di kabupaten	60.00%	63.75%	68.25%	68.44%	80.25%	80.25%	75.00%	Tercapai	RSU Saras Husada

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatk an akses dan kualitas ketersediaa n kesehatan		18. Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani	75.00%	99.96%	99.94%	99.17%	98.21%	98.71%	85%	Tercapai	RSU Saras Husada
		19. Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani	75.00%	98.40%	98.48%	98.81%	99.12%	98.91%	85%	Tercapai	RSU Saras Husada
		20. Pencapaian RSUD Saras Husada terakreditasi menjadi RSUD Tipe B- Pendidikan	60%	60.00%	60.18%	0%	100%	100%	75%	Tercapai	RSU Saras Husada
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan)	1. Cakupan desa siaga aktif	50.00%	60.7%	100%	100.00%	78.75%	100%	80%	Tercapai	DKK
		2. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DKK
		3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	95.7%	100%	100%	98%	100%	100%	Tercapai	DKK
Meningkatk an akses dan kualitas ketersediaa n kesehatan	3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (bagi penduduk miskin)	1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Peserta Askeskin)	238603 peserta	75%	66.00%	100.00%	78.75%	100%	80%	Tercapai	DKK

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola	
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Penurunan angka kemiskinan		2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	97.74%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DKK	
		3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	DKK	
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Berkurangnya Jumlah keluarga sejahtera I (KS I) dan keluarga pra sejahtera (pra KS)	45.00%	44%	44.00%	51.33%	43.94%	43.94%	41%	Tercapai	BKBPM	
		2. Berkurangnya Jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS)	27.26%	26%	30.85%	32.27%	5.37%	5.37%	15%	Tidak tercapai	BKBPM	
		3. Persentase partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB	70%	81%	80.91%	83.70%	83%	82.40%	80%	Tercapai	BKBPM	
	Meningkatk an akses dan kualitas ketersediaa n pendidikan	5. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan Pendidikan)	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)									
a. APK PAUD formal			48.65%	48.68%	58.50%	59.89%	68.98%	71.19%	61%	Tercapai	Dikbudpora	
b. APK SD/MI/Paket A			103.90%	103.98%	103.03%	102.47%	100.58%	101.74%	102%	Tercapai	Dikbudpora	
c. APK SMP/MTs/Paket B			94.20%	94.22%	94.40%	95.71%	97.01%	98.14%	100%	Tercapai	Dikbudpora	
d. APK SMA/SMK/MA/Paket C			61.68%	62.73%	62.99%	83.38%	83.92%	84.95%	65%	Tercapai	Dikbudpora	
2. Angka Partisipasi Murni (APM)												
a. APM PAUD formal			48.65%	48.68%	58.50%	47.47%	58.55%	41.54%	61%	Tidak	Dikbudpora	

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										tercapai	
		b. APM SD/MI/Paket A	88.79%	88.91%	88.96%	88.84%	85.54%	85.93%	95%	Tercapai	Dikbudpora
		c. APM SMP/MTs/Paket B	71.52%	71.55%	71.62%	50.77%	77.91%	77.94%	76.80%	Tercapai	Dikbudpora
		d. APM SMA/SMK/MA/Paket C	45.23%	45.27%	46.84%	58.78%	59.03%	63.50%	50%	Tercapai	Dikbudpora
Meningkatk an akses dan kualitas ketersediaa n pendidikan	6. Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan (Kualitas mutu & relevansi serta Kesetaraan Pendidikan)	1. Rasio layanan tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4									
		a. Jenjang PAUD	5.26%	11.60%	12.98%	23.51%	43.58%	50.93%	85%	Tidak tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SD/SDLB	21.48%	36.28%	36.30%	70.21%	76.96%	83.47%	88%	Tercapai	Dikbudpora
		c. Jenjang SMP/SMPLB	76.15%	77.87%	79.52%	87.57%	87.30%	90.39%	98%	Tercapai	Dikbudpora
		d. Jenjang SMA/SMK/SMALB	85.73%	86.45%	83.88%	92.06%	92.88%	93.82%	98%	Tercapai	Dikbudpora
		2. Rasio layanan tenaga pendidik telah bersertifikasi									
		a. Jenjang PAUD	4.20%	9.31%	20.45%	29.93%	12.11%	54.37%	85%	Tidak tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SD/SDLB	21.48%	32.80%	52.80%	64.44%	50.11%	56.08%	80%	Tidak tercapai	Dikbudpora
		c. Jenjang SMP/SMPLB	76.15%	27.19%	68.98%	70.11%	64.45%	61.22%	90%	Tidak tercapai	Dikbudpora
		d. Jenjang SMA/SMK/SMALB	5.73%	23.53%	62.89%	65.39%	86.00%	82.50%	90%	Tercapai	Dikbudpora
		3. Angka melek huruf	89.20%	99.49%	91.74%	99.41%	100.00%	100.00%	90.60%	Tercapai	Dikbudpora
		4. Rata-rata lama sekolah (tahun)	7	8	7.84	9	9	9	9	Tercapai	Dikbudpora



Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Ketersediaan kurikulum nasional dan local	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		6. Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		7. Angka putus sekolah maksimal									
		a. Jenjang SD/SDLB	0.05%	0.07%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%	0.01%	Tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SMP/SMPLB	0.09%	0.08%	0.05%	0.23%	0.07%	0.06%	0.05%	Tercapai	Dikbudpora
		8. Persentase kelulusan									
		a. Jenjang SD/SDLB	99.23%	99.48%	99.47%	98.83%	99.54%	100%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SMP/SMPLB	95.21%	96%	98.13%	91.34%	95.56%	100%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	97.29%	98%	99.47%	99.88%	94.04%	100%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		9. Lulusan yang melanjutkan									
		a. Jenjang SD/SDLB	98.21%	99%	98.33%	99.47%	101.98%	102%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SMP/SMPLB	90.59%	91.00%	91.06%	94.23%	100.43%	103.37%	93.50%	Tercapai	Dikbudpora
		10. Rasio guru dengan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA									
		a. Jenjang SD/SDLB	1:22	1:17	1:15	1:13	1:15	1:13	1:28	Tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SMP/SMPLB	1:18	1:18	1:19	1:12	1:14	1:14	1:28	Tercapai	Dikbudpora
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	1:15	1:18	1:18	1:11	1:12	1:11	1:32	Tercapai	Dikbudpora
		11. Peningkatan sarana									

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		prasarana pendidikan									
		a. Ruang Kelas SD/SDLB baik	69.73%	81.25%	66.88%	74.12%	74.57%	72.23%	90%	Tercapai	Dikbudpora
		b. Ruang Kelas SMP/SMPLB baik	73.60%	79.85%	85.22%	87.05%	83.84%	83.83%	95%	Tercapai	Dikbudpora
		c. Ruang Kelas SMA/SMK/SMALB baik	95.10%	80.96%	88.40%	89.95%	86.76%	87.01%	98%	Tercapai	Dikbudpora
		d. Ketersediaan Ruang Perpust SD	23.12%	30.02%	26.40%	57.96%	74.38%	75.22%	30%	Tercapai	Dikbudpora
		e. Ketersediaan Lab. IPA Lengk SMP	73.68%	75.79%	78.76%	40.29%	82.80%	97.17%	100%	Tercapai	Dikbudpora
Meningkatkan akses dan kualitas ketersediaan pendidikan	7. Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pendidikan (Kepastian/Kerterjaminan Pendidikan)	1. Satuan pendidikan telah terakreditasi									
		a. Jenjang SD/SDLB	100%	100%	100.00%	100%	99%	98.41%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SMP/SMPLB	100%	100%	100.00%	100%	94%	97.17%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	100%	100%	100.00%	100%	100%	80.28%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		2. Satuan pendidikan dengan nilai akreditasi minimal B									
		a. Jenjang SD/SDLB	91.91%	93.00%	98.87%	98.87%	98.45%	96.94%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		b. Jenjang SMP/SMPLB	74.75%	75.76%	96.96%	96.96%	88.51%	90.29%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	67.00%	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.72%	100%	Tercapai	Dikbudpora
		3. SMK yang telah memiliki standar ISO 9001:2008	11.11%	16.67%	16.66%	31.71%	36.59%	54.76%	50%	Tercapai	Dikbudpora

Prioritas Pembangunan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Jumlah regulasi tentang biaya pendidikan	1	5	7	9	9	9	10	Tercapai	Dikbudpora
Meningkatkan akses dan kualitas ketersediaan pendidikan	8. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.	1. Jumlah prestasi olahraga	12	15	18	22	22	27	25	Tercapai	Dikbudpora
		2. Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi	11	12	12	4	4	11	12	Tercapai	Dikbudpora
Meningkatkan akses dan kualitas ketersediaan pendidikan	9. Meningkatnya kualitas penduduk usia produktif	1. Persentase penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi	65.00%	80%	81.25%	80.06%	80.06%	80.60%	85.00%	Tercapai	Dikbudpora
Penurunan angka kemiskinan	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Turunnya jumlah pengangguran (orang)	14,937	12,972	20,694	16,429	3,640	3,188	12,251	Tidak tercapai	Dinsosnakertrans
	1. Menurunnya angka kemiskinan	2. Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi	40.00%	39.34%	30.17%	30.68%	30.17%	0%	45%	Tercapai	Dinsosnakertrans
	1. Menurunnya angka kemiskinan	3. Turunnya angka kemiskinan	17.20%	15.66%	17,50%	16.32%	15.44%	14.41%	11.83%	Tidak tercapai	Dinsosnakertrans
	2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Persentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	5.00%	2.10%	2.64%	2.29%	0.41%	9.83%	7%	Tercapai	Dinsosnakertrans
	3. Meningkatnya	1. Ketimpangan antara IPM	71.88/60.	72,55 /	72,91/65,	72,91/65,	74.18 /	74.18/66.	73/65	Tercapai	BKBPM

Prioritas Pembangu nan Tahun 2011-2015	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Tahun							Status Capaian	SKPD Pengelola
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir (Tahun 2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kesetaraan gender (GDI)	dan IPG	80	64,67	49	49		16			
		2. IPG	60.8	64.67	65.49	65.49	66.16	66.16	65	Tercapai	BKBPM
	4. Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak	1. Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	BKBPM

(Sumber : Hasil evaluasi RPJMD Tahun 2015 diolah dari data sekunder yang berasal dari SKPD Pengelola, 2015)

## **2.8. Pembagian urusan kewenangan**

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan berupa fungsi penunjang urusan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan

- r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
4. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
- a. Fungsi Penunjang Urusan Dukungan Fungsi DPRD
  - b. Fungsi Penunjang Urusan Pembinaan dan Pengawasan
  - c. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan;
  - d. Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Fungsi Penunjang Urusan Keuangan;
  - f. Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - g. Fungsi Penunjang Urusan Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Dan Pelayanan Administratif
  - h. Fungsi Penunjang urusan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-